

# MOESLIM CHOICE

RP. 125.000,-



## FEBY DERU PEDULI SOSIAL DAN GOTONG ROYONG

SRIWIJAYA  
EXPO 2025  
BERSAMA  
WAGUB CIK UJANG

BAGAIMANA  
KEMENAG  
USAI  
LEPASKAN HAJI

MENDAGRI  
WAJIBKAN  
PEMDA  
DUKUNG PSN

PENANTIAN  
BADAN  
EKONOMI  
SYARIAH

# MOESLIM CHOICE .COM

## PORTAL NEWS



ALAMAT REDAKSI/IKLAN  
PT. Inter Media Digital  
Jalan Raya Kalibata No. 8,  
Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750  
Telepon : (021) 791 96781  
FAX : (021) 791 96786

EMAIL :  
[moeslimchoice@gmail.com](mailto:moeslimchoice@gmail.com)

FACEBOOK :  
[moeslimchoice](https://www.facebook.com/moeslimchoice)

TWITTER :  
[@moeslimchoice](https://twitter.com/moeslimchoice)  
you tube channel:  
[moeslimchoice tv](https://www.youtube.com/moeslimchoice)

**MCTV**  
MOESLIMCHOICE.TV

**MOESLIM CHOICE**  
MAGAZINE

[moeslimchoice.com](http://moeslimchoice.com)

## PENANGGUNGJAWAB

H. Usman Rizal

## DIREKTUR

HM. Kamel Fahresy SH

## PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

## WAKIL PEMIMPIN REDAKSI

Hj. Melati Tagore

## REDAKTUR PELAKSANA

Rahmat Romli

## SEKRETARIS REDAKSI

Niken Rizky Apriandani

## REDAKTUR

Irmayani, Rosyidah Rozali,  
Fahmi Jamba, M. Rahmat,  
M. Husnie

## REDAKTUR BISNIS

.H. M Firmansyah  
Muhammad Rizky,  
Muhammad Raden Solehin

## REPORTER

Mario CH, Aldi Rinaldi,  
M. Iqbal, Ida Iryani, M. Yathi,  
Muhammad Fiqri,  
Muhammad Khaidir

## KEPALA BIRO SUMSEL

Rahmat Romli

## FOTOGRAFER & VIDEOGRAFER

Al Amin

## TATA LETAK/COVER

Kosasih Chiko

## KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nur Khamidah

## DIVISI PENGEMBANGAN IT

Irvan, Wahyu, M. Fikri

## DISTRIBUSI

Itang AB, M. Isro

## PERCETAKAN

PT. RESPATIH SAHABAT SEJATI

Isi di luar tanggung jawab  
percetakan

## >>SALAM REDAKSI

# SAFAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

**S**afar 1447 hijriyah beriringan dengan Agustus 2025 pada kalender gregorian. Pada akhir Safar 1447 kita memperingati hari Proklamasi Kemerdekaan ke-80, tepatnya pada Ahad atau Minggu, 17 Agustus 2025

Ya Safar 1447 pada Agustus 2025 turut menjadi konteks peringatan ulang tahun ke-80 proklamasi. Mungkin banyak yang sudah merancang acara 17-an itu. Terlebih, kali ini peringatan HUT ke-80 Proklamasi Kemerdekaan. Logo resmi HUT ke-80 Proklamasi pun sudah meluncur.

Apapun rencananya, Safar dan proklamasi menyediakan bahan kontemplasi, renungan. Umat Islam mengenal terminologi tadabbur. Tadabbur, berasal dari kata dabbara yang bermakna belakang, silam, telah terjadi. Mohon maaf bahwa kata dubur dalam bahasa Indonesia pun berasal dari khazanah yang sama: belakang.

Kita kembali saja ke kontemplasi Safar dan proklamasi tadi. Safar dapat bermakna kosong yang dalam sejarahnya terkait dengan kekosongan wilayah Makkah karena terjadi peperangan. Jika kita ingat peristiwa hijrah, Rasulullah meninggalkan Makkah pada malam 27 Safar. Maka wajar pula Makkah terasa kosong pada akhir Safar kala itu.

Sedangkan proklamasi berasal dari kata bahasa Latin, proclamare, teriakan keras, seruan, agar pernyataan menyebar seluas mungkin. Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 itu pun terkait dengan kekosongan kekuasaan Jepang di wilayah koloni Hindia Belanda (Indonesia sekarang) setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Nah, pada Safar 1447 dan Agustus 2025 ini, kontemplasi atau tadabbur apa yang relevan? Mungkin ada yang ingin mengaitkan 80 tahun kemerdekaan dengan dinamika politik tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dilantik pada Minggu, 20 Oktober 2025. Sedangkan 17 Agustus 2025 pun jatuh pada hari yang sama: hari libur.

Toh penyelenggaraan negara tak mengenal liburan. Dinamika politik dan jalin kelindannya dengan ranah lain sungguh sedang menunjukkan kompleksitas yang meningkat. Apalagi jika mengamati dinamika penegakan hukum, law enforcement, yang masih berproses di Kejaksaan Negeri tingkat kabupaten maupun kota hingga Kejaksaan Agung di tingkat nasional. Begitu pula dengan penegakan hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang juga menjangkau kabupaten-kota, provinsi, hingga di tingkat nasional semisal di lingkup Badan Usaha Milik Negara juga swasta.

Toh begitu banyak masalah lain di luar penegakan hukum. Antara lain, soal jumlah penduduk dan kaitannya dengan kemiskinan maupun ketimpangan, pendidikan, lapangan pekerjaan, juga kesehatan. Banyak lagi sebenarnya masalah yang kita hadapi sebagai bangsa pada tahun ke-80 sejak proklamasi kemerdekaan digaungkan oleh Soekarno-Hatta.

Akhirnya, kita berharap tahun ke-80 kemerdekaan bangsa ini juga menjadi tonggak atau momentum hijrah menuju keadaan yang lebih baik di segala bidang. Alhamdulillah, setidaknya kita dapat ikut menentukan sendiri perjalanan bangsa ini ke depan: Merdeka. ♦

## >>COVER EDISI INI



### ALAMAT REDAKSI/IKLAN

PT. Inter Media Digital  
Jalan Raya Kalibata No.  
8, Kota Jakarta Selatan,  
Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta 12750

Telepon : (021) 791 96781

FAX : (021) 791 96786

### EMAIL :

moeslimchoice@gmail.com

### FACEBOOK :

moeslimchoice

### TWITTER :

@moeslimchoice

### YOU TUBE CHANNEL:

moeslimchoice TV

www.moeslimchoice.com

# >>DAFTAR ISI



06



20



58



24

06

## LAPORAN UTAMA

Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menangani dugaan korupsi tambahan kuota haji 2023-2024. Penyelidikan masih berlanjut. Namun, belum ada tersangka hingga pertengahan Agustus 2025.

24

## SUMSEL SYARIAH

Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Gibran Rakabuming, melakukan kunjungan ke Kriya Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat 1 Agustus 2025.

20

## EKONOMI SYARIAH

Wakaf sudah pasti penggalangan harta benda untuk kepentingan umum. Nah, Kementerian Agama meluncurkan gerakan wakaf untuk pendidikan.

58

## BIROKRASI KEMENDAGRI

Setelah bertahun-tahun diganggu dan disosialisasikan, kini reformasi birokrasi mulai diterapkan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini telah menandatangani Surat Edaran Menteri PANRB No. 6/2025 tentang Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.



**44** **KEMENAG**  
Kementerian Agama (Kemenag) kini fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama dan keagamaan, sejak urusan haji di alihkan ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).

**52** **MUBA MAJU LEBIH CEPAT**  
Program Bantuan Sayang Anak atau Basanak yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaras dengan kebijakan nasional Asta Cita untuk meningkatkan kesehatan pelajar.

**88** **LAPORAN KHUSUS**  
Seperti apa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah setelah 80 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Sarasehan ekonomi syariah kerja sama Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia berupaya menjawabnya.

**22**  
**SELEBRITI**

Kisah hijrah artis dan model, Celine Evangelista menjadi seorang mualaf menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aktris 33 tahun itu, akhirnya buka suara terkait perjalanan spiritualnya hingga mantap menjadi seorang mualaf dengan memeluk Islam dan mengenakan hijab. Awalnya, ia sempat menutupi keyakinannya dari publik, namun kini ia merasa siap membagikan cerita hidupnya.

## REGULER

- 3 | SALAM REDAKSI
- 18 | UFUK
- 38 | WISATA HALAL
- 68 | PARLEMEN
- 72 | KAJIAN
- 76 | MUALAF
- 80 | KESEHATAN
- 82 | RESENSI
- 84 | INSPIRATIF
- 86 | KOLOM 1
- 84 | PARLEMEN



# KUOTA HAJI JADI URUSAN KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi mulai menangani dugaan korupsi tambahan kuota haji 2023-2024. Penyelidikan masih berlanjut. Namun, belum ada tersangka hingga pertengahan Agustus 2025.



Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat keluar dari kantor Maktour, salah satu perusahaan perjalanan dan wisata terkemuka di bidang penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Membawa tiga container box, dua koper warna merah dan hitam, juga kotak kardus, pada Kamis, 14 Agustus 2025 itu, para penyidik KPK berupaya mencari alat bukti dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembagian kuota haji 2023–2024 di Kementerian Agama (Kemenag).

Belasan petugas KPK yang dikawal polisi bersenjata laras panjang tadi juga membawa satu bundel map berisi dokumen. Diduga bundel dokumen itu terkait

“Jangan sampai ada pihak-pihak yang tidak kooperatif maupun ada upaya untuk penghilangan barang bukti,” ujarnya.

Keesokan harinya Budi mengakui memang ada dugaan penghilangan barang bukti dalam penggeledahan kantor perusahaan swasta yang berlokasi di Jalan Otto Iskandardinata (Otista), Jatinegara, Jakarta Timur itu. “Dalam penggeledahan yang dilakukan di kantor biro perjalanan haji MT, yang berlokasi di wilayah Jakarta, penyidik menemukan petunjuk awal adanya dugaan penghilangan barang bukti,” kata Budi Prasetyo kepada wartawan, Jumat, 15 Agustus 2025.

Selanjutnya KPK mengevaluasi segera temuan lapangan dalam penggeledahan

tiga orang bepergian ke luar negeri sejak 11 Agustus 2025 hingga 11 Februari 2026. Ketiga orang itu adalah mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (YCQ), mantan Staf Khusus Menteri Agama Bidang Ukhuwah Islamiyah, Hubungan Organisasi Kemasyarakatan dan Sosial Keagamaan, serta Moderasi Beragama Isfah Abidal Aziz (IAA), dan pengusaha travel Fuad Hasan Masyhur

KPK pun akan memanggil Fuad untuk menjalani pemeriksaan. “Tentunya nanti akan dilakukan pemanggilan, dilakukan pemeriksaan, terlebih dalam perkara ini KPK juga sudah melakukan cegah ke luar negeri ya kepada pihak-pihak terkait yang memang dibutuhkan keberadaannya un-



penyidikan kasus penyalahgunaan pembagian kuota haji.

Pengeledahan berlangsung lebih dari dua jam. Sebanyak 13 anggota tim KPK bersama tiga petugas kepolisian akhirnya meninggalkan lokasi menggunakan lima mobil menuju Gedung KPK di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Seiring dengan penggeledahan, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengemukakan, agar pihak-pihak terkait bersikap kooperatif selama proses penggeledahan. Ia menegaskan, penggeledahan merupakan bagian dari penyidikan untuk mencari petunjuk dan bukti yang dibutuhkan penyidik dalam menangkap perkara ini.

Maktour tadu. Alhasil, KPK menegaskan akan menjerat pihak yang menghilangkan barang bukti dengan pasal perintangan penyidikan.

“Atas tindakan tersebut, KPK kemudian melakukan evaluasi dan tentunya penyidik tidak segan untuk mempertimbangkan penerapan Pasal 21 obstruction of justice terhadap pihak swasta yang berupaya merintang, menghalangi, salah satunya termasuk menghilangkan barang bukti dalam perkara haji ini,” ujarnya.

Kasus korupsi kuota haji ini memang melibatkan pendiri sekaligus petinggi Maktour, Fuad Hasan Masyhur. Sebagai bagian dari penyidikan, KPK mencegah

tuk tetap di Indonesia. Sehingga kepada para pihak tersebut bisa mengikuti proses penyidikan ini secara baik, secara lancar sehingga proses penyidikannya pun bisa berjalan secara efektif,” kata Jubir KPK Budi Prasetyo

Kasus ini mulai diusut KPK pada Sabtu, 9 Agustus 2025, sehari setelah lembaga itu memeriksa mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut pada Kamis, 7 Agustus 2025. KPK juga mengundang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung kerugian keuangan negara. Hasil penghitungan awal per 11 Agustus 2025 menunjukkan potensi kerugian lebih dari Rp 1 triliun.

Kemudian KPK menaikkan penyelidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024 ke tahap penyidikan. "KPK telah menaikkan status penyelidikan terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023 sampai dengan 2024 ke tahap penyidikan," ujar Plt Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Asep mengemukakan, KPK telah men-

han sebesar 20 ribu seharusnya diterapkan sesuai undang-undang. Ia menyinggung Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 yang mengatur tentang kuota haji. Dalam pasal tersebut disebutkan kuota haji khusus adalah delapan persen dan kuota haji reguler 92 persen.

"Nah, seharusnya yang 20.000 tadi, kuota tambahan itu, juga ikut dengan pembagian tadi, dengan aturan yang ada di perundang-undangan, yang 92 persen (reguler) dengan 8 persen (khusus). Teta-

gitu," kata Asep.

Nah, KPK ternyata menemukan fakta pejabat Kementerian Agama pernah bertemu sejumlah pengusaha perjalanan haji, tak lama usai kuota tambahan terbit. Yaqut tidak hadir dalam pertemuan tersebut, kata Asep. Namun selaku pejabat tertinggi di Kementerian Agama, dia dipanggil sebagai saksi oleh KPK, 7 Agustus 2025.

Namun, Yaqut menolak berbicara soal materi pemeriksaan. Toh ia menegaskan bersedia kooperatif dan mematuhi proses hukum yang berlangsung di KPK. Empat hari usai diperiksa sebagai saksi, KPK menerbitkan surat yang mencegah Yaqut berpergian keluar negeri.

Dalam konstruksi perkara, berdasarkan Surat Keputusan yang ditandatangani Yaqut Cholil Qoumas selaku Menteri Agama pada 15 Januari 2024, pembagian kuota tambahan haji sebanyak 20.000 dari Pemerintah Arab Saudi dibagi rata: 50 persen untuk kuota haji khusus dan 50 persen untuk kuota haji reguler di Indonesia.

Secara rinci, kuota tambahan haji khusus sebanyak 10.000 terdiri dari 9.222 untuk jemaah dan 778 untuk petugas haji khusus. Sementara itu, kuota tambahan haji reguler sebanyak 10.000 orang dibagikan ke 34 provinsi. Provinsi penerima kuota terbanyak adalah Jawa Timur (2.118 orang), Jawa Tengah (1.682 orang), dan Jawa Barat (1.478 orang). Provinsi lainnya menerima antara puluhan hingga ratusan kuota.

Pembagian tersebut diduga melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang mengatur porsi kuota haji khusus maksimal 8 persen dan kuota haji reguler sebesar 92 persen, bukan 50:50.

Pada akhir Juli hingga awal Agustus 2025 sejumlah pejabat dan mantan pejabat di internal Kementerian Agama serta agen perjalanan haji dan umrah sudah dimintai keterangannya oleh KPK. Tercatat antara lain, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief, serta pegawai Kementerian Agama berinisial RFA, MAS, dan AM. Kemudian Pendakwah Khalid Basalamah, Eks Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (DPP AMPHURI) Muhammad Farid Aljawi dan Ketua Umum Kesatuan Travel Haji Umrah Indonesia (Kesthuri) Asrul Aziz.

Sedangkan pada pertengahan Agustus 2025, KPK menggeledah sejumlah



emukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi dalam perkara ini. "Dalam penyelidikan perkara ini, KPK menerbitkan sprindik (Surat Perintah Penyidikan) umum dengan penerapan Pasal 2 ayat 1 dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," tambahnya.

Menurut keterangan Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (6/8/2025), pembagian kuota haji tamba-

pi kemudian ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu," ungkapnya.

Asep mengatakan yang terjadi justru kuota tambahan itu dibagi dua, 10.000 untuk reguler dan 10.000 lagi untuk kuota khusus. Oleh sebab itu KPK harus menemukan alat bukti yang mendukung bagaimana penyimpangan dari aturan itu terjadi.

"Apakah kebijakan ini bottom-up (dari bawah) atau top-down (dari atas) atau memang dua-duanya, ketemu di frekuensi yang sama, bahwa dari bawah inginnya begitu, yang dari atas juga inginnya be-

tempat dalam rangka penyidikan kasus korupsi kuota haji pada 2024. "Hari ini (Rabu), tim sedang lakukan giat penggeledahan di Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Dalam penggeledahan itu, sambung Budi, KPK menyita dokumen dan barang bukti elektronik. Jubir KPK ini mengapresiasi dan berterima kasih kepada pihak Kemenag yang selama proses penggeledahan turut membantu dan kooperatif.

Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2025.

Menurut dia, asosiasi agensi perjalanan haji memang terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. "Ada dua atau tiga asosiasi kalau tidak salah. Dua ya, kalau tidak salah," ujarnya.

Menurut Asep, asosiasi tersebut terlibat karena agensi perjalanan haji yang menjadi anggotanya berkomunikasi dengan pejabat di Kemenag untuk mengatur pembagian 20.000 kuota haji tambahan menjadi sama-sama 50 persen. "Pembagiannya melalui asosiasi ini. Jadi, semua asosiasi kemudian membagi-bagikan ke-

lain-lain, itu juga mempengaruhi harga," katanya.

Karena itu biaya komitmen kontrak tadi berbeda-beda. "Ada 2.600 sampai dengan 7.000 dolar AS," ujar Asep.

Nah, masih terkait dengan penyidikan, KPK mengajak jamaah haji tahun 1445 hijriah atau 2024 masehi untuk menjadi saksi kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. "Kami juga membutuhkan keterangan dari para saksi kalau berkenan," ujar Asep.

Menurut Asep salah satu kriteria jamaah haji yang dapat menjadi saksi untuk penyidikan kasus tersebut adalah yang mendaf-



Pada hari yang sama, penggeledahan lainnya berlangsung di Kota Depok, Jawa Barat dan menyita sejumlah aset serta properti. "Dari penggeledahan rumah pihak terkait yang berlokasi di Depok, diamankan satu unit kendaraan roda empat, serta beberapa aset," ujar Jubir KPK ini.

Sedangkan Asep Guntur mengungkapkan, biaya komitmen atau biaya untuk mengikat perjanjian/kontrak di kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 mencapai 7.000 dolar Amerika Serikat. "Kira-kira kisarannya yang per kuota ya, antara 2.600 sampai dengan 7.000 dolar AS," ujar Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di

pada seluruh travel," katanya.

Walaupun demikian, dia mengatakan asosiasi tidak membagikan kuota haji khusus tersebut sama rata. "Ada yang dapat banyak, dan ada yang dapat sedikit. Tergantung daripada besar kecilnya travel itu," ujarnya.

Selain itu, Asep menjelaskan biaya yang diduga disetorkan agensi perjalanan haji untuk mendapatkan kuota haji khusus pun berbeda-beda karena tergantung penjualan hingga rekam jejak.

"Kalau travel-travel yang sudah besar biasanya dengan layanan yang mungkin lebih bagus dan lain-lain. Tempat juga kan biasanya memengaruhi, misalkan ada yang di seputar Masjidil Haram gitu kan, ada yang jaraknya sekian kilometer dan

tar untuk haji khusus, tetapi mendapatkan pelayanan haji reguler. "Ataupun jamaah haji furoda yang tidak sesuai, kemudian mendapatkan pelayanan haji khusus atau haji reguler, bisa memberikan keterangan kepada kami," katanya.

Ia mengatakan para jamaah yang sesuai kriteria tersebut bila berkenan menjadi saksi, maka dapat mempercepat KPK dalam menangani perkara tersebut. Terlebih, kata dia, KPK mendapatkan informasi adanya jamaah haji furoda menjadi haji khusus, dan haji khusus menjadi reguler pada tahun penyelenggaraan haji tersebut.

Ringkasnya, dari penyelidikan naik menjadi penyidikan. Tahap selanjutnya adalah penetapan tersangka perkara korupsi kuota haji. Simak saja pada saatnya. ♦

# PENGGEELEDAHAN HINGGA KEDIAMAN PRIBADI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menetapkan tersangka korupsi kuota haji 2023-2024. Jadi, yang mencolok adalah upaya penggeledahan untuk menemukan dokumen terkait kebijakan pembagian kuota haji. Tak urung penggeledahan juga menjangkau kediaman pribadi.

Penggeledahan di kantor perusahaan penyelenggara perjalanan haji dan umrah Maktour mengindikasikan upaya menghilangkan barang bukti. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bukti yang dihilangkan itu berupa dokumen. "Dokumen yang diduga terkait dengan perkara," ujarnya Minggu, 17 Agustus 2025.

Penggeledahan kantor Maktour berlangsung pada Kamis, 14 Agustus 2025. Hasilnya, KPK menemukan upaya menghilangkan dokumen yang dapat menjadi barang bukti. Maka keesokan harinya, Jumat, 15 Agustus 2025, pencarian dokumen pun berlanjut hingga menasar kediaman bekas Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas di kawasan Condet, Jakarta Timur.

Dalam penggeledahan di kediaman Yaqut, KPK menyita sejumlah dokumen, juga barang bukti elektronik (BBE). Budi Prasetyo menjelaskan, BBE yang disita dari rumah Yaqut akan diekstraksi untuk

melihat informasi dalam BBE tersebut. Dia mengatakan KPK masih menelusuri berbagai informasi untuk mengusut perkara ini.

Budi menambahkan, barang bukti elektronik yang disita beragam jenisnya. Salah satunya berupa telepon genggam yang diduga menyimpan data penting terkait perkara. "Barang Bukti Elektronik itu macam-macam, salah satunya adalah handphone, nanti itu akan diekstraksi, dibuka isinya, kita akan lihat informasi-informasi yang dicari," jelasnya.

Jubir KPK ini mengungkapkan pula Yaqut Cholil Qoumas bersikap kooperatif saat digeledah. "Kooperatif ya," kata Budi.

Menurut dia, KPK menggeledah rumah mantan menteri untuk mencari petunjuk yang dibutuhkan penyidik, sekaligus optimalisasi pemulihan kerugian keuangan negara. Toh hingga penggeledahan di beberapa tempat terkait tiga orang yang sudah dicekal dalam penyidikan KPK belum juga berujung pada penetapan ter-



sangka.

"Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2025, KPK telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang Larangan Bepergian Ke Luar Negeri terhadap 3 (tiga) orang, yaitu YCQ, IAA, dan FHM terkait dengan perkara sebagaimana tersebut di atas," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengenai pencegahan Yaqut dan 2 orang lainnya kepada wartawan, Selasa, 12 Agustus 2025.

Pencegahan terhadap Yaqut dan dua orang lainnya berjangka waktu enam bulan. Budi menyatakan, pencegahan dilakukan karena yang bersangkutan diperlukan berada di Indonesia jika sewaktu-waktu tim penyidik memerlukan keterangannya. Dua orang lainnya Ishfah Abidal Aziz (IAA) yang merupakan staf khusus Yaqut ketika menjabat Menteri Agama dan Fuad Hasan Masyhur (FHM), Bos Maktour.

Mengenai penetapan tersangka, Ketua KPK Setyo Budiyanto pun angkat bicara. "Ya, pasti kalau target, harapannya kan as soon as possible (secepatnya, red.)," ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025.

Meski begitu, Setyo mengatakan pengumuman tersangka tersebut bergantung pada hasil pemeriksaan. Selain pemeriksaan, sambung Setyo, peneta-

pan maupun pengumuman tersangka juga memerlukan penelaahan sejumlah dokumen maupun barang bukti yang relevan dengan perkara kuota haji.

Tambahan pula, KPK pun memerlukan kerja sama dengan lembaga lain untuk menentukan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur korupsi. Terkait ini Setyo mengatakan KPK segera meminta hasil audit keuangan penyelengga-



**Barang Bukti Elektronik itu macam-macam, salah satunya adalah handphone, nanti itu akan diekstraksi, dibuka isinya, kita akan lihat informasi-informasi yang dicari.**

raan haji kepada auditor negara.

"Nah, dari situlah nanti dipastikan bahwa ada kerugian keuangan negara. Untuk memperkuat persangkaan terhadap para tersangka," ujarnya.

la mengungkapkan pula KPK pun menelusuri rekening terkait kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 ini. "Itu pasti dilakukan koordinasi dengan pihak PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan)," ujar Setyo

Menurut dia, hasil kerja sama dengan PPATK itu berupa dokumen mengenai penelusuran rekening terkait kasus tersebut. "Nanti dari PPATK hasilnya terbit, muncul penjelasan di dokumen tersebut, maka bisa dipastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Masih ada proses," katanya.

Langkah-langkah yang dilakukan KPK itu, sambungnya, merupakan hal yang biasa dilakukan dalam penyidikan sebuah perkara. "Hal yang biasa dilakukan oleh penyidik. Jadi, penelusuran pendalaman terhadap para tersangka, kemudian saksi, termasuk juga dokumen, dan termasuk juga hal-hal yang berkaitan dengan rekening," ujarnya.

Terkait dokumen yang dicari-cari, para pegiat di Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) sudah menyerahkan salinan Surat Keputusan (SK) Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 mengenai kuota haji tambahan ke KPK untuk mendukung





proses hukum dugaan korupsi di Kementerian Agama.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengemukakan, SK tersebut sulit ditemukan, padahal sangat penting karena menjadi dasar pembagian kuota haji khusus yang pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan ketentuan. "SK ini sulit dilacak keberadaannya, bahkan Pansus

Haji DPR 2024 gagal mendapatkannya," kata Boyamin, Senin, 11 Agustus 2025

Boyamin mengatakan SK tersebut diduga melanggar banyak ketentuan. Misalnya, Undang-undang Penyelenggaraan Haji yang mengatur kuota haji khusus hanya 8 persen dan reguler 92 persen. Pengaturan kuota haji, kata dia, semestinya berbentuk Peraturan Menteri

Agama yang masuk dalam lembaran negara setelah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM.

"Jadi, jelas pelanggaran jika pengaturan kuota haji hanya berbentuk Surat Keputusan Menteri Agama yang tidak perlu ditayang dalam lembaran negara dan tidak perlu persetujuan Menkumham (Pasal 9 Ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019," ungkap Boyamin.

Ia pun menduga SK tersebut disusun empat orang secara tergesa-gesa. Empat orang itu adalah AD yang ketika itu merupakan staf khusus Menteri Agama; FL (saat itu pejabat eselon I di Kementerian Agama); NS (saat itu pejabat eselon II di Kementerian Agama); dan HD (pegawai setingkat eselon IV di Kementerian Agama).

Dia mengungkapkan dugaan penyimpangan yang paling utama dalam dugaan korupsi haji adalah dugaan pungutan liar terhadap calon jemaah haji khusus kuota haji tambahan sebesar Rp75.000.000 (se-



## **SK ini sulit dilacak keberadaannya, bahkan Pansus Haji DPR 2024 gagal mendapatkannya.**

tara 5.000 dolar Amerika Serikat).

Jika kuota tambahan adalah 9.222 dikali Rp75 juta, maka dugaan nilai pungutan liar sebesar Rp691 miliar. "Kuota haji khusus tambahan 10.000 dikurangi petugas haji 778, maka diperoleh jumlah haji khusus adalah 9.222 orang," kata Boyamin menjelaskan.

Menurut dia, dugaan penyimpangan terjadi dugaan mark up atau kemahalan dari catering makanan dan penginapan hotel yang nilai kerugiannya belum bisa ditentukan dan menjadi tugas DPR untuk menyelidikinya.

"Kami mendesak KPK untuk melacak aliran uang dan dalam rangka memaksimalkan uang pengganti serta untuk efek jera maka wajib bagi KPK untuk menerapkan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang," ujarnya.

MAKI menilai dugaan pungli menunjukkan adanya mens rea atau niat jahat dari pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan situasi untuk meraih keuntungan pribadi. Penambahan kuota secara tidak proporsional juga menjadi indikasi kuat adanya permainan oknum.

"Jadi ada dugaan mens rea, karena kenapa ditambah sampai 10.000 atau 50 persen dari kuota tambahan itu, karena diduga ada oknum-oknum yang nakal yang hendak mengambil keuntungan," ucapnya.

Berkaitan dengan dokumen yang diserahkan kepada KPK dan analisis fakta hukum tadi, MAKI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) tahun 2023-2024.

Menanggapi wacana penetapan tersangka, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menjelaskan alasan lembaganya menaikkan status kasus dugaan korupsi kuota haji ke tahap penyidikan meski belum menetapkan tersangka. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bagian dari prosedur hukum untuk mencari bukti dan mengungkap pelaku secara jelas.

"Penyidikan umum dilakukan karena KUHAP menyatakan bahwa serangkaian tindakan penyidik bertujuan untuk mencari dan menemukan bukti. Dari bukti itu akan menjadi terang siapa pelakunya," kata Johanis, Senin, 11 Agustus 2025.

Ia menjelaskan, dalam proses penyidikan umum, penyidik berwenang melakukan penyitaan, memanggil pihak terkait untuk dimintai keterangan, hingga menggunakan upaya paksa jika pihak yang dipanggil tidak hadir. Bukti yang dikumpulkan, sambungnya, dapat berupa keterangan saksi, surat, keterangan ahli, maupun bukti petunjuk.

"Ketika semua itu terang dan jelas siapa pelakunya, barulah kami menetapkan tersangka dan menerbitkan surat keputusan penetapan tersangka. Kami tidak asal-asalan, semua langkah harus berdasarkan bukti kuat," ujarnya.

Sedangkan Pelaksana Tugas Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengatakan kasus ini ditangani menggunakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) umum, sehingga tersangka belum ditetapkan saat Sprindik diterbitkan. "Pihak yang bertanggung jawab akan dicari selama proses penyidikan berlangsung," ujarnya.

KPK, kata Asep, menerbitkan Sprindik umum dengan pengenaan Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Ia mengatakan tidak ingin terburu-buru menetapkan tersangka. Dengan menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum, penyidik memiliki kele-

luasaan mengumpulkan alat bukti dan informasi secara lebih komprehensif.

"Kami masih ingin mendalami beberapa peran dari beberapa pihak. Dengan sprindik umum ini, kami lebih leluasa untuk mengumpulkan bukti juga mengumpulkan informasi," kata Asep.

Asep menjelaskan, pada tahap penyelidikan, KPK memiliki keterbatasan kewenangan karena belum bisa melakukan upaya paksa seperti penggeledahan dan

nyidik," ujarnya

Toh ia memastikan Yaqut akan dipanggil oleh penyidik KPK sebagai kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. Terlebih, kata Setyo, kediaman Yaqut sudah digeledah penyidik KPK pada 15 Agustus 2025.

"Nanti akan dilakukan konfirmasi atau kegiatan lanjutan terhadap para pihak



penyitaan. Hal itu membuat pihaknya memutuskan untuk mengumpulkan bukti lebih banyak sebelum menentukan tersangka.

Alhasil, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengemukakan menyerahkan tindak lanjut kepada para penyidik lembaga antirasuah itu. "Pimpinan tentunya tidak akan mengatur masalah hal yang sifatnya teknis, seperti waktu penyidikan, hari, hingga jam. Semua itu menjadi ranah pe-

yang lokasinya dilakukan penggeledahan," ungkapnya.

Satu hal lagi, soal uang tunai yang disita dari penggeledahan rumah Yaqut. Setyo hanya memastikan terdapat sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. "Ya ada juga barang-barang lain-lain. Itu pasti ada, tetapi detail spesifikasinya itu ada di Deputy Penindakan dan Eksekusi, atau Direktur Penyidikan. Silakan dikonfirmasi saja," tandasnya. ♦

# JALAN PANJANG TERBENTANG

Bagaimana kelanjutan penyidikan perkara pembagian kuota haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi? Masih panjang prosesnya.

Selama belum ada penetapan dan pengumuman tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih baik menjauhi spekulasi. Meskipun KPK sudah mencekal tiga orang untuk bepergian ke luar negeri dalam penyidikan perkara kuota haji, lembaga antikorupsi itu pernah mengemukakan cekal belum tentu berarti akan menjadi tersangka.

Namun, sama halnya, yang tercekal pun belum tentu tak bakal menjadi tersangka. Selanjutnya, jika sudah ada penetapan tersangka, masih terbuka kemungkinan tambahan tersangka lainnya.

"Pencegahan itu bukan juga berarti dia potential suspect (tersangka poten-

pencekal adalah KPK mengkhawatirkan yang bersangkutan tidak berada di tempat atau Indonesia saat diperlukan untuk dimintai keterangan. "Kami lihat kemampuannya nih, kemampuan orang itu untuk pergi meninggalkan Indonesia. Nah ini kan pencegahan yang dicegah ke luar Indonesia. Itu sangat besar," sambungnya.

Ia juga menjelaskan pencekalan di kasus kuota haji dilakukan karena yang bersangkutan dinilai memiliki informasi yang signifikan (bermanfaat), dan mewakili agensi perjalanan haji hingga asosiasinya.

Mengenai asosiasi penyelenggara haji, Asep Guntur sudah menyebutkan



sial) ya, melainkan orang-orang yang memang menurut kami, penyidik, itu memiliki kaitan yang erat dengan perkara yang sedang kami tangani," ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa, 12 Agustus 2025

Selain itu, Asep menjelaskan alasan

dua hingga tiga asosiasi terlibat dalam kasus dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024. "Ada dua atau tiga asosiasi kalau tidak salah. Dua ya, kalau tidak salah," ujarnya.

Asosiasi berarti memiliki anggota. Asep Guntur menduga, lebih dari 100

agen travel yang terlibat dalam pembagian kuota tambahan. "Pembagiannya banyak tuh. Mungkin kalau travel-travel yang besar dapatnya lebih besar, lebih banyak gitu ya. Kuotanya dari tadi yang 10.000 itu. Kalau travel yang kecil ya kebagian 10 atau dibuat 10, seperti itu," ujar Asep.

Nah, di antara lebih dari 100 agen travel itu, diduga ada 10 agen travel besar yang terlibat dalam penentuan kuota haji 2024. KPK, kata Asep, mendapatkan informasi tersebut setelah lembaganya melakukan ekspose atau gelar perkara.

"Ekspose ini digambarkan terkait travel-travel itu. Yang kelihatan yang 10 besar kan gitu. Kemudian yang banyak ini sangat banyak tadi," ujar Asep.

la menambahkan, agen-agen travel itu mendapatkan kuota haji dengan jumlah yang beragam, tergantung seberapa

suri informasinya," ujar Asep.

Siapa pemberi perintah penerbitan SK Nomor 130? Asep mengemukakan, KPK masih memburu sosok pemberi perintah itu. "Ada yang menyusun SK itu, kemudian istilahnya disodorkanlah kepada yang bersangkutan untuk ditandatangani. Nah, ini yang sedang kami dalam," ucap Asep

SK Menteri Agama Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kuota Haji Tambahan Tahun 1445 Hijriah/2024 Masehi memang menjadi salah satu bukti kasus dugaan korupsi terkait kuota haji. "Itu menjadi salah satu bukti," ujar Asep.

Asep mengatakan SK yang ditandatangani mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas pada 15 Januari 2024, menjadi salah satu dari sejumlah bukti kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota

kuota apakah memang merancang SK itu sendiri atau SK itu sudah jadi," katanya.

Berdasarkan SK Menag Nomor 130 Tahun 2024, kuota haji tambahan sejumlah 20.000 orang dibagi menjadi 10.000 kuota haji reguler, dan 10.000 kuota haji khusus. Sedangkan mengacu Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah disebutkan kuota haji khusus adalah delapan persen dan kuota haji reguler 92 persen.

"Nah, seharusnya yang 20.000 tadi, kuota tambahan itu, juga ikut dengan pembagian tadi, dengan aturan yang ada di perundang-undangan, yang 92 persen (reguler) dengan 8 persen (khusus). Tetapi kemudian ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu," unta-



besar perusahaan travel tersebut. KPK pun mendalami alur pembagian kuota haji 2024. Mulai dari pemberi perintah, penerbitan Surat Keputusan (SK) Nomor 130 Tahun 2024 hingga aliran dananya.

"Kemudian ada aliran dana yang sedang kita cari. Jadi, dari sana, kan sudah dibagi nih sejumlah kuota. Nah, imbal-baliknya apa? Ini yang sedang kita telu-

dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024.

Toh, dia mengatakan bahwa KPK masih mencari bukti-bukti lain yang menguatkan dugaan tindak pidana korupsi pada kasus tersebut. "Kami juga akan memperdalam bagaimana proses dari SK itu terbit, karena umumnya pada jabatan setingkat menteri, yang bersang-

panya.

Asep mengatakan yang terjadi justru kuota tambahan itu dibagi dua, 10.000 untuk reguler dan 10.000 lagi untuk kuota khusus. Oleh sebab itu KPK harus menemukan alat bukti yang mendukung bagaimana penyimpangan dari aturan itu terjadi.

"Apakah kebijakan ini bottom-up (dari

bawah) atau top-down (dari atas) atau memang dua-duanya, ketemu di frekuensi yang sama, bahwa dari bawah inginnya begitu, yang dari atas juga inginnya begitu,” kata Asep.

Sedangkan dalam pandangan praktisi hukum Mellisa Anggraini, pembagian kuota tambahan menjadi 10.000 untuk reguler dan 10.000 lagi untuk kuota khusus sesuai belaka dengan pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, yakni Pasal 9.

“Di sana ada ruang diskresi untuk menteri agama bisa menentukan kuota, ada juga administrasi negara Undang-

memungkinkan.

“Selebihnya kenapa tidak akan pernah bisa diserap oleh jemaah Indonesia? Pertama sudah over capacity di zona 3 dan zona 4 itu sampai diberlakukan skema murur-tanazul, ditambah lagi kasus yang tadinya seukuran 0,9 jadi dipepetin jadi 0,8 meter per orang dari yang tadinya cukup nyaman menjadi tidak cukup nyaman,” ujarnya.

“Kalau dipaksakan lagi ya bahaya dong keselamatan jemaah, nah pada saat simulasi itulah komunikasi Kemenag dengan Saudi Saudi menawarkan, ada yang masih cukup tempatnya di zona

mengurangi antrean jemaah terkurangi kok, karena 10 ribunya kan terpakai 10.000,” ucapnya.

Sedangkan Wakil Ketua Umum MUI yang juga Naib (Wakil) Amirul Haji 2024, Anwar Abbas, menekankan pentingnya analisis matematis dalam mengurai dan mengevaluasi permasalahan haji 2024, khususnya terkait kepadatan di Mina yang bertalian dengan kenyamanan jemaah haji. Buya Anwar meminta semua pihak menyoroti persoalan kuota haji tambahan dengan komprehensif, terutama keterbatasan luas area Mina yang tidak sebanding dengan peningkatan



undang Nomor 30 Tahun 2014, diskresi itu bisa dibuat gitu kan sepanjang ada dasar-dasar dan alasannya gitu,” kata Mellisa, Kamis, 14 Agustus 2025.

“Dasarnya apa? Pertama, aturan itu tidak lengkap atau sudah tidak sesuai dengan situasi. Kedua, ada kepentingan umum di situ, ada keselamatan jemaah kuota itu,” ujarnya.

Dia menjelaskan, Arab Saudi memberikan kuota tambahan tapi tidak menambah space bagi jemaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Akan hal itu, dia menilai pembagian antara haji reguler dan haji khusus sebesar 92 persen banding delapan persen tidak

1 dan zona 2 zona 1, zona 2 harganya mahal Rp200 juta, haji kita saja, untuk haji reguler disubsidi oleh negara Rp30 jutaan ya kan, bagaimana kalau satu orang, mereka harus bayar lagi untuk kelebihan harga di zona 1, zona 2 tentu tidak masuk dong di biaya haji reguler,” kata Mellisa.

Menurut dia, pembagian kuota masing-masing 50 persen bagi haji reguler dan khusus bermaksud meningkatkan penyerapan kuota tambahan yang didapatkan. Dia menyatakan, tujuan awal pembagian kuota masing-masing 10.000 itu untuk memangkas antrean haji. “Jadi kalau dibilang ini kan tujuannya untuk

kuota jemaah haji Indonesia tahun 2024.

“Dengan luas Mina 172.000 meter persegi maka space atau ruang yang tersedia hanya 80 cm persegi per jemaah, ini sempit sekali. Yang paling menyedihkan persoalan toilet atau kamar mandi, sangat mengular sekali panjangnya,” ujar Anwar Abbas, Jumat, 15 Agustus 2025.

Pada penyelenggaraan haji 2024, Indonesia mendapat kuota 221 ribu ditambah penambahan 20 ribu, sehingga totalnya menjadi 241 ribu orang. Ia tidak bisa membayangkan jika pada 2024 kuota haji tambahan dengan skema sebesar 92 persen reguler dan delapan persen khusus diterapkan. Maka keadaan di

Mina akan makin padat.

Oleh karena itu, Buya Anwar mengatakan jika sejumlah pihak mengkritik penyelenggaraan haji 2024, utamanya perihal penambahan kuota haji, menurut dia tidak berdasar dan tidak mengetahui kondisi riil di lapangan. "Sekali lagi, penyebab kepadatan adalah ruang terbatas, sementara kuota terus bertambah. Makanya solusinya sudah saya usulkan pembangunan ruang vertikal di Mina, karena perluasan horizontal sulit dilakukan," katanya.

Sebelumnya, Juru Bicara Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Anna Hasbie menjelaskan kuota haji di Indonesia terbagi dua yakni kuota tetap dan kuota tambahan haji Indonesia. Menurut dia, kuota haji tetap didasarkan pada kesepakatan negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yaitu jatah 1 kuota untuk 1.000 penduduk muslim.



## Pembagian dilakukan secara transparan, banyak pihak ikut membantu kami memutuskan masalah ini dan ikut melakukan simulasi secara langsung untuk mengecek kesiapan di lapangan.

"Atas aturan OKI tersebut maka Indonesia mendapat kuota tetap sebesar 221.000 jamaah per tahun," kata Anna dalam keterangannya, Kamis, 7 Agustus 2025.

Anna mencatat, kuota tetap itu kemudian dibagi berdasarkan Pasal 8 dan 9 UU Nomor 8/2019 menjadi dua, kuota haji regular dan kuota haji khusus. Selanjutnya, melalui pasal 64 ayat (2) UU nomor 8/2019, kuota haji khusus ditetapkan 8 persen dari kuota haji Indonesia.

"Itu sebabnya kuota haji Indonesia atau kuota tetap itu 92 persen untuk jamaah haji regular atau sebanyak 203.320 dan 8 persen untuk haji khusus atau setara 17.680," jelas Anna.

Anna menambahkan, kuota tambahan diatur dalam Pasal 9 UU no 8/2019, berbunyi (1) dalam hal terdapat penambahan kuota haji Indonesia setelah Yaqut menetapkan kuota haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan

Peraturan Menteri.

"Bisa disimpulkan pembagian kuota tambahan tidak harus mengikuti aturan 92 berbanding 8, melainkan diskresi Menag yang harus mempertimbangkan ketersediaan dana manfaat (BPKH) juga ketersediaan layanan dalam dan luar negeri (proses pemvisaan, pesawat, akomodasi, ketersediaan tenda di Arafah dan Mina, termasuk petugas)," jelas Anna.



Meski ada diskresi Menag, namun Anna memastikan kebijakan pembagian kuota haji tambahan untuk musim haji 2024 dilakukan secara transparan, adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Pembagian dilakukan secara transparan, banyak pihak ikut membantu kami memutuskan masalah ini dan ikut melakukan simulasi secara langsung untuk mengecek kesiapan di lapangan," klaim Anna.

Toh Asep Guntur sudah menegaskan

pembagian itu melanggar Undang-Undang. "Kami juga memanggil ahli untuk menjawabnya. Kami sudah konsultasi, dan kami juga sudah memanggil ahli, ahli hukum. Nah, ini kan yang tadi dibicarakan itu kan tafsiran yang bersangkutan," katanya, Rabu, 13 Agustus 2025.

Asep mengatakan, klaim dari kubu Yaqut itu sudah dianalisis pada tahap penyelidikan dengan bantuan ahli. Hasilnya, KPK meya-

kini bahwa keputusan pembagian kuota haji tambahan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. "Ada ahli yang akan kita panggil dan juga pada tahap penyelidikan sudah kita konsultasikan pasal-pasal tersebut. Termasuk juga pembagian dan lain-lainnya di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 ya," ucap Asep.

Jadi, Undang-Undang, argumen hukum, dan kenyataan di lapangan sudah terbentang panjang. Proses hukum di KPK pun akan demikian. ♦

# IBRAHIM

**GUNAWAN EFFENDI**

Ibrahim yang ini adalah seorang Presiden dengan pangkat terakhir kapten. Ya, Ibrahim Traore, Presiden Burkina Faso, sebuah negara di Afrika.

Ibrahim Traore menempuh pendidikan menengah di Bobo-Dioulasso sebelum melanjutkan studi geologi di Universitas Ouagadougou. Di universitas, ia aktif dalam Asosiasi Mahasiswa Muslim dan juga dikenal sebagai delegasi yang vokal membela teman-temannya.

Setelah menyelesaikan pendidikan dengan predikat cum laude, Traore bergabung dengan Angkatan Darat Burkina Faso pada tahun 2010 di usia 22 tahun dan menjalani pelatihan perwira di Akademi Militer Georges Namoano. Ia resmi menjadi Letnan Dua pada 2012 dan kemudian dipromosikan menjadi kapten pada 2020 atau 2023, menurut sumber yang berbeda.

Traore dikenal sebagai perwira yang aktif di garis depan melawan pemberontakan jihadis di Burkina Faso, khususnya di wilayah utara seperti kota Kaya. Ia diduga terkait dengan pasukan khusus "Cobra", unit kontrateroris yang dibentuk pada 2019, meskipun ada perdebatan apakah ia benar-benar bagian dari unit tersebut atau bertugas di resimen artileri.

Ia merupakan bagian dari kelompok perwira muda yang mendukung kudeta Januari 2022 yang membawa junta militer Gerakan Patriotik untuk Pengawasan dan Pemulihan ke tampuk kekuasaan.

Namun, ketidakpuasan terhadap Presiden sementara Paul-Henri Sandaogo Damiba atas kegagalannya menangani pemberontakan jihadis mendorong Traore dan kelompoknya melakukan kudeta kedua pada September 2022. Traore kemudian mengambil alih kepemimpinan junta tersebut sebagai kepala Gerakan Patriotik untuk Perlindungan dan Pemulihan.

Nah, pada Mei 2024, viral di media sosial surat Ibrahim untuk Paus Fransiskus dan juga balasannya. Baik surat Ibrahim maupun balasan Paus terindikasi hoaks, kabar bohong hasil rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence). Tak urung, sejak saat itu Ibrahim semakin dikenal di kalangan ekonomi politik global.

Toh tetap menjadi pertanyaan, apakah Ibrahim Traore merupakan pemimpin handal atau sekadar menjadi idola dalam jaringan (daring) internet? Banyak kisah menarik yang menyertainya. Misalnya, menggratiskan semua pendidikan – dari taman kanak-kanak hingga universitas – bagi warga Burkina Faso.

Kebijakan ini beriringan dengan kecenderungan umum sejak kudeta militer oleh Traoré pada 2022, yakni pembentukan kultus atau junjungan daring di sekitar sang pemimpin, mengagungkan strategi kepemimpinannya yang anti-imperialis dan anti-Prancis. Toh, terlepas dari banyaknya unggahan daring yang memuji keputusan tersebut, tam-

panya terdapat beberapa kontroversi mengenai kebenaran klaim tersebut.

Banyak unggahan yang ditemukan menggunakan gambar hasil rekayasa AI dan audio yang dimanipulasi dalam klaimnya, serta satu unggahan yang mengklaim menampilkan demonstrasi pro-junta anti-kolonial di ibu kota negara, Ouagadougou. Faktanya, unggahan-unggahan ini menggunakan gambar demonstrasi antikorupsi di Beograd, Serbia. Berbagai artikel investigasi di surat kabar Afrika tidak menemukan bukti bahwa pemerintah sendiri yang mengumumkan keputusan pendidikan tersebut. Meski begitu, tidak diragukan lagi bahwa pemimpin Burkina Faso telah membawa perubahan besar di negaranya, dan menikmati dukungan rakyat dari banyak pemuda Afrika di kawasan Sahel (zona semi-kering yang membentang di Afrika utara, antara Gurun Sahara di utara dan wilayah sabana Sudan di selatan). dan sekitarnya.

Salah satu strategi Traoré yang paling dipuji adalah upayanya mencapai kemandirian ekonomi bagi Burkina Faso. Hal ini termasuk hingar-bingar "pembebasan utang luar negeri" dalam berbagai artikel daring. Namun, sekali lagi, klaim ini telah mendapat sorotan tajam, karena baik pemeriksa fakta Reuters (Reuters Fact Check, 2025) maupun Voice of America (Mwambia, 2025) menemukan bahwa klaim tersebut dipalsukan.

Sang kapten juga tampaknya bertekad untuk meninggalkan Franc CFA, karena keterbatasan mata uang kolonial tersebut lebih besar daripada kemanfaatannya untuk tetap dipertahankan. Celah kelemahannya banyak dan jelas: Prancis masih memegang hak veto de facto atas dewan direksi bank sentral di Burkina Faso. Memang ada pembukaan bank negara independen pertama di Burkina Faso sebagaimana diumumkan oleh Traoré sendiri di X (Twitter), namun aktivitasnya masih harus menunggu perkembangan nyata.

Isu lainnya adalah proses nasionalisasi tambang emas di Burkina Faso. Komoditas emas – 12 persen dari total Produk Domestik Bruto negeri Ibrahim sangat penting bagi kelangsungan pemerintahan, sehingga mudah memahami perlunya dorongan untuk menga-



rahan keuntungan dari sumber daya negara ke kas negara. Emas secara historis telah mengambil proporsi yang sangat besar dari pasar ekspor Burkina Faso, dengan mudah menjadi salah satu dari sepuluh negara dengan pangsa emas tertinggi di dunia dalam portofolio ekspor mereka.

Keutamaan nasionalisasi tambang oleh Ibrahim Traoré jelas beralasan, dan sangat terkait dengan kedaulatan ekonomi negaranya. Ini juga merupakan janji yang tampaknya telah ditepatinya, dengan berbagai sumber mengonfirmasi pembelian tambang emas Boungou dan Wahgnion oleh negara Burkina Faso, termasuk pemilik sebelumnya, perusahaan Endeavour yang berbasis di London. Toh, seluruh kisah sumber daya di Burkina Faso terkait dengan strategi geopolitik lebih kompleks, karena grup Rusia Nordgold pada April 2024 mendapatkan izin pertambangan baru dari pemerintah Burkina Faso.

Toh semua perusahaan asing kini diwajibkan memberikan 15 persen saham kepada negara dalam operasi baru, serta melatih masyarakat Burkina Faso. Dalam hal kedaulatan sum-

ber daya murni, Traoré tampaknya memang bertujuan untuk mewujudkannya, dan berhasil melakukannya.

Nah, viralnya Ibrahim Traore juga menjangkau generasi muda di Indonesia. Maklum, ia adalah presiden termuda di dunia. Ibrahim lahir pada 14 Maret 1988.

Namun, tak perlu tergesa-gesa dan serta merta menyandingkan Burkina Faso dengan Indonesia yang sudah 80 tahun memproklamasikan kemerdekaan. Apalagi membandingkannya, bukanlah semudah menyimak informasi media daring.

Masih banyak yang memerlukan tindakan nyata di sekitar kita: meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membuka lapangan kerja, menekan angka pengangguran, mengatasi ketertinggalan di bidang teknologi maupun literasi keuangan. Jika dirinci malah akan lebih banyak lagi. Ringkasnya warga Indonesia maju dan sejahtera dari lahir hingga akhir hidupnya. Wallahul muwaffiq ilaa aqwamit thariq, dan semoga Allah menunjukkan jalan paling lempang. ♦





# MENGGALANG WAKAF PENDIDIKAN ISLAM

Wakaf sudah pasti penggalangan harta benda untuk kepentingan umum. Nah, Kementerian Agama meluncurkan gerakan wakaf untuk pendidikan.

**B**ahkan Kementerian Agama menjadikan Gerakan Wakaf Pendidikan Islam sebagai bagian dari implementasi Asta Protas (Program Prioritas) guna mendorong kemandirian dan pemberdayaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia.

Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan pendidikan Islam. Menurutnya, pembangunan sektor pendidikan tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran negara, tetapi juga partisipasi publik melalui instrumen syariah yang produktif.

"Gerakan Wakaf Pendidikan Islam ini menjadi langkah strategis dalam mewujudkan kemandirian madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam," ujar Menag Nasaruddin Umar di Jakarta, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Menag Nasaruddin mengatakan melalui gerakan ini Kemenag ingin memastikan pendidikan Islam tidak hanya

berkelanjutan, tetapi juga semakin maju dan memiliki daya saing tinggi.

Sedangkan Sekjen Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengemukakan gerakan wakaf produktif bisa menjadi solusi bagi peningkatan kesejahteraan dan upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Hal ini ditegaskan Kamaruddin Amin saat Launching Gerakan Wakaf Pendidikan Islam di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).

Menurut Kamaruddin, wakaf yang selama ini lebih dikenal sebatas pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas ibadah, harus ditransformasi menjadi wakaf produktif yang berdaya guna secara ekonomi. "Melalui tata kelola modern, digitalisasi, dan model investasi syariah yang aman, wakaf dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin," ucapnya.

"Melalui gerakan wakaf Pendidikan Islam ini, Kementerian Agama akan menggerakkan wakaf ke arah yang lebih

produktif, transparan, dan profesional. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf bisa menjadi penopang pembangunan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Inilah yang dimaksud Inpres, bagaimana dana umat hadir sebagai solusi nyata penghapusan kemiskinan ekstrem,” sambungnya.

Kamaruddin yang juga Ketua Badan Wakaf Indonesia menekankan pentingnya sinergi lintas lembaga. Ia menyebutkan bahwa Kementerian Agama akan memperkuat koordinasi dengan BWI, BAZNAS, lembaga zakat, lembaga filantropi Islam, serta dunia usaha agar pemanfaatan dana umat lebih terarah dan berdampak luas.

Sekjen Kemenag optimistis bahwa dengan adanya payung hukum Inpres Nomor 8 Tahun 2025, ekosistem pengelolaan dana umat akan semakin kuat dan terintegrasi. Hal ini sekaligus menjadi momentum untuk membuktikan bahwa instrumen ekonomi syariah dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional.

Gerakan tersebut diawali dari internal Kementerian Agama. Menag mengapresiasi sinergi yang terjalin antara dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di lingkungan Kemenag yakni Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Bimas Islam. “Alhamdulillah, telah terjadi sinergi yang baik antara dua Ditjen, sehingga pengelolaan dan penerima wakafnya menjadi lebih jelas,” kata Menag Nasaruddin Umar.

Kemenag berharap gerakan ini dapat menjadi model pemberdayaan wakaf produktif dalam mendukung sektor pendidikan dan menjadi inspirasi bagi lembaga lain untuk mengembangkan kemandirian melalui pendekatan berbasis syariah.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amin Suyitno menyampaikan gerakan ini dirancang sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat luas.

Ia menjelaskan wakaf pendidikan akan diarahkan pada pembangunan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM, serta pemberdayaan riset dan inovasi di lingkungan pendidikan Islam, termasuk juga PIP dan KIP kuliah.

“Potensi zakat sangat besar di pendidikan Islam. Ada jumlah waqif (orang yang berwakaf) yang besar di pendidikan Islam yang terdiri dari peserta didik, tenaga pendidikan (tendik) dan non-tendik,” ujar dia.

Selain itu, kata dia, ada 14 kampus Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang memiliki prodi manaje-

men zakat dan wakaf, sehingga potensi ini yang akan sangat membantu keberhasilan program wakaf untuk umat.

Menurut Suyitno, gerakan ini juga dalam rangka menjalankan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 Amanat untuk Kementerian Agama yakni mendorong peran badan pengumpul dana umat pengentasan kemiskinan.

Wakaf adalah penyerahan harta benda oleh seorang wakif (pemberi wakaf) untuk dimanfaatkan dalam jangka waktu tertentu atau selamanya demi kepentingan umum dan ibadah, sesuai dengan syariat Islam. Instrumen ini merupakan bentuk amal jariyah yang memiliki peran sosial dan ekonomi, membantu pembangunan bangsa dan kesejahteraan umat.

Secara Bahasa: Wakaf berasal dari bahasa Arab “waqf” yang berarti menahan atau berhenti. Menurut istilah, wakaf adalah menyerahkan sebagian

harta benda untuk dimanfaatkan secara terus-menerus atau dalam jangka waktu tertentu demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum sesuai syariat.

Sebagaimana pernah dikemukakan Menag Nasaruddin, keberhasilan pengelolaan wakaf di sejumlah negara menjadi bukti nyata bahwa instrumen ini dapat menjadi kekuatan besar dalam pembangunan sosial dan pendidikan. Ia mencontohkan Turki yang mampu membangun banyak sekolah dari dana wakaf, serta Yordania dan Kuwait yang menjadikan wakaf sebagai pilar utama pembangunan masyarakat.

“Yordan tahun kemarin mampu mengumpulkan zakat sekitar 20 miliar dinar. Tapi dari wakaf bisa mencapai 600 miliar dinar. Perbandingannya 20 banding 600,” ujar Menag pada Juli 2025

Maka wakaf pendidikan di Indonesia seharusnya menjadi instrumen kombinasi yang luar biasa. ♦



# KISAH PERJALANAN HIJRAH CELINE EVANGELISTA JADI MUALAF: PENUH TANTANGAN DAN TIDAK MULUS

Kisah hijrah artis dan model, Celine Evangelista menjadi seorang mualaf menjadi inspirasi bagi banyak orang. Aktris 33 tahun itu, akhirnya buka suara terkait perjalanan spiritualnya hingga mantap menjadi seorang mualaf dengan memeluk Islam dan mengenakan hijab. Awalnya, ia sempat menutupi keyakinannya dari publik, namun kini ia merasa siap membagikan cerita hidupnya.

Dalam sebuah podcast bersama Rian Ibram di kanal YouTube, Celine menyatakan bahwa keputusannya untuk mendalami ajaran Islam, bukanlah hal yang baru. Ia telah mulai belajar tentang Islam sejak tahun 2017.

Namun, ia memilih menjalani proses itu secara diam-diam, tanpa banyak publikasi.

"Aku sudah belajar sudah lama," kata Celine Evangelista, seperti dikutip dari YouTube Rian Ibram, beberapa waktu lalu

Setelah memutuskan menjadi mualaf, Celine mengaku ingin menjalani hidup sebagai muslimah seutuhnya, termasuk dalam hal menutup aurat. Namun di tengah proses spiritualnya ini, Celine

mengakui, adanya kekhawatiran dari orang-orang di sekitarnya, terutama terkait kemampuannya untuk tetap konsisten mengenakan pakaian tertutup.

Celine merasa niatnya tersebut, tidak sepenuhnya mendapat dukungan dari lingkungan terdekatnya. Celine malah menghadapi sejumlah tekanan dan pertentangan.

Namun ia menegaskan bahwa hijab yang ia pakai bukan sekadar penampilan, melainkan cerminan dari komitmen hatinya sebagai seorang muslimah.

"Dari lingkungan juga nggak semuanya mendukung. Ada pro dan kontra tetap. Tapi ini adalah keputusan untuk menjadi



pribadi yang lebih baik," tambah aktris kelahiran Roma, Italia, 2 April ini.

Celine menambahkan, bahwa ada pihak yang menyarankan agar dirinya tidak terburu-buru dalam menutup aurat dan lebih baik untuk fokus pada proses belajar (tentang Islam) terlebih dahulu.

"Mereka bilang 'janganlah tertutup, janganlah begini, udah biasa aja, udah belajar aja dulu,'" ungkapnyanya.

Namun, dalam hati terdalamnya, Celine merasa bahwa pilihan untuk berpakaian tertutup (berhijab) datang dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dorongan orang lain.

"Aku merasakan sendiri pakai pakaian yang tertutup membuat aku merasa nyaman aja, bukan ada yang menyuruh, bukan karena lingkungan juga," ujarnya terus terang.

Saat menjalankan ibadah umrah di Makkah, beberapa waktu lalu, Celine terlihat lengkap dengan hijab dan busana tertutup. Foto yang diunggahnya di akun pribadinya itu, langsung ramai menjadi perbincangan netizen yang memberi doa dan dukungan terhadap langkah spiritualnya tersebut.

Celine pun membagikan kisah menyentuh tentang prosesnya belajar Islam.

"Aku belajar Islam itu sudah lama. Awalnya cuma suka pakai hijab karena nyaman dan adem," kata Celine Evangelista, seperti dilansir dari lampost.co.

Celine juga mengaku, awalnya belum ingin menjadi muslim, karena ingin memperbaiki diri dulu sebelum memeluk agama barunya. Celine merasa menjadi pribadi yang lebih baik terlebih dahulu adalah langkah penting sebelum benar-benar berikrar sebagai muallaf.

"Aku malu karena dosa-dosaku. Tapi, aku belajar dari masa lalu dan semua jatuh bangun hidupku," tambahnyanya.

Aktris Sosok Ketiga itu, menitikkan air mata saat mengingat masa lalu dan rasa syukurnya atas kebaikan Allah yang diberikan pada dirinya.

"Allah terlalu baik padaku, padahal aku belum pantas. Jadi aku ingin terus memperbaiki diri," ungkap Celine.

Artis bernama panjang, Celine Evangelista Monica Maureen Ricci ini, juga mengungkapkan bahwa proses hijrah yang ia jalani penuh dengan tantangan dan tidak selalu mulus. Ia bahkan kerap kali dihantam rasa takut dan kekhawatiran akan membuat kesalahan dalam menjalani keyakinannya yang baru.

"Perjalanan hijrah aku ini sebenarnya banyak sekali pertentangannya. Banyak juga tekanan kayak jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Dalam proses ini aku takut

salah," imbunya jujur.

Meski menghadapi tekanan, Celine tetap berusaha teguh menjalani proses hijrahnya. Ia yakin bahwa perubahan yang ia pilih merupakan jalan terbaik baginya untuk menemukan ketenangan batin dan juga kedekatan dengan Yang Maha Kuasa.

#### Karier Meredup



Dan kini, dengan penampilannya dengan gaya baru, muncul kabar bahwa karier Celine di dunia hiburan mulai meredup. Celine pun langsung membantah anggapan bahwa kariernya di dunia hiburan meredup. Ia menyatakan bahwa tawaran kerja justru masih terus berdatangan, teru-

tama dari dunia perfilman. Hanya saja, kini ia lebih selektif dalam memilih peran, dan tentu harus disesuaikan dengan penampilan barunya ini.

"Alhamdulillah, sampai sekarang masih banyak tawaran. Tapi memang banyak yang aku tolak karena belum bisa lepas hijab untuk peran tertentu. Aku percaya Allah akan ganti dengan rezeki yang lebih

baik," ujar Celine Enagelista, seperti dilansir dari fajar.co.id.

Lebih lanjut, Celine menyampaikan bahwa saat ini dirinya sedang membangun bisnis travel umrah. Ia berharap usaha barunya tersebut menjadi ladang amal dan jalan baru yang lebih berkah baginya.

"Doakan ya, sekarang sedang merintis travel umrah. Insya Allah, ini bisa jadi jalan baru buat aku," ungkapnyanya mengakhiri.

Kini, Celine tampil lebih tenang, damai, dan yakin dengan pilihan hidupnya untuk lebih dekat kepada Allah SWT. Langkah tersebut, turut mendapat banyak dukungan dari keluarga, sahabat, dan para penggemarnya yang turut mendoakan keistiqamahannya. ♦

# KEPADA GUBERNUR DAN KETUA DEKRANASDA SUMSEL SELVI GIBRAN UNGKAP KEKAGUMAN PADA KEMAJUAN SONGKET SUMSEL

Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) Selvi Gibran Rakabuming, melakukan kunjungan ke Kriya Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, pada Jumat 1 Agustus 2025.

Dalam kunjungan tersebut Selvi Gibran, yang merupakan istri Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, didampingi Gubernur Sumatera Selatan Dr Herman Deru, SH, MM, dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Sumsel, Hj. Feby Deru.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Dekranas untuk melihat langsung potensi dan perkembangan kerajinan tangan di berbagai daerah, khususnya di Sumatera Selatan yang kaya akan warisan budaya.

Malam harinya, Selvi Gibran menghadiri kegiatan Malam Budaya Swarna Songket Nusantara 2025 yang digelar di pelataran Museum Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang.

Gubernur Herman Deru mengung-

kapkan kebanggaannya karena Sumsel bersama Kota Palembang telah dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan spektakuler Swarna Songket Nusantara 2025 oleh Dekranas.

Ia memastikan, kegiatan ini akan menjadi prasasti bersejarah yang tak terlupakan bagi masyarakat Sumsel.

"Ini tentu menjadi prasasti tak terlupakan bagi masyarakat Sumsel, terutama bagi perajin songket di Sumsel khususnya bagi Palembang," ujarnya.

## Kecintaan Gubernur pada Songket Diapresiasi Ketua Dekranas

Kecintaan Gubernur Herman Deru pada warisan budaya telah ia buktikan bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan sejak 5 tahun lalu, melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Warisan Tak

Benda. Perda tersebut menjadikan motif songket sebagai ornamen wajib dalam tiap bangunan kantor dan gedung-gedung di setiap daerah di Sumsel.

Salah satu contohnya adalah motif songket pada tanjak yang ada di gerbang utama Museum SMB II Palembang, tempat acara puncak Malam Budaya Swarna Songket Nusantara 2025 Sumatera Selatan.

Sebagai daerah yang terdiri dari 9 suku besar (Batanghari Sembilan), Sumsel kaya akan kain tradisional songket yang bercirikan 9 suku besar tersebut di kabupaten/kota. Misalnya di Komering dengan kain angkinan, OKU Kawai Kanduk, dan Musi Banyuasin dengan Songket Gambo.

Menurutnya, ini adalah aset Sumsel yang tak ternilai. Melalui kegiatan Swarna



Songket Nusantara 2025 ini, ia yakin akan semakin menambah semangat baru para perajin di Sumsel untuk lebih berinovasi dan berkreasi. Meskipun saat ini, perajin juga memiliki tantangan maraknya keberadaan kain printing.

"Ke depan, kita harap para tokoh semakin terbiasa menggunakan kain lokal. Dan kehadiran Ketua Dekranas di sini tentu akan menjadi cerita baru dan membuat perajin serta masyarakat semakin bangga dengan kain songket," kata Gubernur.

Sementara itu, Ketua Dekrana, Selvi Ananda Gibran Rakabuming, mengatakan sangat mengapresiasi Dekranasda Sumsel yang telah menjadi tuan rumah Swarna Songket Nusantara 2025. Ini memperkuat bahwa Indonesia memiliki kekayaan kain tradisional yang sangat luar biasa.

Bukan hanya batik dan songket, namun ada juga ulos, lurik, dan banyak lagi lainnya yang memiliki keunikan dan kekhasan masing-masing. Apalagi di Sumsel dengan 17 kabupaten/kota tentunya memiliki motif dan makna berbeda satu dengan lainnya.

"Kita bersyukur ini kekayaan yang luar biasa. Warisan budaya ini bukan beban tapi justru merupakan identitas kita," ujarnya.

Selvi Ananda Gibran, mengatakan dengan adanya kegiatan fashion show Kepala Daerah mengenakan kain songket yang beragam, diharapkan kain songket di masa mendatang tidak hanya dikenakan saat acara-acara adat atau formal saja. Namun, bisa diterapkan dalam berkegiatan sehari-hari semisal di kantor maupun di sekolah-sekolah.

Selvi juga mengakui bahwa UMKM perajin songket saat ini sudah banyak sekali melakukan inovasi. Hal ini terlihat dari tampilan kain jumputan yang dikombinasikan dengan songket, ada juga batik dikombinasikan dengan songket, dan banyak lagi yang lain.

Ia pun berharap melalui kegiatan-kegiatan semacam ini yang diteruskan ke generasi-generasi muda akan semakin membuat kain songket dikenal dan membanggakan. Selvi juga memuji inovasi dan kreasi para desainer terkenal yang telah mengeksplorasi kain-kain Indonesia menjadi produk yang luar biasa.

Menurutnya, ide-ide seperti itu memang dibutuhkan. Ditambah kerja sama yang kompak tentu akan semakin banyak ide dan kreativitas yang akan dilahirkan.

"Kekayaan tradisional sudah layak



kita kenalkan pada dunia. Kita memiliki kekayaan dengan keunikan masing-masing. Dengan dunia digital sekarang, kita akan makin mudah mengenalkan kekayaan kain tradisional," paparnya.

Melalui kesempatan itu, Ketua Umum Dekranas Selvi Ananda mengajak agar seluruh pihak menjadikan Swarna Songket Nusantara 2025 Sumsel menjadi titik balik memperkuat branding wastra Indo-

nesia di mata dunia.

Turut hadir Ketua Harian Dekranas Tri Tito Karnavian, Seruni Kabinet Merah Putih Anggota DPR RI Kartika Sandra Desi, Anggota DPD RI dr. Hj. Ratu Tenny Leriva HD, Forkopimda Sumsel, Ketua ICSB Sumsel Hj. Samantha Tivani HD, Staf Ahli TP PKK Provinsi Sumsel Lidyawati Cik Ujang, serta sejumlah Bupati/Walikota yang hadir. ♦ADV

# GUBERNUR HERMAN DERU TURUN TANGAN, BANGUN JALAN KHUSUS TAMBANG

## Tahun 2026 Tak Ada Lagi Polusi dan Debu Batu Bara

Gubernur Dr Herman Deru SH MM meresmikan dimulainya pembangunan Jalan Khusus Pertambangan Batu Bara oleh PT Levi Bersaudara Abadi di Desa Cempaka Wangi, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, pada Senin, 4 Agustus 2025. Momen ini menandai upaya signifikan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam mengalihkan angkutan batu bara dari jalan umum ke jalan khusus.

Dalam arahnya, Gubernur Herman Deru menyampaikan bahwa bertahun-tahun lamanya jalan lintas negara yang dilintasi angkutan batu bara hanya menyisakan debu bagi masyarakat. Namun, ia menjelaskan bagian dari solusi dengan dimulainya pembangunan jalan khusus ini, harapan baru untuk mengatasi masalah tersebut mulai terwujud.

Ia menerangkan bahwa sebelumnya kebijakan melalui Peraturan Gubernur Sumsel Nomor 74 Tahun 2018 tentang tata cara pengangkutan batu bara melalui jalan umum di wilayah Sumatera Selatan telah membantu meringankan polusi bagi

masyarakat. Sepanjang 107 KM jalan yang dikelola oleh PT Servo Lintas Raya (SLR) di Sumatera Selatan yang dulu tidak dimanfaatkan telah dimanfaatkan, namun belum sepenuhnya selesai dan masih menyisakan sekitar 30 KM yang masih melintasi jalan umum.

"Karena ISPU (Indeks Standar Pencemar Udara) lebih dari rata-rata di ambang batas, maka untuk itu saya dorong percepatan. Kini kita tidak bicara tentang kepentingan bisnisnya, kita sudah bicara tentang kepentingan kemanusiaan. Berarti siapa yang tidak mendukung perlu dipertanyakan kemanusiaannya," ungkap Herman

Deru, menegaskan urgensi proyek ini demi kepentingan masyarakat.\*

Sementara itu Bupati Lahat Bursah Zarnubi turut menekankan dukungan penuh dari Gubernur Sumsel dan menyatakan akan terus berjuang agar jalan negara dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik. Ia mengakui bahwa keluhan masyarakat inilah yang mendorong terwujudnya pembangunan jalan khusus ini.

"Hanya Pak Gubernur yang bisa menyelamatkan masyarakat yang ada di Lahat hingga Muara Enim. Tak ada jalan lain, Pak Gubernur, selain jalan khusus," ungkap Bupati Lahat, menunjukkan betapa



vitalnya proyek ini bagi daerahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perencanaan PT Levi Bersaudara Abadi, Beni, menerangkan bahwa total jalan hauling PT LBA sepanjang 26,4 Km dengan lebar 30 meter telah dimulai secara bert-



**Hanya Pak Gubernur yang bisa menyelamatkan masyarakat yang ada di Lahat hingga Muara Enim. Tak ada jalan lain, Pak Gubernur, selain jalan khusus.**

hap dan kini tengah dilaksanakan.

“Atas dukungan penuh dari Pak Gubernur, jalan ini bisa terwujud. Sepanjang 2 km telah dilakukan pengerasan. Inshaallah dengan dukungan Pak Gubernur, yang selama ini melintasi jalan negara kini bisa terwujud untuk melintasi jalan khusus pertambangan,” harap Beni.

Turut hadir Kapolda Sumsel Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi, S.I.K, M.H, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih, dan unsur Forkopimda. ♦ADV





Gubernur Herman Deru Minta Kepala BKKBN Sumsel

# TEKAN STUNTING DAN AKTIFKAN KEMBALI PROGRAM TNI MANUNGGAL KB KESEHATAN

Gubernur Dr Herman Deru SH MM secara resmi mengukuhkan dr. Arios Saplis jadi Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sumatera Selatan dalam upacara di Griya Agung Palembang pada Selasa, 5 Agustus 2025.

**D**alam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyatakan bahwa BKKBN memiliki tanggung jawab besar terhadap perencanaan keluarga dan kehamilan yang terencana. Tantangan utama saat ini adalah, bagaimana mensejahterakan keluarga serta peran aktif para Penyuluh Keluarga Berencana (KB) hingga ke pelosok desa.

"Saat ini pentingnya untuk mengaktifkan gerakan Posyandu yang masif, yang

selalu mengampanyekan hidup sehat dan cerdas. Saya minta ini dimasifkan ya, Pak," ungkap Herman Deru, menekankan pentingnya peran Posyandu di tengah masyarakat.

Ia juga mengajak kepemimpinan BKKBN yang baru untuk meningkatkan target penurunan angka stunting di Sumsel hingga mencapai nol kasus (zero stunting). Meskipun dianggapnya sulit namun sebuah motivasi untuk terus menekan angka

stunting di Sumsel.

## Penyuluh KB Harus Sinergi dengan TP PKK

Kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan dr Arios Saplis, Gubernur memintanya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel dalam mengaktifkan gerakan para penyuluh KB.

Ia mengharapkan bahwa para Peny-

uluh KB ini dapat bersinergi dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) di daerah-daerah, agar dapat memantau perkembangan keluarga hingga ke pelosok desa.

"Untuk mengaktifkan para penyuluh agar menyisir ke daerah tertinggal dan terpencil," pintanya.

Di akhir sambutannya Gubernur Herman Deru juga meminta Kepala BKKBN



**Saat ini pentingnya untuk mengaktifkan gerakan Posyandu yang masif, yang selalu mengampayekan hidup sehat dan cerdas. Saya minta ini dimasifkan ya, Pak**

yang baru, untuk segera berkoordinasi bersama Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel agar mengaktifkan kembali program TNI Manunggal KB & Kesehatan yang kini sudah sangat jarang digaungkan.

Harapannya pada musrenbang di tahun 2026 mendatang program dapat terorganisasi dengan baik dan terencana. Dengan demikian, mampu bersinergi dan kolaborasi ke semua pihak agar program dapat berjalan optimal dalam mencapai tujuan dengan baik.

Turut hadir Wakil Walikota Lubuk Linggau H. Rustam Effendi, Ketua TP PKK Sumsel Hj. Febi Deru dan OPD lainnya. ♦



## 16 Kali Berturut-turut Jadi Irup HUT RI HERMAN DERU GAUNGKAN SEMANGAT JUANG DAN KEBANGGAAN BUDAYA SUMSEL

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru, S.H., M.M, kembali menjadi Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu (17/8/2025), di halaman Griya Agung Palembang. Momen ini menjadi yang ke-16 kalinya bagi Herman Deru memimpin upacara HUT RI secara berturut-turut.

**B**erdasarkan catatan, Herman Deru pernah 10 kali menjadi Irup peringatan HUT RI saat menjabat Bupati OKU Timur pada periode 2005–2015. Selanjutnya, ia lima kali bertugas sebagai Irup di masa jabatan Gubernur Sumsel periode 2018–2023, dan kini kembali pada tahun pertama periode keduanya sebagai Gubernur Sumsel (2025–2030).

Upacara peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-80 Kemerdekaan RI tahun ini, berlangsung khidmat dengan dihadiri jajaran Forkopimda, pejabat Pemprov Sumsel, serta tokoh masyarakat. Prosesi dimulai dengan pengibaran Sang Saka Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Sumsel. Ribuan

tamu undangan tampak menundukkan kepala sebagai tanda hormat.

Ketua DPRD Provinsi Sumsel, Andie Dinialdie, SE, MM, mendapat kehormatan membacakan teks Undang-Undang Dasar 1945. Suasana hening menyelimuti upacara saat pasal-pasal dasar negara tersebut dikumandangkan.

Komandan upacara dipercayakan kepada AKBP Irfan Abdul Gofar, S.IK, alumni Akademi Kepolisian 2013 yang kini menjabat Danyon A Pelopor Satbrimob Polda Sumsel. Dengan gagah dan tegas, ia memimpin jalannya upacara.

Petugas pembawa bendera adalah Fanesa Tri Margareta, siswi asal Muara Enim kelahiran 19 Maret 2009. Dengan penuh percaya diri, ia melangkah pasti mem-

bawa Merah Putih menuju tiang utama.

Pasukan pengibar bendera terdiri atas Muhammad Farhan Athaya dari Musi Banyuasin, Muhammad Rafil Naufal dari OKU, dan Muhammad Fadil Dewantara dari OKU Timur. Mereka berhasil menunaikan tugas dengan gerakan yang kompak dan penuh kehormatan.

Komandan Paskibraka, Letda Adm Isnienius Karel Yoga Purwanto, alumni Akademi Angkatan Udara 2024, tampil sigap memimpin pasukan. Saat ini ia menjabat PS Kasubsiminpers Dispers Lanud Sri Mulyono Herlambang.

Usai prosesi, Gubernur Herman Deru menyampaikan apresiasinya. Ia menilai peringatan kali ini sangat istimewa karena seluruh istri Forkopimda dan kepala



OPD mengenakan pakaian adat khas Sumsel.

“Mereka semua memakai baju adat asli Sumsel. Ini bukan sekadar seremonial, tetapi upaya membentengi dan menjaga budaya kita agar tetap lestari,” ujarnya.

Menurut Deru, di usia kemerdekaan ke-80, bangsa Indonesia harus tetap berjuang dengan semangat baru. “Jika dulu perjuangan dengan senjata, sekarang perjuangan kita adalah berkarya, berinovasi, dan menjaga jati diri bangsa,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa HUT RI tidak boleh hanya dimaknai sebatas kemeriahan atau seremoni. Momentum ini harus menjadi pemacu masyarakat Sumsel untuk lebih bersemangat membangun daerah dan bangsa.

Selepas upacara, Gubernur bersama Wakil Gubernur H. Cik Ujang, Forkopimda, dan pejabat lainnya mengikuti siaran virtual upacara detik-detik Proklamasi dari Istana Negara melalui layar besar di



**Mereka semua memakai baju adat asli Sumsel. Ini bukan sekadar seremonial, tetapi upaya membentengi dan menjaga budaya kita agar tetap lestari.**

Joglo Griya Agung.

Hadir pula sejumlah pejabat penting seperti anggota DPD RI dr. Ratu Tenny Leriva Herman Deru, Pangdam II Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis, Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Ryacudu Djajadi, serta Kajati Sumsel Dr. Yulianto.

Ketua TP PKK Sumsel, Hj. Feby Deru, juga menarik perhatian dengan busana adat Tandang khas Musi Banyuasin yang dilengkapi tudung kepala. Busana tersebut melambangkan keanggunan sekaligus kekuatan perempuan Muba.

Selain Feby, seluruh kepala OPD perempuan dan istri pejabat tampil memukau dengan aneka pakaian adat khas Sumsel. Warna-warni busana itu menjadi bukti bahwa kekayaan budaya daerah masih dijunjung tinggi.

Upacara HUT RI ke-80 di Griya Agung tak hanya menjadi simbol nasionalisme, tetapi juga panggung kebanggaan budaya yang diwariskan turun-temurun. ♦ADV



# GUBERNUR HERMAN DERU AJAK KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA PERKUAT LITERASI KEUANGAN DARI KOPERASI DESA HINGGA SEKOLAH

Gubernur Dr Herman Deru SH MM menghadiri pengukuhan Bambang Pramono menjadi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Selatan, dalam sebuah upacara pengukuhan dilaksanakan oleh Deputy IV Bank Indonesia di Griya Agung, Rabu, 6 Agustus 2025.

**B**ambang menggantikan Ricky P Ghozali yang kini mengemban tugas baru sebagai Kepala Kantor BI Wilayah DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Gubernur Herman Deru menyampaikan harapannya kepada pimpinan baru BI Sumsel agar dapat menghadapi tantangan-tantangan ekonomi daerah, salah satunya dengan meningkatkan literasi perbankan hingga ke tingkat akar rumput.

"Di Sumsel ada 3.286 koperasi desa

(Kopdes) yang perlu diedukasi agar memahami tugas dan fungsi dunia usaha, termasuk sektor perbankan. Literasi keuangan sangat penting, dan kita mesti ajak mereka untuk memahami hal tersebut," ujar Deru.

Ia juga mengajak BI, BPS, dan pemanjku kepentingan lainnya untuk bersinergi mengubah pola pikir masyarakat dari konsumtif menjadi produktif, serta mengajak masuk ke sekolah-sekolah guna memberikan edukasi sejak dini tentang

perbankan dan penggunaan uang.

Sinergi Bank Indonesia dan Lembaga Pemerintah di Sumsel

Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung dalam sambutannya usai pelantikan Bambang Pramono memuji baiknya relasi yang terjalin selama kepemimpinannya sebelumnya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Ricky P Ghozali atas pengabdianya di Sumsel, dan mengucapkan selamat





bertugas kepada Bambang Pramono.

"Banyaknya tokoh dan pejabat yang hadir hari ini membuktikan kuatnya sinergi antara Bank Indonesia dan lembaga-lembaga di Sumatera Selatan," katanya.

"Saya berharap BI Sumsel terus memperkuat komunikasi dan kerja sama den-



**Banyaknya tokoh dan pejabat yang hadir hari ini membuktikan kuatnya sinergi antara Bank Indonesia dan lembaga-lembaga di Sumatera Selatan.**

gan seluruh komponen pemerintah daerah, terutama dalam menjaga kestabilan inflasi dan ketersediaan pasokan pangan," kata Juda Agung.

Turut hadir Ketua TP PKK Sumsel Feby HD, Wali Kota Pagar Alam Ludi Oriansyah, Wakil Bupati OKU Marjito Bachri, Kepala BPS Sumsel Moh. Wahyu Yulianto, Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto, Kepala BPKP Sumsel Supriyadi serta para kepala OPD Prov Sumsel. ♦





## CIK UJANG: SRIWIJAYA EXPO JADI REFLEKSI KOMITMEN PEMPROV SUMSEL GERAKKAN PEMBANGUNAN EKONOMI

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong pembangunan ekonomi melalui pendekatan promosi daerah. Hal ini tergambar dari suksesnya penyelenggaraan Sriwijaya Expo 2025 yang ditutup langsung oleh Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, pada Selasa malam (5/8/2025) di BKB Palembang.

Selama lima hari, Sriwijaya Expo 2025 menjadi ajang integrasi antara pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan ekonomi. Agenda ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-79 Provinsi Sumsel.

Dalam sambutannya, Cik Ujang mengatakan bahwa expo ini merupakan persembahan pemerintah daerah untuk mendorong roda perekonomian dan mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan kepada masyarakat luas.

"Pemerintah Provinsi tidak hanya ingin merayakan hari jadi dengan seremoni, tetapi menghadirkan sesuatu yang bermanfaat secara langsung bagi masyarakat, terutama dalam membuka akses promosi produk dan potensi daerah," ujarnya.

Cik Ujang juga menekankan pentingnya hilirisasi terhadap produk unggulan Sumsel. "Kita punya kekayaan dari sektor perkebunan, pertambangan, kelautan, dan

pertanian. Jika ini diolah di dalam daerah, nilai ekonominya akan jauh lebih besar," jelasnya.

Penutupan Sriwijaya Expo dimeriahkan dengan pemberian penghargaan kepada para peserta terbaik. Disperindag OKI meraih juara pertama kategori pemerintah, sedangkan Bank Indonesia meraih juara utama kategori BUMN-BUMD.

Ajang ini juga menghadirkan sinergi berbagai organisasi daerah dan perempuan, seperti Dekranasda, KORMI, BKOW, dan DWP. Kehadiran mereka menjadi simbol dukungan atas visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Cik Ujang, pembangunan Sumsel akan berhasil jika semua elemen masyarakat terlibat. Ia mengapresiasi pelibatan UMKM dan IKM dalam event ini sebagai langkah konkrit pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemerintah Provinsi berharap Sriwijaya Expo tidak berhenti sebagai ajang tahu-



nan, tetapi menjadi pemicu bagi program-program pembangunan lainnya. Dengan semangat “Sumsel Maju Terus untuk Semua”, berbagai potensi daerah akan terus digali dan dioptimalkan.

“Melalui acara seperti ini, kita dapat menjembatani kepentingan antara pemerintah,



**Kita punya kekayaan dari sektor perkebunan, pertambangan, kelautan, dan pertanian. Jika ini diolah di dalam daerah, nilai ekonominya akan jauh lebih besar.**

pelaku usaha, dan masyarakat dalam satu semangat kemajuan bersama,” tegasnya.

Acara ditutup secara simbolis oleh Wakil Gubernur dengan menarik tuas penanda berakhirnya expo. Di hadapan ribuan pengunjung, Cik Ujang menyampaikan pesan bahwa pembangunan daerah harus menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. ♦

## Feby Deru Ajak Kader PKK **JADIKAN PENGAJIAN SEBAGAI SARANA GOTONG ROYONG DAN KEPEDULIAN SOSIAL**

Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), Hj Febrita Lustia HD, mengajak seluruh kader PKK se-Sumsel untuk menjadikan kegiatan pengajian sebagai sarana gotong royong dalam meningkatkan kepedulian dan kesadaran masyarakat. Hal itu ia sampaikan dalam pengajian rutin TP PKK Sumsel yang digelar di Griya Agung Palembang, Senin (4/8/2025).

**M**enurut Feby, pengajian bukan hanya menjadi ruang ibadah dan pembinaan keagamaan, tetapi juga bisa menjadi wahana mempererat silaturahmi antar kader serta memperkuat nilai-nilai sosial, kebersamaan, dan kepedulian dalam kehidupan sehari-hari.

"Peran kader PKK sangat besar dalam membentuk kesadaran masyarakat. Mari kita jadikan pengajian ini sebagai bentuk nyata gotong royong dalam membangun kepedulian sosial," ujar Feby dalam sambutannya di hadapan ratusan kader PKK yang hadir.

Pengajian rutin tersebut merupakan salah satu agenda kerja Pokja I TP PKK

Sumsel. Melalui kegiatan ini, Feby berharap kader PKK dari berbagai daerah di Sumsel dapat saling bersilaturahmi, bertukar pikiran, serta berbagi pengalaman dalam mengimplementasikan program-program PKK di tingkat daerah.

Pengajian kali ini mengangkat tema "Menerapkan Ikhlas dalam Setiap Kegiatan" dengan menghadirkan penceramah Ustadz Hilman Fauzi. Feby menilai bahwa nilai keikhlasan penting diterapkan dalam setiap kegiatan, baik dalam organisasi maupun kehidupan pribadi.

"Kita harus belajar untuk ikhlas, tidak hanya saat melaksanakan kegiatan PKK, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan. Ikhlas berangkat dari niat yang tulus dan





tanpa prasangka,” tegas Feby di hadapan peserta.

Dalam tausiyahnya, Ustadz Hilman Fauzi menyampaikan bahwa seorang istri merupakan jantung rumah tangga, sehingga ketenangan hati dan kebahagiaan seorang ibu menjadi kunci keharmonisan keluarga. Ia menekankan pentingnya menjaga ketenangan batin melalui pendekatan spiritual.

“Rahasia hati yang tenang dan bahagia terletak pada lima amalan utama, yaitu memperbanyak rasa syukur, bersabar, memperbaiki shalat, bersedekah, dan memperpanjang silaturahmi,” ujarnya memberikan pesan kepada para peserta.

Ketua Pelaksana kegiatan, dr. Ria Anindita, melaporkan bahwa pengajian ini merupakan bagian dari kajian rutin TP PKK Sumsel dan menjadi bentuk konsistensi Pokja I dalam membina spiritualitas kader. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan membentuk pribadi yang religius dan berkarakter kuat.

“Pengajian ini diikuti sekitar seribu peserta, terdiri dari para Ketua TP PKK kabupaten/kota, kader PKK se-Sumsel, pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sumsel, serta Ketua DWP OPD Provinsi Sumsel,” jelas Ria.

Kegiatan juga dihadiri Staf Ahli TP PKK Sumsel, Lidyawati Cik Ujang, serta Ketua DWP Sumsel, Desy Edward. ♦





Masjid Agung Samarra

# 5

## DESTINASI WISATA RELIGI DI IRAK; DARI MASJID AGUNG SAMARRA HINGGA MAKAM SAYYIDINA ALI

Negara Irak, yang sering disebut sebagai negeri 1001 malam, menyajikan berbagai macam keunikan dari berbagai aspek, terutama sejarah, kesusasteraan dan tentunya keagamaan.

Irak juga memiliki beberapa tempat yang bisa menjadi tempat untuk berwisata religi, menikmati kekayaan sejarah dan spiritualitas sambil mengagumi keindahan arsitektur dan budaya Irak.

Wisata religi di Irak yang bisa dikunjungi, di antaranya Masjid Agung Samar-

ra, Masjid Kufah, Makam Sahabat Nabi dan banyak lagi.

Inilah 5 Destinasi Wisata Religi yang Menarik di Irak:

### 1. Masjid Agung Samarra

Merupakan salah satu tempat ibadah

umat muslim terbesar yang juga masuk catatan dalam Sejarah Islam. Di masjid ini, terdapat beberapa hal menarik bisa diketahui, sebelum berkunjung ke Masjid Agung yang megah ini.

Berikut Beberapa Hal Menarik tentang Masjid Agung Samarra, Irak:



Makam Sayyidina Ali bin Abu Thalib

#### a. Letak Masjid

Masjid ini terletak di sisi timur sungai Tigris, kurang lebih 125 kilometer ke arah utara ibu kota Irak, Baghdad. Pada tahun 836 sampai dengan 892 masehi, kota Samarra merupakan ibu kota dari Kekhalifahan Abbasiyah. Pastinya pada waktu itu, kota ini sangat ramai dan berkembang.

Seiring dengan berjalannya waktu, masjid ini pun mengalami kerusakan beberapa kali, sehingga harus melakukan perbaikan. Pembangunan kembali terjadi pada tahun 849 sampai dengan 852 M. Sampai akhir abad ke-11 M masjid ini terus masyarakat lokal gunakan sebagai tempat ibadah.

#### b. Bentuk Bangunan

Salah satu daya tarik masjid Samarra ini menjadi destinasi wisatawan adalah karena bentuknya. Bangunan masjid ini, sekilas mirip seperti sebuah benteng pertahanan. Terdapat beberapa alasan yang mendasarinya, mulai dari tidak adanya symbol-simbol khusus yang tampak dari kejauhan.

Hal ini menandakan bangunan tersebut adalah tempat ibadah. Bentuknya memang sangat tidak mirip dengan sebuah masjid, melainkan lebih mirip benteng pertahanan. Akan tetapi secara keseluruhan konstruksinya menggunakan batu bata yang sudah melewati proses

pembakaran terlebih dahulu.

#### c. Keunikan Masjid

Selain memiliki bentuk yang tidak menyerupai masjid, terdapat keunikan lain dari Masjid Agung Samarra. Apabila diperhatikan, bentuknya seperti sebuah menara spiral. Hal ini seolah mengingatkan manusia tentang menara Babel yang dulunya menjadi ikon abad kejayaan Kerajaan Babilonia.

Kerajaan Babilonia ini memerintah di wilayah Mesopotamia dan sangat berkuasa pada kala itu. Menara berbentuk spiral dengan tinggi mencapai 52 meter ini, memiliki bagian dasar menara berbentuk empat persegi. Sementara bagian atas menara, terdapat paviliun yang fungsinya sebagai muazin untuk mengumandangkan suara Adzan panggilan shalat.

#### d. Luas Masjid

Bangunan Masjid Agung Samarra berada di platform atau lahan berpagar dengan ukuran 374 meter kali 443 meter. Sementara luasnya adalah 239 meter kali 156 meter, sehingga menjadikan Masjid Agung Samarra cukup luas untuk ukuran tempat ibadah.

Dan ukuran ini tercatat dalam sejarah dunia islam sebagai masjid terluas. Untuk mengakses atau mengunjungi masjid

ini, wisatawan bisa mengakses tiga jalan masuk dengan luas 52 meter. Hal ini karena ukuran masjid yang memang sangat besar sekali, sehingga harus memiliki platform luas.

#### e. Pintu Masuk Masjid

Berbicara soal akses masuk, Masjid Samarra menyediakan kurang lebih 16 pintu masuk dengan 17 lorong. Semua pintu dan lorong ini, terhubung langsung dengan ruang sholat dan serambi masjid. Menariknya, serambi masjid ini berhiasan tiang-tiang pilar rangkap tiga.

Komposisi tersebut menciptakan sebuah pemandangan yang cukup estetika dalam urusan desain. Ketika mengadakan sholat jumat, bagian serambi masjid dapat juga berfungsi sebagai penampung para jamaah sholat jumat, jika memang orangnya banyak. Pada zaman dahulu tepatnya di dinasti Abbasiyah tentunya masjid ini sangat aktif dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan.

#### f. Desain Ruangan

Untuk urusan desain interior atau bagian dalam Masjid Agung Samarra menawarkan hiasan marmer dengan bentuk pola segi delapan. Pola tersebut berada di sudut sudut ruangan yang membuatnya terlihat begitu indah ketika



seseorang memasukinya.

Memasuki area mihrab, terdapat sebuah hiasan dengan mosaik kaca yang juga tampil sangat mempesona. Sementara pada bagian kecil dari potongan-potongan mozaik tersebut, masih tersisa sebagai tanda bukti sejarah yang telah terukir. Tentu saja, terdapat beberapa makna mendalam pada ukiran tersebut, bagi para sejarawan muslim hal ini menjadi surganya penelitian.

#### **g. Masuk Situs Bersejarah Dunia**

Keunikan dan juga keistimewaan Masjid Samarra membuatnya masuk dalam kategori tempat atau salah satu bangunan bersejarah dunia World Heritage Sites. Tidak bisa dipungkiri, kota Sa-

marra pernah menjadi salah satu pusat atau sentral kota.

Pada masa Dinasti Abbasiyah, kota Baghdad atau Irak memang menjadi segala pusat baik tentang ilmu pendidikan maupun teknologi. Karena pernah menjadi ibukota pemerintah islam yang menguasai provinsi di masa kekhilafahan dinasti Abbasiyah, maka tak heran, tempat ini menyimpan banyak sekali keunikan dan nilai sejarah tinggi sebagai destinasi wisata.

#### **h. Keunikan Bangunan di Belakang Mihrab**

Pada bagian belakang masjid terdapat sebuah mihrab kecil. Bangunan kecil ini sendiri di masa Pemerintahan Dinasti

Abbasiyah merupakan bangunan untuk menerima kunjungan khalifah. Biasanya khalifah di samping mihrab tersebut akan beristirahat.

Selain itu, di samping mihrab juga terdapat tempat beristirahat untuk para imam masjid yang bertugas memimpin sholat. Keunikan bangunan di bagian Belakang pada masa itu, khusus untuk para khalifah beristirahat dan juga sebagai tanda bahwa tempat ini memang sengaja dibangun oleh pemerintah yang berkuasa.

#### **2. Makam Sayyidina Ali bin Abu Thalib**

Makam Sayyidina Ali dikenal terdapat di sebuah Masjid yang Bernama Masjid Ali. Masjid ini terletak di Najaf, Irak. Masjid



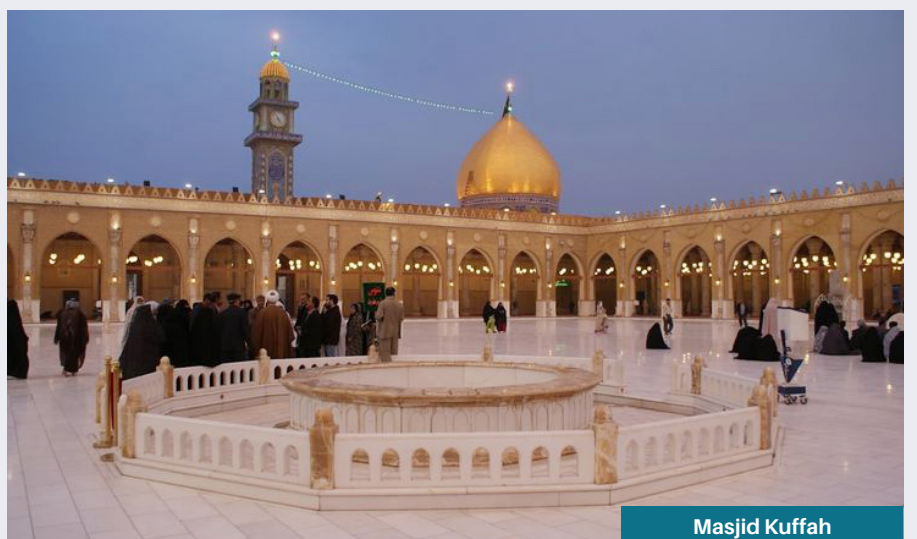
Masjid Najaf Makam Ali

ini diyakini merupakan makam dari Sahabat, yang juga sepupu dan menantu Nabi Muhammad SAW.

Kaum Syiah menganggap Ali bin Abi Thalib sebagai Imam pertama mereka, dan kaum Sunni menganggapnya sebagai Khalifah Rasyid Sunni keempat. Menurut kepercayaan Syiah, Ali bin Abi Thalib dimakamkan di sebelah sisa-sisa makam Nabi Adam dan Nabi Nuh. Setiap tahun, jutaan peziarah mengunjungi Makam di Masjid dan memberi penghormatan kepada Imam Ali.

### 3. Masjid Kuffah

Masjid Agung Kufah atau Masjid al-Kufah adalah salah satu masjid tertua di dunia. Masjid yang terletak di Kufah, Irak ini,



Masjid Kuffah

dibangun pada tahun 639 oleh komandan muslim Sa'ad bin Abi Waqqash atas perintah Khalifah Umar bin Khattab.

Masjid Kuffah memiliki luas total bangunan mencapai 11,000 m<sup>2</sup>. Masjid ini memiliki 9 tempat suci dan 4 tempat tradisional lainnya. Masjid ini, juga dilengkapi dengan 4 menara dan lima gerbang.

Masjid ini, selalu menjadi destinasi wisata yang menarik di Irak. Selain memiliki bentuk yang orosinal, Masjid Kuffah juga memiliki Sejarah yang berkaitan dengan Sejarah Islam.

#### 4. Mausoleum Imam al-Hasan of Basra

Makam Imam Hasan dari Basra adalah sebuah makam dan tempat suci bersejarah di Basra, di Kegubernuran Basra, Irak. Tempat suci ini dibangun untuk memperingati ulama Islam Sunni yang terkenal, Hasan dari Basra.

Hasan dari Basra, yang dijuluki Abi Sayeed, lahir dua tahun sebelum berakhirnya era Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Makam ini terletak di distrik Zubayr, di mana terdapat banyak pemakaman para ulama.

Mausoleum ini berisi makam Hasan dan Ibnu Sirin, dan bangunan tersebut diatapi menara berkubah kerucut yang dihiasi ukiran. Menara ini dibangun pada tahun 1185 M oleh Khalifah Abbasiyah ke-34, Al Nasir, yang dibangun dengan gaya arsitektur Seljuk, dengan bagian bawah menara memiliki diameter lebih besar daripada bagian atas.

Kemudian di bagian utara makam, terdapat dua pilar dengan lukisan plester. Di sebelah makam, terdapat ruangan yang berisi makam keluarga Al-Naqib. Makam Hasan terbuat dari batu marmer. Sebuah ruang sholat kecil juga berfungsi sebagai Masjid.

Makam ulama Hasan Al-Bashri terletak di kota Basra, Irak. Tepatnya, makam tersebut berada di distrik Zubayr, yang juga merupakan area pemakaman. Hasan Al-Bashri, seorang ulama dan sufi terkemuka, dimakamkan di sana setelah wafat pada tahun 110 H (728 M).

Makamnya dikenal sebagai tempat suci dan bersejarah, dan menjadi tujuan ziarah dan wisata religi bagi banyak orang.

#### 5. Masjid dan Restoran Halal di Baghdad

Beberapa tempat yang direkomendasikan untuk wisata halal di Baghdad, antara lain adalah Masjid Al-Kadhimiya, tempat suci yang juga menjadi tempat makam Imam Musa al-Kazhim dan Imam



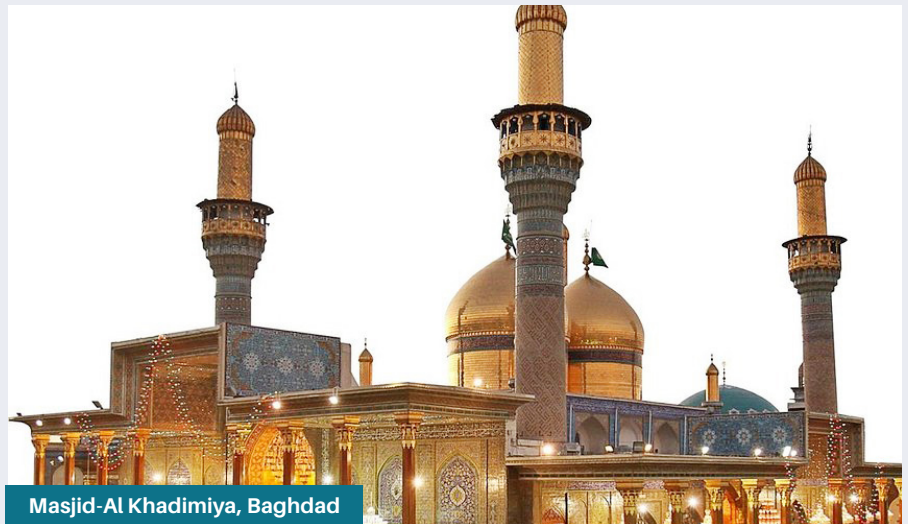
Muhammad al-Jawad.

Selain itu, ada juga Masjid Abu Hanifa, Al-Rahman Mosque, dan Umm Al-Qura Mosque, yang merupakan tempat ibadah penting. Untuk wisata sejarah dan budaya, para pengunjung juga bisa mengunjungi The Iraq Museum, Al-Shaheed Monument, dan Al-Mutanabbi Statue. Penting juga untuk mencari restoran halal yang menyajikan hidangan khas Irak.

Beberapa Destinasi Wisata Halal di Baghdad:

keindahan arsitekturnya dan nilai sejarahnya.

- ▶ Museum Irak: Museum yang menyimpan berbagai benda bersejarah dan artefak kuno dari berbagai periode sejarah Irak.
- ▶ Monumen Al-Shaheed: Monumen yang dibangun untuk mengenang para martir dalam perang Irak.
- ▶ Patung Al-Mutanabbi: Patung yang didedikasikan untuk penyair terkenal Irak, Al-Mutanabbi.



Masjid-Al Khadimiya, Baghdad



Masjid-Al Rahman, Baghdad

- ▶ Masjid Al-Kadhimiya: Tempat suci yang menjadi rumah bagi makam Imam Musa al-Kazhim dan Imam Muhammad al-Jawad, serta makam ulama terkenal lainnya.
- ▶ Masjid Abu Hanifa: Masjid bersejarah yang juga merupakan tempat menarik dan sangat penting di Baghdad.
- ▶ Masjid Al-Rahman: Masjid dengan arsitektur yang indah dan menjadi tempat ibadah yang penting.
- ▶ Masjid Umm Al-Qura: Masjid lain yang patut dikunjungi untuk mengagumi

- ▶ Jalan Al-Mutanabbi: Jalan yang terkenal dengan toko buku dan suasana intelektualnya.
- ▶ Museum Baghdadi: Museum yang menampilkan kehidupan dan budaya masyarakat Baghdad pada masa lalu.
- ▶ Zawraa Park: Taman yang menawarkan pemandangan indah dan suasana yang menenangkan.
- ▶ Restoran Halal: Restoran di Baghdad banyak yang menyajikan hidangan halal, untuk mencicipi kuliner khas Irak. ♦



Mausoleum Imam al-Hasan of Basra



Kemenag Tak lagi urus haji.

## TAK LAGI URUS HAJI, KEMENAG FOKUS PELAYANAN DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Kementerian Agama (Kemenag) kini fokus pada layanan keagamaan serta pendidikan agama dan keagamaan, sejak urusan haji dialihkan ke Badan Penyelenggara Haji (BPH).

"Pasca dialihkannya urusan haji dari Kementerian Agama (Kemenag) ke BPH (Badan Penyelenggara Haji), maka praktis Kementerian Agama hanya fokus pada dua bidang: pelayanan keagamaan dan pelayanan pendidikan keagamaan," kata Wakil Menteri Agama (Wamenag), Romo Muhammad Syafii saat memberikan pembinaan bagi guru-guru Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Sidoarjo, seperti dilansir dari Kemenag, Senin (4/8/2025).

Wamenag Romo Syafii menampik anggapan bahwa perampingan tugas menjadikan pekerjaan di Kementerian Agama (Kemenag) menjadi ringan. Justru sebaliknya, dua tugas tersebut (pelayanan keagamaan dan pelayanan pendidikan keagamaan) sangat menantang dan membutuhkan perbaikan serta penyempurnaan.

"Banyak yang mengatakan bahwa pekerjaan Kementerian Agama menjadi sangat sedikit. Tapi versi saya, ketika kita fokus pada dua bentuk pelayanan itu, ternyata banyak

hal yang memang perlu diperbaiki, banyak hal yang perlu disempurnakan dan banyak hal untuk dua bidang itu perlu diadakan untuk melingkupi dan menyempurnakan," ungkap Wamenag.

Lebih lanjut, Wamenag mengatakan bahwa tugas mengurus kehidupan beragama di Indonesia adalah amanah yang berat, sekaligus kehormatan luar biasa.

"Kita diamanahkan oleh negara mengurus kehidupan beragama di Indonesia. Dengan kata lain, apakah kehidupan beragama di Indonesia berjalan dengan baik? Jawabnya tergantung kita. Dan kalau faktanya di lapangan kehidupan beragama tidak berjalan baik, itu pasti tanggung jawab kita," lanjut Wamenag.

Wamenag pun berjanji akan terus bertemu dengan para pendidik atau para guru.

"Insya Allah ini bukan pertemuan terakhir, tapi pertemuan pertama kita. Insya Allah akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya," pungkas Wamenag.

### Tutup Rakernas Evaluasi Haji 2025, Dirjen PHU: Momentum Mengawal Perubahan

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Haji Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446H/2025M menjadi momentum mencari kesempurnaan dan perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.

Hal ini disampaikan Dirjen PHU Hilman Latief saat menutup rangkaian Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1446H/2025M di Tangerang Selatan, Kamis (31/7/2025).

Rakernas yang berlangsung dari 28 - 31 Juli 2025 ini, mengusung tema "Legacy, Change, and Continuity: Mewariskan Pondasi, Mengawal Perubahan, Bangun Keberlanjutan Penyelenggaraan Haji."

Menurut Dirjen PHU, Rakernas ini diharapkan akan mewariskan satu pondasi yang bisa dijadikan pijakan untuk penyelenggaraan haji akan datang dan Kemenag ingin mengawal perubahan itu bersama-sama

karena perubahan adalah keniscayaan.

“Mudah-mudahan ini bagian dari langkah kita untuk mencari kesempurnaan di masa akan datang. Karena kesempurnaan adalah konsep untuk kita jadikan satu rujukan dalam berproses,” kata Hilman Latief, seperti dilansir dari Kemenag, Kamis (31/7/2025).

Hilman mengatakan, bahwa tantangan penyelenggaraan ibadah haji ke depan sudah di depan mata. Awal Agustus ini, langkah persiapan penyelenggaraan haji sudah harus dilakukan.

“Insya Allah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi akan hadir bersama kita pada 4-6 Agustus 2025 dalam diskusi dan workshop dalam rangka persiapan penyelenggaraan haji lebih awal. Akan ada perubahan-perubahan yang harus diantisipasi lebih awal. Apalagi setelah pertemuan Menag RI dan Kepala BP Haji dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi di Jeddah belum lama ini bahwa mereka menyatakan satu konsep perubahan yang akan terjadi pada penyelenggaraan ibadah haji,” tambah Hilman.

Lebih lanjut, Hilman mengatakan, bahwa bukan hanya perubahan yang akan dihadapi, tetapi juga sesuatu yang tiba-tiba mengagetkan. Hampir setiap tahun ada perubahan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan itu sangat kompleks.

“Karena itu, saya sangat setuju dengan tema dalam Rakernas ini yakni mengawal perubahan dan ini adalah bagian dari pemerintah Indonesia untuk mencari kesempurnaan dengan melakukan perubahan,” lanjut Hilman.

Hilman juga sadar dengan situasi yang berkembang saat ini, bahwa setiap masa itu ada orangnya dan setiap orang ada masanya.

“Maknanya adalah perubahan dan saya berharap kita semua bisa menyongsong perubahan yang terjadi dengan tangan terbuka dan kesiapan yang kita lakukan. Ada masa lalu, ada masa kini dan ada masa depan,” pungkasnya.

### Lima Rekomendasi Hasil Rakernas Evaluasi Haji 2025

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1446 H/2025 M telah selesai dan ditutup pada Kamis (31/7/2025). Rakernas ini menghasilkan lima rekomendasi, dari perbaikan manajemen manasik haji hingga layanan syarikah.

Hasil Rakernas tersebut dibacakan oleh Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Nugraha Stiawan pada penutupan Rakernas. Nugraha menyampaikan apresiasi pihak Arab Saudi terhadap Misi Haji Indonesia, karena berhasil mengatasi berbagai tantangan dalam masa transformasi layanan haji.

“Koordinasi dan kerja sama yang baik antarpemangku kepentingan, peran petugas haji, dan dukungan dari berbagai pihak menjadi kunci keberhasilan dalam memastikan jemaah terlayani dengan baik,” ujar Nugraha pada momentum Pembacaan Rekomendasi Rakernas Evaluasi Haji.

Berikut 5 Rekomendasi Rakernas Evaluasi Haji 2025:

1. Rekomendasi Manajemen manasik dan mekanisme pengelolaan DAM, serta pola rekrutmen dan pembinaan petugas haji.



Tutup Rakernas Evaluasi Haji.



5 Hasil Rakernas Evaluasi Haji 2025.

Ada sejumlah rencana aksi yang direkomendasikan, yaitu:

- a). Menyusun pedoman standarisasi kompetensi dan melakukan bimbingan yang terstandar kepada jemaah haji dan stakeholder.
- b). Melakukan uji kompetensi standar manasik kepada pembimbing ibadah di tingkat Kab/Kota.
- c). Menekankan kepada KBIHU, pembimbing pada Tingkat Kecamatan/KUA dan

Kab/Kota agar menerapkan kurikulum manasik haji secara optimal dan terintegrasi.

- d). Mengimplementasikan kebijakan Kerajaan Arab Saudi dan ketentuan Pemerintah Indonesia terkait prosedur pembayaran DAM kepada jemaah haji, KBIHU dan stakeholder.
- e). Perbaiki manajemen rekrutmen petugas haji (PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter dan PHD) yang transparan dan akuntabel sehingga menghasilkan petugas haji yang profesional dan handal.

- f). Meningkatkan pembinaan kepada Petugas Haji (PPIH Arab Saudi, PPIH Kloter, dan PHD) dengan menyempurnakan pola Bimbingan Teknis Petugas Haji serta melalui penilaian kinerja petugas haji yang lebih terukur dan sistematis.
- g). Proses rekrutmen tenaga pendukung Mukim dan Mahasiswa agar mengutamakan yang memiliki izin masuk ke Makkah dan mengikuti ketentuan dari Pemerintah Arab Saudi.



Cek kesehatan gratis.



Menteri Agama, Nasruddin Umar meninjau Cek kesehatan gratis.



Cek kesehatan gratis.

**2. Rekomendasi yang berkenaan dengan manajemen pemvisaan, transportasi udara, dan layanan kesehatan, dengan rencana aksi:**

- a). Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan kebijakan paspor jamaah haji.
- b). Menetapkan kebijakan terkait mekanisme pelunasan dan pemvisaan bagi

jamaah haji penggabungan mahram/ suami-istri, pendamping lansia, disabilitas, dan PHD agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.

- c). Sinkronisasi proses pemvisaan di dalam negeri dengan timeline yang diterbitkan oleh pemerintah Arab Saudi serta waktu pemvisaan tidak berbarengan dengan pelunasan.

- d). Mengimplementasikan kebijakan pembatasan jamaah lansia diatas 70 tahun yang berhak lunas dengan ketentuan memenuhi istitha'ah kesehatan dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.
- e). Penguatan komitmen bersama dalam penerapan istitha'ah kesehatan jamaah haji.
- f). Pembentukan crisis center dalam penyelenggaraan ibadah haji.
- g). Melakukan kerjasama layanan kesehatan dengan instansi pelayanan kesehatan dan penyiapan gedung serta sarana/ prasarana kesehatan berdasarkan ketentuan Pemerintah Arab Saudi.

**3. Rekomendasi Pelayanan Akomodasi, Konsumsi, dan Transportasi Jamaah Haji di Arab Saudi.**

Rencana aksi yang direkomendasikan:

- a). Melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi terkait dengan pelayanan akomodasi dan transportasi jamaah haji yang ditetapkan dalam Taklimatul Haji.
- b). Penerapan kebijakan terkait dengan manajemen barang bawaan jamaah haji pada saat operasional haji.
- c). Pengembangan ekosistem ekonomi haji terhadap produk-produk Indonesia untuk pelayanan konsumsi bagi jamaah haji dan umrah.

**4. Rekomendasi Pelayanan Syarikah, Layanan Masyair, dan aplikasi Nusuk.**

Rencana aksi yang direkomendasikan:

- a). Koordinasi dengan Kementerian Haji Arab terkait ketentuan layanan jamaah haji berbasis syarikah.
- b). Penguatan manajemen pengawasan kinerja Syarikah untuk memastikan kesepakatan dalam kontrak berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- c). Sinkronisasi dan integrasi data siskohat dengan e-haji.
- d). Koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi dan Syarikah terkait dengan kebijakan kartu nusuk dan memastikan kemudahan distribusi kepada jamaah haji.
- e). Sosialisasi kepada jamaah haji terkait dengan update kebijakan implementasi kartu nusuk dengan memasukkan dalam materi manasik haji.

**5. Rekomendasi Penetapan BPIH dan Percepatan Pelunasan Bipih, dengan rumusan rencana aksi:**

- a). Melakukan koordinasi lebih awal dengan DPR RI dan BPKH dalam proses penetapan BPIH.
- b). Proses penetapan BPIH mengacu kepa-

da timeline penyelenggaraan haji yang ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi.

c). Menyusun regulasi bersama dengan BPKH terkait mekanisme pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji yang menjadi ketetapan Pemerintah Arab Saudi.

Rakernas Evaluasi Haji 1446 H/2025 M, yang berlangsung selama 4 hari, pada 28 hingga 31 Juli 2025 berlangsung lancar. Hadir, kurang lebih 450 peserta dari berbagai unsur, termasuk Badan Penyelenggara Haji (BPH), Komisi VIII DPR RI, Kantor Wilayah Kementerian Agama, serta Duta Besar RI untuk Arab Saudi, Abdulaziz Ahmad.

Forum ini menjadi wadah strategis untuk merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan haji yang lebih sinergis dan berkelanjutan ke depan.

### Kemenag Dukung Cek Kesehatan Gratis bagi 12,5 Juta Siswa Lintas Agama

Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) gagasan Presiden Prabowo Subianto berupa Cek Kesehatan Gratis (CKG) bagi anak usia sekolah, mendapat dukungan penuh dari Kementerian Agama (Kemenag).

Program ini telah dimulai dilaksanakan serentak pada 4 Agustus 2025, di berbagai lembaga pendidikan agama dan keagamaan lintas agama di seluruh Indonesia.

"Program Cek Kesehatan Gratis ini adalah bagian dari ikhtiar bersama untuk menyiapkan generasi muda yang sehat secara jasmani dan rohani. Ini sejalan dengan nilai-nilai inti setiap agama yang menekankan pentingnya kesehatan sebagai bagian dari ibadah dan keberlangsungan hidup," kata Menteri Agama Nasaruddin Umar, usai meninjau pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis di Pondok Pesantren Asshidiqiyah, Jakarta Barat, seperti dikutip dari Kemenag, Senin (4/8/2025).

Menag menambahkan, tubuh yang sehat, menjadi sarana agar tiap manusia dapat beraktivitas dan beribadah dengan optimal.

"Tidak mungkin kita bisa menjadi hamba yang taat kalau sakit-sakitan. Dan tidak mungkin kita menjadi khalifah yang sukses kalau penyakitan. Maka kesehatan dan kebugaran ini sangat penting (untuk) menjadi hamba yang taat dan menjadi khalifah," tambah Menag.

Menag Nasaruddin Umar menjelaskan, bahwa Pelaksanaan CKG akan menyasar Madrasah, Pesantren, satuan pendidikan keagamaan Kristen, Katolik, Hindu (Widyalyaya), dan Buddha (Dharmasekha). Langkah ini memperkuat komitmen dan dukungan Kementerian Agama dalam memberikan pelayanan inklusif lintas iman.

Hingga 4 Agustus 2025, tercatat 12.548.995 peserta didik binaan Kemenag

berpotensi mendapatkan layanan kesehatan gratis, yang meliputi:

1. Siswa Madrasah (MI, MTs, MA): 9.179.847
2. Santri Pondok Pesantren: 3.339.536
3. Siswa Pendidikan Kristen: 18.090
4. Siswa Pendidikan Katolik: 7.032
5. Siswa Pendidikan Hindu (Widyalyaya): 3.421
6. Siswa Pendidikan Buddha (Dharmasekha Formal): 1.069.

"Pelaksanaan CKG menjadi langkah strategis dalam menanamkan budaya hidup sehat sejak dini di semua lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia. Saya ingin lembaga pendidikan agama dan keagamaan menjadi contoh terdepan dalam pelaksanaan

dan Kepala Kankemenag di seluruh Indonesia untuk mengawal program CKG tersebut.

"Siapa pun sekolah-sekolah yang tidak memberikan perhatian penuh, nanti kami akan berikan semacam perhatian khusus," imbuh Menag.

"Jadi sekaligus ini kami mengimbau kepada seluruh Kepala Kanwil se-Indonesia, kalau nanti saya tahu ada di antara sekolah yang tidak mendapatkan pemeriksaan, nanti akan saya panggil para Kepala Kanwil dan Kankemenag-nya," katanya.

Tak hanya itu, Kemenag juga akan melakukan sosialisasi secara intensif kepada orang tua dan peserta didik, mendorong aktivasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan pemanfaatan aplikasi Satu Sehat Mo-



BPJPH-Kemenag resmi pisah.

aan program ini," kata Menag Nasaruddin Umar.

Pelaksanaan program CKG ini, menurut Menag, akan menjadi momentum penting dalam mendukung Visi Indonesia Emas 2045, khususnya dalam mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.

"Jadi saya ingatkan tadi, dari peserta didik Kementerian Agama sebanyak 12,5 juta tadi itu. Maka CKG di lembaga pendidikan agama dan keagamaan menjadi krusial dan mendukung visi Indonesia 2045," ungkapnya.

Menag pun meminta seluruh lembaga pendidikan agama dan keagamaan untuk mendukung program ini.

"Tidak hanya menyiapkan ruang kelas dan aula sebagai tempat pemeriksaan, tetapi juga menyediakan alat ukur tinggi badan, timbangan, dan lembar pemeriksaan penglihatan. Guru dan tenaga kependidikan juga kami minta terlibat dalam proses pendampingan teknis," kata Menag menjelaskan.

Menag meminta seluruh Kepala Kanwil

bile.

Dengan demikian hasil pemeriksaan bisa langsung diakses secara digital dan berkelanjutan.

Menag berharap, program CKG tak berhenti sebagai kegiatan sesaat, namun menjadi bagian dari gerakan nasional membangun kesadaran kesehatan yang berakar pada nilai-nilai keagamaan.

"Dengan menjangkau anak-anak dari berbagai agama dan latar belakang, program ini menjadi simbol nyata bahwa membangun masa depan bangsa harus dimulai dari kerja bersama lintas iman, lintas institusi, dan lintas generasi," pungkash Menag.

### BPJPH Resmi Lepas dari Kementerian Agama, Menag: Makin Hebat Anak, Makin Bangga Orang Tua

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang selama ini menjadi bagian dari Kementerian Agama (Kemenag), kini tidak lagi bersama. Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar secara resmi telah me-

lepas BPJPH dari Kemenag, yang ditandai dengan Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Likuidasi Entitas Akuntansi, yang dilaksanakan di kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta.

Berita acara tersebut ditandatangani oleh Menag Nasaruddin Umar dan Kepala BPJPH, Haikal Hassan. Berpisahannya BPJPH dengan Kemenag merupakan bagian dari transformasi kelembagaan dan penataan pemerintahan pasca-pembentukan Kabinet Merah Putih. BPJPH kini menjadi lembaga non kementerian.

Menteri Agama menyebut, pelepasan BPJPH ini, tidak berarti kerja sama antara BPJPH dengan Kementerian Agama terputus. Sebaliknya, sinergi dua pihak terus terjalin erat dan tidak akan berakhir.

"Semakin hebat seorang anak, semakin melampaui orang tuanya maka semakin bangga orang tua itu dan semakin bersyukur kita kepada Allah," kata Menag di Ja-

berhubungan sampai kapan pun adalah Kemenag, karena hubungan ini erat dan satu-satunya yang terdekat dengan BPJPH," kata Haikal Hassan tegas.

Haikal menambahkan, bahwa BPJPH akan bersama-sama berusaha untuk menciptakan industri halal dari Aceh sampai Papua.

"Kami berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, SDM dan sistem internal dalam mendorong ekosistem halal nasional yang inklusif, kompetitif secara global," tambah kepala BP JPH yang akrab disapa Babe Haikal ini.

### Menag dan Kepala BPJPH Tandatangani Serah Terima Aset

Setelah Kemenag dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) resmi berpisah, kini pihak Kemenag dan BPJPH menandatangani berita acara serah terima aset dan kewajiban sebagai bagian dari

gan negara yang akuntabel, transparan, dan sesuai prinsip good governance," kata Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan.

Kaban Haikal menyebut, proses ini telah melalui tahapan panjang dengan pendampingan intensif dari Kementerian Keuangan. Ia menargetkan laporan keuangan BPJPH dan Kemenag, yang telah menggunakan data pasca-likuidasi disampaikan ke Menteri Keuangan pada 31 Juli 2025.

"Proses ini telah melalui tahapan yang panjang dan melibatkan koordinasi intensif sekali, baik di Kementerian Agama maupun dengan arahan dan pendampingan dari Kementerian Keuangan," katanya.

BPJPH sendiri, kini berstatus sebagai lembaga pemerintah non-kementerian (LPNK) dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, namun tetap menjalin relasi dekat dengan Kemenag. Haikal mengibaratkan, relasi itu seperti anak dan orang tua.

"Kami tidak mau menjadi badan yang durhaka sama orang tua. Tidak akan pernah terlepas antara hubungan orang tua dan anak itu," lanjut Kaban Haikal

Sementara itu, Menag menyampaikan dukungan penuh pada kemandirian BPJPH. Ia pun mengapresiasi capaian BPJPH yang dinilai telah lebih tinggi dibandingkan saat masih berada di bawah langsung Kemenag.

Menag menyampaikan, bahwa melepaskan BPJPH bukan berarti memutuskan hubungan, tetapi merestui kemandirian lembaga itu.

"Kami tahu pencapaian produk halal ketika berada dalam Kementerian Agama. Tapi anak ini sekarang mandiri, dan luar biasa. Kami bangga karena anak kami lebih berprestasi dari orang tuanya sendiri," kata Menag.

Menag juga berharap, semangat kolaborasi tetap menjadi fondasi. "Kesulitan anak adalah kesulitan kami, kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan kami," pungkaskan Menag.

### BPJPH Mandiri, Apa Fungsi Direktorat Jaminan Produk Halal Kemenag?

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah resmi terpisah dari Kementerian Agama. Sementara dalam Peraturan Menteri Agama No 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, terdapat satu satuan kerja setingkat Eselon II di bawah naungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bernama Direktorat Jaminan Produk Halal (JPH).

Lalu, apa fungsi dari satuan kerja ini? Direktur Jaminan Produk Halal, Muhammad Fuad Nasar menjelaskan, bahwa satuan kerja yang dia pimpin memainkan peran



Menag, Nasaruddin Umar dan Ketua BPJPH, Haikal Hasan.

karta, Selasa (29/7/2025).

Menag juga menambahkan, bahwa pihaknya sudah mengetahui pencapaian produk halal ketika masih berada dalam Kementerian Agama. Dan ketika diserahkan kemerdekaannya pencapaiannya luar biasa, berprestasi lebih jauh.

Kemenag pun berkomitmen, untuk membuka tangan selebar-lebarnya mana kala dibutuhkan oleh BPJPH.

"Bagi kita sebagai orang tua, itu adalah kepuasan tersendiri ketika mampu memberikan kepuasan terhadap anak. Begitu pun sebaliknya ketika orang tua meminta tolong kepada anak," imbuh Menag.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala BPJPH, Haikal Hassan.

"Meski pun kita berdiri sendiri, satu-satunya instansi yang kita tidak akan berhenti

proses likuidasi satuan kerja BPJPH, menyusul transformasi kelembagaan pasca pembentukan Kabinet Merah Putih.

Penandatanganan dilakukan oleh Menag Nasaruddin Umar dan Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan, di Kantor Kementerian Agama Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (29/7/2025).

Serah terima ini mencakup tiga hal utama; Aset yang selama ini dicatat atas nama satuan kerja BPJPH, namun tak ada dalam sistem akuntansi Kementerian Agama, kewajiban yang terkait dalam kegiatan operasional dan pelaksanaan anggaran BPJPH sebelum transisi, dan saldo kas, utang, piutang berbasis akuntansi aktual.

"Ini bukan semata-mata penyerahan administratif, tapi bentuk nyata dari komitmen bersama mewujudkan tata kelola keuan-

strategis dalam memperkuat ekosistem halal nasional.

Fungsi utama Direktorat ini bukan pada aspek teknis sertifikasi, melainkan pada penguatan nilai, kebijakan, dan kesadaran publik.

“Peran Direktorat JPH adalah untuk memberi dukungan dan kolaborasi dalam penguatan ekosistem halal di Indonesia dari sisi tugas pokok Kementerian Agama sebagai kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang agama. Kita mengokohkan fondasi pemikiran dan arah kebijakan, bukan teknis labelisasi halal,” kata Muhammad Fuad Nasar, di Jakarta, seperti dilansir dari Kemenag, Selasa (29/7/2025).

Pemisahan fungsi antara Direktorat JPH dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) menjadi semakin jelas, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 33 Tahun 2024.

Regulasi ini menata ulang organisasi dan tata kerja Kemenag secara lebih sistematis dan proporsional khususnya berkenaan dengan jaminan produk halal.

Kata Fuad, Direktorat JPH, difokuskan pada perumusan kebijakan strategis, evaluasi dan pemantauan pelaksanaan jaminan produk halal, serta administrasi Direktorat dan kerja sama antar-pemangku kepentingan.

“Terkait pelaksanaan teknis, mulai dari pendaftaran, verifikasi, penerbitan sertifikat halal, hingga pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) serta Auditor Halal, kewenangan utamanya ada pada BPJPH,” jelas Fuad.

Fungsi perumusan kebijakan ini meliputi, kebijakan teknis di bidang jaminan produk halal, termasuk menyusun pedoman, strategi nasional, serta pengembangan model edukasi halal berbasis nilai-nilai keagamaan.

Sementara fungsi pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan menjadi krusial dalam memastikan bahwa proses jaminan produk halal yang dilakukan oleh para pelaksana teknis, termasuk BPJPH dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), berjalan sesuai prinsip, prosedur, dan tujuan penyelenggaraan halal secara nasional.

“Melalui mekanisme ini, kami mengidentifikasi tantangan, kekurangan, maupun praktik baik dalam implementasi jaminan produk halal. Temuan-temuan di lapangan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan berkala,” ungkap Fuad.

Fuad menambahkan, pada fungsi pelaksanaan administrasi, mencakup pengelolaan keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan anggaran, pengarsipan doku-

men, serta pelaporan kinerja dan pertanggungjawaban kepada pimpinan.

### Antara Fungsi Agama dan Ekonomi

Saat ini, dunia berlomba-lomba menyambut tren halal sebagai komoditas ekonomi, sebaliknya, Indonesia justru memilih jalur yang berbeda, yaitu menjadikan halal bukan hanya label, melainkan gaya hidup (lifestyle) yang menyatu dengan nilai-nilai agama dan kemaslahatan.

Fuad mengatakan, bahwa isu halal tidak bisa hanya dibaca dalam kerangka ekonomi dan perdagangan semata. Direktorat JPH memikul tanggung jawab menjaga keseimbangan antara dimensi agama dan nilai ekonomi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di negara kita yang berdasarkan Pancasila.

Menurutnya, halal tidak sekadar isu agama, tapi juga isu ekonomi, dan halal tidak sekadar isu ekonomi, tapi tak dapat dipisah-

“Sebagai Direktorat yang baru, JPH menghadapi tantangan untuk dikenal luas di tengah masyarakat dan memberi manfaat serta berdampak. Maka, salah satu upaya yang tengah kami tempuh adalah melakukan inovasi branding dan memperkenalkan halal sebagai gaya hidup yang mudah, menyenangkan, dan menyenangkan,” ungkapnya.

Menurutnya, langkah ini selaras dengan arahan Menag Nasaruddin Umar, yang beberapa kali menyampaikan bahwa jaminan halal perlu dirancang menjadi bagian dari pola hidup masyarakat, bukan sekadar label dan administratif.

Menariknya, Fuad juga mengungkapkan bahwa jaminan produk halal saat ini telah menjadi instrumen diplomasi global. Banyak negara mayoritas non-muslim, kini justru sangat serius mengelola pasar halal sebagai peluang ekonomi yang menjanjikan.

Meski begitu, Fuad mengatakan, Indone-



**BPJPH Mandiri-Muh Fuad Nasar-Direktur JPH.**

kan dari kesadaran beragama.

“Perspektif yang dibangun adalah isu halal adalah bagian dari tren global ekonomi, dan sekaligus memiliki keunikan, karena bersumber dari nilai agama. Halal itu memberi ketenangan, kepastian hukum, dan perlindungan hak konsumen. Kami menggarisbawahi yang disampaikan Kepala BPJPH, Pak Ahmad Haikal Hasan, halal itu pasti baik, sehat dan bersih, serta Halal Indonesia untuk masyarakat dunia.” ujarnya menjelang.

Lebih lanjut, Fuad mengatakan, bahwa pendekatan ini, maka Direktorat JPH menempatkan diri sebagai penjaga nilai, melampaui sekadar birokrasi. Fungsi halal, tidak hanya hadir di kemasan produk, tetapi di dalam keyakinan masyarakat bahwa apa yang mereka konsumsi membawa keberkahan.

sia tidak boleh kehilangan arah: fondasi halal di negeri ini harus tetap berbasis pada nilai-nilai keagamaan dan spiritualitas sebagai pandangan hidup masyarakat.

“Kita harus tetap menjaga ruh atau spirit halal ini, agar tidak tercerabut dari akarnya,” ujar Fuad.

Fuad menambahkan, salah satu pendekatan inovatif yang tengah dirancang Direktorat JPH adalah memperluas sasaran program. Tidak hanya menyasar pelaku usaha besar dan menengah, Direktorat ini juga menargetkan subsistem kecil seperti sekolah, pesantren, dan perguruan tinggi sebagai ekosistem awal edukasi halal.

“Kami ingin JPH memiliki fondasi kuat hingga ke daerah. Edukasi halal harus menjangkau semua lapisan, termasuk generasi muda. Karena dari situlah nilai ini akan tertanam,” tegasnya. ♦



## Sekjen Kemenag: ASN KEMENTERIAN AGAMA HARUS JADI TELADAN

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama (Kemenag), Kamaruddin Amin, mengatakan bahwa Keberagamaan harus memberikan dampak nyata bagi kehidupan masyarakat.

**S**ekjen Kemenag juga mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kemenag untuk menjadi teladan dalam kehidupan beragama, sekaligus penggerak harmoni di tengah masyarakat.

"Beragama tidak cukup hanya shalat, puasa, atau berdoa di ruang sunyi. Agama harus hadir di ruang publik, memainkan peran positif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. ASN Kemenag harus jadi teladan untuk wujudkan hal ini," kata Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin, saat memberikan pembinaan ASN Kemenag di Aceh, seperti dilansir dari laman Kemenag, Sabtu (9/8/2025).

Kamaruddin menambahkan, peran agama di Indonesia harus konstruktif, menyejukkan, dan membawa ketenteraman. Menurutnya, refleksi iman sejati adalah ketika kehadiran kita membawa kedamaian,

bukan keresahan.

Lebih lanjut, Kamaruddin juga mengatakan, meskipun Indonesia bukan negara agama, kehidupan berbangsa tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai religius. Karena itu, ASN Kemenag memegang peran strategis dalam menjaga iman dan membina umat. Ia pun berharap seluruh ASN Kemenag dapat menjadi teladan dalam praktik-praktik keagamaan yang dianutnya.

"Pejabat Kemenag yang beragama muslim misalnya, idealnya itu rajin ke masjid, bisa berceramah, membina majelis taklim, dan mendampingi masyarakat. Inilah yang membedakan Kemenag dengan instansi lain. Kita ini guardian of the faith, penjaga keberagamaan umat," ungkap Kamaruddin.

Sekjen Kemenag tersebut, juga mengingatkan akan pentingnya mempromosikan kedamaian dan saling menghormati

antarumat beragama. Perbedaan keyakinan secara teologis, katanya, tidak boleh menjadi alasan untuk mendiskriminasi atau mengucilkan orang lain.

"Semua manusia adalah makhluk Tuhan yang harus kita cintai dan hormati. Tidak pantas kita meminggirkan orang lain hanya karena berbeda keyakinan," ungkapnya.

### **Sekjen Kemenag Lantik Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PW ISNU) Provinsi Aceh**

Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag), menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan memperkuat ketahanan sosial bangsa.

Hal tersebut disampaikan Kamaruddin Amin, saat melantik pengurus Pimpinan Wilayah Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama

(PW ISNU) Provinsi Aceh, masa khidmat 2024–2029 dan Pimpinan Cabang ISNU se-Aceh periode 2025–2029 di Aula Serbaguna UIN Sulthan Nahrasyah, Lhokseumawe, Aceh.

“NU, Muhammadiyah, dan ormas keagamaan lainnya telah menjadi perekat sosial di tengah kemajemukan. Tanpa mereka, keragaman kita akan lebih rentan terhadap perpecahan,” kata Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin, Jumat (8/8/2025).

Kamaruddin menambahkan bahwa organisasi kemasyarakatan keagamaan merupakan bagian penting dari infrastruktur sosial Indonesia yang paling kokoh dalam merawat keragaman. Sekjen pun mendorong ISNU untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah di semua tingkatan.

Menurut Kamaruddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum PP ISNU, potensi keilmuan yang dimiliki para sarjana NU dapat diberdayakan untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Kamaruddin juga menyoroti persoalan strategis yang memengaruhi ketahanan keluarga, seperti stunting, kemiskinan, dan perceraian.

Berdasarkan data, sekitar 17–18 persen dari lima juta bayi yang lahir setiap tahun mengalami stunting.

“Jika masalah ini tidak kita tangani bersama, sulit membayangkan Indonesia bisa menjadi negara maju,” ungkap Kamaruddin.

Sementara itu, Ketua PW ISNU Aceh, Ismail Fahmi Arrauf Nasution menyatakan, komitmen pihaknya menjadikan ISNU sebagai kekuatan moral dan intelektual di Aceh.

“Kita ingin mengabdikan, berhikmah, dan menemukan versi terbaik dari diri kita melalui pengabdian,” katanya.

Pelantikan ini kemudian dirangkaikan dengan Madrasah Kader ISNU Aceh yang berlangsung pada 8 hingga 10 Agustus 2025. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari PP ISNU dan pejabat pemerintah pusat, di antaranya Sekjen PP ISNU, Wardi Taufik; Dewan Syariah PBNU, Endin AJ Soefihara; Dewan Ahli PP ISNU, Muhamad Koderi; Asisten Deputi Kemenko PM, Amin Mudzakkir; serta Bendahara PP ISNU, Muhamad Fakhry Rofiqy.

Madrasah Kader tahun ini mengangkat tema Membangun Peradaban, Meneguhkan Ilmu, Mengabdikan Umat dan diikuti sekitar 150 peserta. Ketua Panitia Muazinah, berharap program ini menjadi ruang kaderisasi ideologis dan intelektual bagi sarjana muda Nahdliyyin.

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan

Gubernur Aceh, Wali Kota Lhokseumawe, unsur Forkopimda, pimpinan perguruan tinggi, perbankan syariah, dan tokoh masyarakat.

### KUA Harus Jadi Garda Terdepan Ketahanan Keluarga

Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan keluarga. Tugas penghulu, tidak berhenti pada prosesi akad nikah semata, tetapi juga mencakup pembinaan keluarga agar tangguh, harmonis, dan berdaya.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Sekjen Kemenag), Kamaruddin Amin, saat memberikan pembinaan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kanwil Kemenag

Sekjen Kemenag, Kamaruddin Amin di Banda Aceh, seperti dilansir dari Kemenag, Sabtu (9/8/2025).

Sekjen Kemenag menekankan bahwa KUA harus aktif mengantisipasi persoalan yang mengancam ketahanan keluarga, seperti tingginya angka perceraian dan stunting.

“Penghulu harus membina calon pengantin agar menjadi orang tua yang berkualitas,” tambahnya.

Lebih lanjut Sekjen Kemenag mengatakan, bahwa Kemenag memegang peran vital dalam membangun keluarga Indonesia yang religius, harmonis, dan berkontribusi positif bagi bangsa. Karena itulah, dirinya mengajak seluruh pejabat dan ASN Kemenag, menjadi pribadi yang berkualitas, berdampak, dan dirindukan



Provinsi Aceh.

“Ketahanan nasional tidak akan tercapai jika ketahanan keluarga rapuh. Keluarga adalah entitas terkecil bangsa. Kalau keluarga kuat, negara juga akan kuat,” kata

masyarakat.

“Jadilah pejabat yang membawa kedamaian, ketenteraman, dan keberkahan bagi umat, bangsa, dan negara,” imbuhan Sekjen Kemenag. ♦



## BERIKAN LAYANAN KESEHATAN GRATIS DI SEKOLAH

Program Bantuan Sayang Anak atau Basanak yang diluncurkan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin selaras dengan kebijakan nasional Asta Cita untuk meningkatkan kesehatan pelajar.

upaya mendukung realisasi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) serta sejalan dengan program unggulan daerah, Basanak.

Di setiap sekolah, Bupati Toha meninjau langsung ruang pemeriksaan kesehatan dan imunisasi. Ia menegaskan bahwa program PKG merupakan kebijakan nasional yang mendukung delapan misi Asta Cita kepemimpinan Presiden terpilih 2024-2029.

"Pemeriksaan kesehatan gratis ini menjadi salah satu kegiatan utama dalam program Basanak untuk memastikan seluruh siswa di Kabupaten Musi Banyuasin mendapat pe-

mantauan kesehatan secara rutin," ujarnya.

PKG sekolah menasar anak usia 7 hingga 17 tahun, baik laki-laki maupun perempuan.

"Pemeriksaan bertujuan mengetahui kondisi kesehatan peserta didik serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini," imbuhnya.

Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muba, Drs Syafaruddin MSi, menambahkan bahwa pada tahun 2025 pemeriksaan ini akan dilakukan terhadap 88.434 siswa SD, 36.289 siswa SMP/MTs,

Untuk melihat sejauh mana perkembangan Program Basanak ini Bupati Musi Banyuasin (Muba) H M Toha Tohet bersama Ketua TP PKK Muba Hj Patimah Toha, meninjau pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di SMP Negeri 6 Sekayu dan SMP Negeri 1 Sekayu.

Kegiatan ini merupakan bagian dari



dan 30.262 siswa SMA/SMK/MAN, termasuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan pondok pesantren.

Selain pemeriksaan kesehatan, kegiatan ini bertepatan dengan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang berlangsung sepanjang Agustus. Salah satu program terbaru dalam BIAS adalah pemberian imunisasi HPV khusus bagi siswi kelas IX SMP untuk mencegah kanker serviks.

"Harapannya, anak-anak kita tumbuh sehat, cerdas, dan siap meraih masa depan dengan penuh semangat," pungkasnya.

### Gencarkan Gerakan Pangan Murah

Selain Program Basanak, Pemkab Muba juga konsisten melanjutkan beberapa program lainnya. Saat menghadapi potensi lonjakan harga pangan, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi.

Kegiatan ini dibuka secara resmi dibuka Wakil Bupati Muba Rohman didampingi kepala OPD, dan perwakilan Forkopimda di halaman kantor Dinas Ketahanan Pangan.

Kegiatan yang digelar atas kerja sama Dinas Ketahanan Pangan Muba dan Perum Bulog Kanwil Sumsel-Babel ini merupakan bagian dari upaya konkret pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga pangan di tengah potensi lonjakan harga sejumlah komoditas pokok, khususnya beras.

"Kesiapan dan respons cepat pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menghadapi gejala inflasi 2025. Maka dari itu, sinergi lintas sektor, terutama TPID dengan berbagai pihak, menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan harga, distribusi, dan ketersediaan bahan pokok," ujar Wabup Rohman.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen GPM sebagai alternatif memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

GPM kali ini menyediakan 1.600 paket bahan pokok, masing-masing berisi beras SPHP 5 kg dan minyak goreng 1 liter, dengan harga Rp75.000 per paket lebih rendah dari harga pasar.

Bahan pangan tersebut disuplai langsung oleh Bulog Kanwil Sumsel-Babel dan difasilitasi oleh Pemkab Muba melalui Dinas Ketahanan Pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muba Ali Badri, mengatakan bahwa GPM menjadi langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi

daerah.

"Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau, serta menjaga agar pasokan tetap stabil. Ini adalah bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP)," ungkapnya.

Alibadri juga menyinggung peran penting dukungan dari pihak ketiga. Tahun sebelumnya, kegiatan GPM mendapat subsidi dana CSR dari PT Petro Muba, sehingga

harga jual ke masyarakat bisa ditekan lebih murah.

Untuk itu, ia mengajak Bank BRI, Bank Sumsel Babel, Bank Mandiri, dan PT Petro Muba untuk kembali berpartisipasi melalui program CSR di pelaksanaan GPM mendatang.

"Dengan adanya dukungan subsidi CSR, harga bisa lebih murah dan masyarakat makin terbantu. Kami sangat berharap sinergi ini bisa terus berlanjut," tandasnya. ♦



# SATU KOMANDO WUJUDKAN PERUBAHAN DAN PELAYANAN LEBIH BAIK

Bupati Musi Banyuasin (Muba) H M Toha SH berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, solid, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hal ini disampaikan saat memimpin Rapat Staf Jajaran Pemerintah Kabupaten Muba Tahun 2025 bersama Wakil Bupati Kyai Rohman.

Dalam arahnya Bupati Toha mengatakan bahwa masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin menaruh harapan besar pada perubahan, terutama dalam layanan publik.

"Kita dipantau 24 jam. Karena itu, kita harus melakukan perubahan. Ada 24 program yang telah disusun bersama wakil bupati. Jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, insyaallah masyarakat akan memahami arah pembangunan kita," kata Toha.

Ia menekankan bahwa pemerintahan yang bersih akan memupuk kepercayaan warga.

"Kita bangun pemerintahan yang bersih, masyarakat percaya dengan kita. Dengan

kompakan menjadi kunci dalam mengambil kebijakan strategis.

"Kalau kita tidak kompak, sulit mengambil kebijakan. Kedepan kita minta satu komando untuk mensejahterakan masyarakat," tegasnya.

Selain itu, Bupati mengajak seluruh perangkat daerah memanfaatkan waktu yang tersisa di tahun anggaran dengan optimal, menjaga etika, moral, serta memperkuat rasa memiliki terhadap Muba.

"Sisa hidup saya, saya persembahkan untuk berbuat yang terbaik bagi masyarakat Muba," tuturnya.

Toha juga mengingatkan pentingnya persiapan menghadapi sejumlah agenda besar pada paruh kedua tahun ini, seperti



potensi sumber daya alam yang melimpah, dari migas hingga perkebunan, saya yakin dengan hati yang tulus kita bisa membawa daerah ini lebih maju dan mensejahterakan masyarakat," ujarnya.

Ia meminta seluruh jajaran bekerja dalam satu komando untuk mempercepat pembangunan dan penurunan angka kemiskinan. Ia menegaskan bahwa ke-

peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, HUT Kabupaten Muba, Pekan Olahraga Provinsi (Porprov), dan Pekan Paralimpik Provinsi (Peparprov) Sumsel.

"Ini kekuatan kita untuk kebaikan masyarakat. Mari sama-sama kita bangun Muba ke depan, agar lebih tertata, maju, dan dikenal luas lewat prestasi," tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama Wakil

Bupati Muba Kyai Rohman mengingatkan pentingnya penyesuaian program dengan visi-misi kepemimpinan periode 2025–2030. Ia menyoroti perlunya prioritas pada penanggulangan bencana, perbaikan infrastruktur desa, rehabilitasi sekolah yang tak layak, serta peningkatan kebersihan dan fasilitas pendidikan.

“Program pengadaan fasilitas publik, seperti ambulans dan armada pengangkutan sampah, perlu mendapat perhatian lebih. Kita ingin masyarakat yang datang ke Muba merasakan kesan positif sejak awal,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Muba, Mursalin dalam laporannya menyebutkan realisasi fisik APBD 2025 per 5 Agustus telah mencapai 50,35 persen, sedangkan penyerapan keuangan berada di angka 45,25 persen.

“Dengan capaian ini kita yakin dapat memaksimalkan penyerapan anggaran, karena lebih baik dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun sebelumnya,” pungkash Mursalin.

### Minta Kompak Dukung Program Muba Maju Lebih Cepat

Setelah sebelumnya mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah, Bupati Musi Banyuasin (Muba) HM Toha Tohet juga menggelar pertemuan dengan seluruh camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muba.

Dalam forum tersebut, masing-masing camat diminta memaparkan program kerja dan isu strategis di wilayahnya.

Seperti disampaikan, Camat Sekayu, Edy Haryanto yang mengungkapkan pihaknya siap mendukung penuh visi-misi Bupati dan Wakil Bupati dalam mewujudkan Muba Maju Lebih Cepat.

“Sekayu memiliki 10 desa dan 4 kelurahan. Kami siap mendukung program pembangunan sesuai visi-misi Bupati dan Wakil Bupati. Saat ini, persoalan yang menonjol di masyarakat antara lain kemiskinan, permukiman di bantaran Sungai Musi yang rawan abrasi, serta kebutuhan akan program bedah rumah,” ujarnya.

Camat Lawang Wetan, Yusfarizal Febriansyah menekankan pentingnya membuka lapangan kerja dan membangun sarana publik.

“Lawang Wetan terdiri dari 15 desa. Prinsipnya, kami siap mendukung program Pak Bupati. Usulan dari kepala desa kami antara lain pembukaan lapangan kerja melalui kegiatan padat karya atau swakelola, pembangunan jalan setapak, pagar sekolah, WC, dan program bedah rumah,” paparnya.



Sementara itu, Camat Babat Toman, Heru Kharisma menyampaikan bahwa wilayahnya memiliki tantangan khusus terkait permukiman di tepi sungai dan pengelolaan sampah.

Babat Toman terdiri dari 12 desa dan 2 kelurahan. Hampir semua desa memiliki rumah di bantaran sungai, sehingga perlu perhatian khusus. Masyarakat juga menyoroti aktivitas tambang pasir yang izinya dikeluarkan provinsi karena dianggap mempercepat penggerusan sungai.

“Untuk pengelolaan sampah, kami mengusulkan penambahan mobil pengangkut, alat berat, dan pengembangan fasilitas daur ulang,” jelasnya.

Bupati Toha Tohet dalam arahannya menegaskan pentingnya kebersamaan seluruh jajaran dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Alhamdulillah, hampir enam bulan sejak

dilantik, saya selalu berpegang pada asas adat istiadat dan gotong royong. Masyarakat Muba sangat mengharapkan adanya perubahan. Ke depan, mari kita buktikan bahwa Muba sekarang dan seterusnya akan berbeda dari sebelumnya,” tegasnya.

Ia optimistis, jika seluruh camat bersatu mendukung program pembangunan, maka angka kemiskinan dapat ditekan dan visi Muba Maju Lebih Cepat akan terwujud.

“Kita harus satu suara, kompak mendukung program pembangunan. Dengan niat ikhlas, insyaallah Muba akan maju dan masyarakatnya sejahtera. Saya butuh dukungan penuh dari para camat untuk bersama-sama mewujudkan ini,” ujarnya.

Menutup pertemuan tersebut Toha Tohet menyampaikan pesan singkat namun tegas. “Kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita solid, dan bekerja dengan tulus untuk kemajuan Muba,” pungkashnya. ♦



## LIBATKAN MASYARAKAT MERIAHKAN HUT KE 80 KEMERDEKAAN RI

Ratusan masyarakat Kabupaten Musi Banyuasin beramai-ramai mendatangi Taman Air depan Rumah Dinas Bupati Muba untuk menyaksikan lomba panjat pinang dalam rangka memeriahkan HUT ke-80 Republik Indonesia.

Suasana di lokasi tampak sorak sorai dan gelak tawa ratusan penonton yang sangat antusias menyaksikan lomba panjat pinang memacu semangat para peserta untuk segera mencapai puncak batang pinang dan menurunkan berbagai hadiah yang telah disediakan panitia.

Dikatakan Bupati Muba HM Toha Tohet SH, dilaksanakannya perlombaan panjat pinang ini, diharapkan dapat meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara kita untuk mencapai sesuatu yang menjadi tujuan bersama.

"Perlombaan ini selain sebagai wahana untuk memeriahkan HUT RI ke-80, juga diharapkan dapat menjadi tolak ukur serta melatih diri untuk meningkatkan sportifitas dalam berlomba.

Berlombalah dengan penuh semangat, tunjukkan semua kemampuan yang dimiliki, dengan tetap menjaga sportifitas. Saya begitu semangat untuk menyaksikan perlombaan ini. Bahkan saya ingin menambahkan hadiah di setiap pohonnya satu juta rupiah," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Kegiatan Evy Aprianti menjelaskan, pohon pinang yang disediakan sebanyak 5 pohon yakni satu pohon untuk kategori anak-anak, 3

batang pohon untuk kategori dewasa dan 1 batang pohon untuk kategori khusus.

Dalam penyelenggaraan panjat pinang ini PT Petro Muba sebagai ketua panitia serta didampingi dan disupport Setwan, PDAM Tirta Randik, Disdagperin, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas TPHP Disnakertrans, Dinas Lingkungan Hidup dan BCA.

"Hadiahnya ada sepeda, speaker aktif, dispenser, magic com, kipas angin, setrika, mie goreng dan mie kuah, payung, gantungan baju, ember, keset kaki dan gayung," tandasnya.

### Berikan Bantuan Untuk Veteran

Masih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 Tahun 2025. Setelah Bupati Musi Banyuasin HM Toha Tohet SH mengikuti mengikuti upacara bersama OPD dan Forkopimda Muba. Dilanjutkan dengan ramah tamah dan tatap muka bersama pejuang, LVRI dan keluarga pejuang.

Dalam suasana yang penuh dengan kehangatan, Bupati Muba H M Toha Tohet SH menyampaikan, penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya atas jasa para pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa. Ia

menegaskan, generasi penerus memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melanjutkan semangat tersebut.

"Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan luar biasa dari para pejuang. Generasi sekarang memiliki kewajiban untuk menjaga, mengisi, dan mewariskan semangat itu," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama dilakukan, penyerahan bantuan kepada Veteran LVRI dan janda Veteran oleh Bupati Musi

Banyuasin. Kemudian penyerahan bantuan untuk para UMKM dan pemberian piagam penghargaan kepada penyuluh ASN berprestasi, petani berprestasi, gapoktan berprestasi.

**Serahkan SK Remisi pada Warga Binaan**

Bupati Musi Banyuasin H M Toha Tohet SH didampingi Wakil Bupati Kyai Rohman menyerahkan Surat Keputusan (SK) Remisi Umum dan Pengurangan Masa Pidana, ter-

masuk remisi khusus Asta Dasawarsa bagi warga binaan.

Acara penyerahan remisi ini turut dihadiri jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) serta kepala perangkat daerah.

Kepala Lapas Kelas IIB Sekayu, Aris Sukaryadi, melaporkan bahwa pada tahun ini jumlah warga binaan mencapai 1.040 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 786 orang diusulkan menerima remisi, 759 orang mendapatkan Remisi Umum I, sementara 16 orang mendapatkan Remisi Umum II, di mana 14 orang di antaranya langsung bebas dan 2 orang lainnya masih harus menjalani subsidi.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Musi Banyuasin yang telah hadir sekaligus menyerahkan secara simbolis SK remisi umum ini. Remisi menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berperilaku baik dan mengikuti pembinaan dengan sungguh-sungguh," tutur Aris.

Sementara Bupati Toha mengingatkan bahwa kemerdekaan yang diraih delapan dekade silam adalah buah dari persatuan seluruh elemen bangsa.

"Delapan puluh tahun silam, para pendiri bangsa berhasil menyatukan keberagaman, meruntuhkan sekat-sekat suku, agama, dan kepentingan pribadi demi meraih satu tujuan bersama: Indonesia Merdeka," ujarnya.

Ia juga menegaskan pesan Presiden Soekarno tentang Jas Merah (Jangan Sekali-sekali Melupakan Sejarah), bahwa kemerdekaan harus terus dijaga dengan semangat persatuan, kedaulatan, dan perjuangan kesejahteraan rakyat.

Pemberian remisi kepada narapidana dan pengurangan masa pidana bagi anak binaan disebut bukan sekadar kebijakan rutin, melainkan penghargaan atas kedisiplinan, prestasi, dan dedikasi warga binaan dalam mengikuti program pembinaan.

"Remisi bukan diberikan begitu saja, melainkan sebagai apresiasi terhadap usaha sungguh-sungguh dari warga binaan dalam menjalani pembinaan. Tujuannya adalah agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal mental, spiritual, dan keterampilan yang lebih baik," kata Toha.

Lanjut, ia berpesan kepada seluruh jajaran pemasyarakatan untuk menjaga integritas dan tidak terlibat dalam praktik menyimpang.

"Jangan cederai prestasi yang sudah kita capai. Tidak ada toleransi bagi praktik peredaran narkoba, pungutan liar, maupun tindak pidana lainnya di dalam Lapas," tegasnya. ♦





# REFORMASI BIROKRASI MULAI DITERAPKAN, MENTERI PANRB TERBITKAN SE NO.6/2025

Setelah bertahun-tahun digaungkan dan disosialisasikan, kini reformasi birokrasi mulai diterapkan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini telah menandatangani Surat Edaran Menteri PANRB No. 6/2025 tentang Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Periode Transisi Tahun 2025.

Surat edaran ini diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan reformasi birokrasi (RB) sementara hingga ditetapkannya dua dokumen utama, yaitu Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045 dan Road Map Reformasi Birokrasi Nasional (RMRBN) 2025-2029.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan, surat edaran ini bertujuan untuk mengisi kekosongan regulasi selama penetapan Peraturan Presiden tentang GDRBN 2025-2045 dan Peraturan Menteri PANRB tentang RMRBN 2025-2029.

Aturan ini juga akan menjadi panduan

sementara instansi pemerintah dalam merumuskan strategi, program, dan kegiatan yang selaras dengan tujuan dan sasaran RB Nasional.

"Selama masa transisi ini, RB harus tetap menjadi motor penggerak reformasi yang berdampak langsung kepada masyarakat, sekaligus menjembatani transformasi kelembagaan menuju birokrasi yang modern dan strategis," ujarnya pada Kick Off Meeting Evaluasi RB, AKIP, dan ZI Tahun 2025, Jumat (1/8/2025).

## TIGA ARAH KEBIJAKAN UTAMA

Pada kesempatan itu, Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Reformasi Birokrasi Agus Uji



Hantara menjelaskan, Surat Edaran Menteri PANRB No. 6/2025 memuat tiga arah kebijakan utama.

Pertama, arah Reformasi Birokrasi Mendukung Visi Indonesia Emas 2045. Reformasi Birokrasi akan difokuskan pada pembangunan birokrasi yang kolaboratif, kapabel, dan berintegritas, serta berbasis pada pelayanan yang berpihak kepada manusia (human-based governance).

Lima sasaran utama RB ditekankan pada birokrasi yang bersih dan akuntabel; birokrasi yang kapabel; pelayanan publik yang prima; efektivitas kelembagaan; serta birokrasi yang adaptif dan inovatif. Kelima sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan birokrasi yang berkontribusi nyata dalam menciptakan Indonesia yang berdaulat, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan.

“Arah kebijakan kedua adalah Agenda Nasional Reformasi Birokrasi 2025–2029. Pelaksanaan RB selama periode 2025–2029 akan mengadopsi prinsip digital governance yang transformatif dan progresif, namun tetap menempatkan manusia sebagai pusat layanan dan tata kelola,” ungkap Uji.

Menurut Uji, agenda ini diturunkan

dari lima sasaran utama RB dan diimplementasikan melalui dua pendekatan besar yakni RB General, sebagai fondasi sistem birokrasi serta RB Tematik, yang secara langsung mendukung pencapaian agenda prioritas nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, dan transformasi layanan dasar (pendidikan dan kesehatan).

Arah kebijakan terakhir adalah Evaluasi RB tahun 2025 akan difokuskan pada pemantauan atas tindak lanjut hasil Evaluasi RB tahun 2024. Langkah ini mencerminkan pendekatan berkelanjutan (continuous improvement), agar pembenahan birokrasi tidak bersifat satu kali, tetapi terstruktur dan berdampak nyata dalam penguatan tata kelola pemerintahan. ♦

**REFORMASI BIROKRASI: APA YANG SUDAH DIHASILKAN?**

Indeks RB 10 tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Tahun	Indeks RB
2014	45.00
2015	52.00
2016	57.00
2017	61.00
2018	65.00
2019	69.00
2020	73.00
2021	77.00
2022	81.00
2023	85.00
2024	89.00
2025	93.00

Capaian: 1) Nilai rata-rata Indeks RB tahun 2024 hanya 74,83 (Lumajang yang dikecualikan). 2) Pada average 91 tahun 2024, ada 100 kota/kabupaten yang mencapai 80 pada Perhitungan Indeks RB Kota.

- 41 IN5 telah dibubarkan dan diintegrasikan pada K/L yang sesuai
- 55.649 struktur organisasi pada 104 K/L, telah disederhanakan dan sebanyak 44.870 jabatan administratif telah dihapus ke jabatan fungsional
- 45 Jabatan Fungsional baru (berdasarkan kearifan), 124 usulan JF baru, sebagai tindak lanjut penguatan struktur
- 97% Kementerian telah memiliki tata kelola SPEE yang baik
- BIROKRASI YANG BERORIENTASI HASIL: Pada tahun 2023–2024, implementasi SAP berhasil mencapai potensi pemborosan APBN/APRD sebesar 420,5 Triliun
- BIROKRASI DENGAN PELAYANAN PRIMA & BEBAS KKN: Terpenuhi 2.124 unit pelayanan prima & anti korupsi, termasuk pada sektor perkuat hukum
- Program RB telah berkontribusi dalam kegiatan STANAS PK
- Integrasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui pemanfaatan 222 Mail Pelayanan Publik (MPP) & 91 MPP Digital di daerah

Deputi RBKUNWAS, Kementerian PANRB

# MENDAGRI WAJIBKAN SELURUH PEMDA DUKUNG PROGRAM STRATEGIS NASIONAL

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah (Pemda), baik provinsi maupun kabupaten-kota, wajib mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN). Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penegasan ini tersebut disampaikan Mendagri saat ia memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dirangkaikan dengan Pembahasan Evaluasi Dukungan Pemda dalam Program 3 Juta Rumah.

Pada rakor yang digelar secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, 22 Juli 2025, Mendagri menekankan pentingnya Pemda memahami perbedaan antara program strategis nasional dan proyek strategis nasional.

"Perlu betul pahami mengenai istilah Program Strategis Nasional dan Proyek Strategis Nasional itu berbeda meskipun disingkatnya kadang-kadang sama," kata Mendagri.

Ia menjelaskan, Proyek Strategis Nasional merupakan proyek infrastruktur yang ditetapkan melalui keputusan atau peraturan presiden, seperti jalan tol, bendungan, kereta cepat, dan kawasan ekonomi khusus.

Sementara itu, Program Strategis Nasional merupakan program unggulan yang tercantum dalam dokumen visi dan misi presiden.

Ditegaskan Mendagri, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, terdapat sanksi bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak melaksanakan program strategis nasional. Karena itu, kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu memperhatikan berbagai program strategis nasional yang telah dicanangkan oleh presiden.



### Ada 12 Program Strategis Nasional

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa ada 12 Program Strategis Nasional yang tertuang dalam visi dan misi Presiden Prabowo Subianto. Program-program tersebut adalah:

1. Makan Bergizi Gratis
2. Program 3 Juta Rumah
3. Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
4. Sekolah Rakyat,
5. Sekolah Unggul Garuda,
6. Rehabilitasi Sekolah
7. Cek Kesehatan Gratis
8. Lumbung Pangan
9. Pembangunan Rumah Sakit Berkualitas
10. Penuntasan Tuberkulosis (TBC)
11. Penanganan Sampah
12. Pembangunan Bendungan dan Irigasi

Terkait Program 3 Juta Rumah per tahun, Mendagri menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menjalin kerja sama lintas kementerian untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).



**Perlu betul pahami mengenai istilah Program Strategis Nasional dan Proyek Strategis Nasional itu berbeda meskipun disingkatnya kadang-kadang sama.**

Kemudahan tersebut antara lain berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi 507 kabupaten/kota yang telah mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan BPHTB dan PBG bagi MBR. Ia juga menyoroti dua daerah yang belum melaksanakannya.

"Saya berterima kasih banyak kepada seluruh kabupaten/kota yang sudah mengeluarkan [Perkada]," tandas Mendagri. ♦



# KEMENTERIAN KOMDIGI WAJIBKAN VERIFIKASI USIA DI PLATFORM DIGITAL

Pemerintah, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan komitmen dalam melindungi anak dari risiko digital melalui pengesahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS).

**D**irektur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komdigi Fifi Aleyda Yahya menyebut PP TUNAS bukan sekadar regulasi, tetapi fondasi kebijakan nasional untuk memastikan keamanan anak di dunia maya.

"Kami mendorong platform digital untuk menyediakan fitur keamanan yang mudah digunakan, termasuk sistem klasifikasi usia dan kontrol orang tua. Ini bukan sekadar fitur tambahan, tapi instrumen utama perlindungan anak," ujarnya.

Dirjen Fifi Aleyda mengemukakan itu di acara "Membangun Keluarga Digital di Era Streaming", hasil kolaborasi Netflix dan ICT Watch, di Jakarta Pusat, Selasa, 5 Agustus 2025.

Melalui PP TUNAS, setiap PSE diwajibkan menyediakan fitur parental control yang efektif, menetapkan privasi tinggi secara default untuk akun anak, serta melarang pelacakan lokasi dan profiling data anak untuk kepentingan komersial.

Dirjen KPM menjelaskan bahwa

pemerintah mengapresiasi langkah platform digital yang telah proaktif menerapkan fitur keamanan anak, seperti yang dilakukan oleh Netflix.

"Fitur seperti parental control dan klasifikasi usia memberi orangtua kendali lebih besar, sekaligus menghadirkan ketenangan bahwa anak-anak menjelajahi ruang digital yang aman," tuturnya.

PP TUNAS lahir di tengah lonjakan ancaman digital terhadap anak-anak Indonesia. Data dari NCMEC mencatat Indonesia sebagai negara keempat dunia dalam kasus pornografi anak.

Sementara UNICEF menyebut 89 persen anak Indonesia mengakses internet rata-rata 5,4 jam per hari, dan hampir separuh terpapar konten seksual.

## Program CKG di Sekolah Memasuki Era Digital

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid memastikan infrastruktur konektivitas jadi fondasi utama pelaksanaan program kesehatan nasional, yang





menyasar lebih dari 53 juta peserta didik di 282.317 sekolah dari Sabang hingga Merauke. Keandalan konektivitas menjadi penting dalam pelaksanaan CKG Sekolah karena seluruh data yang masuk diproses melalui aplikasi secara daring.

"Ketika ini dilakukan secara masif, data-datanya akan luar biasa banyak, sehingga tersedianya konektivitas yang baik menjadi penting," ujarnya saat mengunjungi CKG Sekolah di SMPK Penabur Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Senin (4/8/2025).

Menteri Meutya menegaskan Kemkomdigi terus melakukan monitoring terhadap kualitas koneksi internet di

berbagai daerah yang menjadi lokasi pelaksanaan CKG Sekolah, baik yang terkoneksi melalui fixed broadband ataupun seluler.

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalusia juga menekankan pentingnya dukungan infrastruktur

konektivitas untuk pelaksanaan CKG Sekolah.

Menurut Dirjen Rizka, beberapa daerah memiliki keterbatasan koneksi internet sehingga membutuhkan dukungan dari Kemkomdigi untuk penyediaan infrastruktur konektivitas.

"Kita menggunakan aplikasi untuk menginput seluruh data hasil pemeriksaan ini. Makanya dukungan Komdigi terkait sinyal internet ini sangat penting sekali," tandasnya. ♦



**Kami mendorong platform digital untuk menyediakan fitur keamanan yang mudah digunakan, termasuk sistem klasifikasi usia dan kontrol orang tua. Ini bukan sekadar fitur tambahan, tapi instrumen utama perlindungan anak.**

# PEMBENTUKAN KDM UNTUK MEMBANGUN EKONOMI BERBASIS DESA

Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan secara serentak berdirinya 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDM) di seluruh Indonesia bulan lalu. Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menegaskan, keberadaan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih menjadi program prioritas pembangunan nasional di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto.

“KDM menekankan pembangunan ekonomi berbasis desa dengan semangat gotong royong. Target pendirian 80 ribu Kopdes/Kel Merah Putih di seluruh desa di Indonesia sebagai upaya meningkatkan partisipasi ekonomi desa,” katanya.

Wamenkop Ferry Juliantono mengungkapkan hal itu dalam Kuliah Umum Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Pemerintahan Desa Kabupaten Bogor Tahun 2025, di Institut Pertanian Bogor (IPB), Jawa Barat, Kamis (7/8/2025).

Lebih lanjut dijelaskannya, angka kemiskinan ekstrem di wilayah pedesaan masih tinggi akibat minimnya lapangan kerja dan rendahnya pendapatan. Kondisi ini menyebabkan aliran uang produktif di desa terbatas, serta maraknya praktik rentenir, tengkulak, dan pinjaman online ilegal.

“Kopdes/Kel Merah Putih diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut dengan memperpendek rantai distribusi produk dan jasa yang selama ini terlalu panjang, seperti dalam penyebaran pupuk dan gas LPG 3kg,” katanya.

Soal landasan hukum atau payung hukumnya, Kopdes/Kel Merah Putih berlandaskan pada UUD 1945 Pasal 33 yang menegaskan kedaulatan ekonomi di tangan rakyat. Presiden Prabowo memiliki keinginan besar agar koperasi desa dapat bersaing dengan badan usaha swasta dalam menggerakkan roda ekonomi desa.

Menurut data, banyak anak usia produktif meninggalkan desa sehingga roda ekonomi desa menjadi stagnan. Sehingga, regulasi perbankan telah mengatur agar bank memberikan kredit khusus bagi warga desa melalui Kop-



des/Kel Merah Putih. Pengembangan usaha koperasi ini juga didukung oleh keberadaan tujuh gerai yang menjadi pusat layanan.

"Kopdes/Kel Merah Putih memiliki berbagai fungsi strategis, antara lain menjadi sub-pangkalan agen gas LPG 3kg agar harga lebih terjangkau, penyalur utama pupuk bersubsidi, serta penjual obat-obatan murah melalui apotek desa," katanya.

### **Bidang Usaha Klinik Desa hingga Cold Storage**

KDM atau Kopdes/Kopkel, menurut Wamenkop, bisa mendirikan Klinik Desa sehingga memudahkan akses layanan kesehatan bagi warga, terutama yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan kecamatan.

Ada pula Usaha Simpan Pinjam yang dijalankan Kopdes/Kel Merah Putih juga memberikan kemudahan pinjaman tanpa risiko jeratan pinjaman online dan rentenir.

Fasilitas Cold Storage membantu petani dan nelayan menyimpan hasil panen sehingga mengurangi kerugian akibat gagal panen atau gagal tumpang.

"Kopdes/Kel Merah Putih juga menjadi wadah penyaluran program nasional pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrem," jelasnya.

Meski sudah terbentuk, Kopdes/Kel Merah Putih masih dalam tahap pengembangan teknis operasional agar dapat memberikan keuntungan ekonomi nyata bagi masyarakat desa. Melalui sinergi Kopdes/Kel Merah Putih dan data desa presisi, pemerintah berkomitmen menyelesaikan masalah kemiskinan di desa secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Di kesempatan yang sama, Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Nanik S Deyang menuturkan bahwa data resmi telah menunjukkan penurunan angka garis kemiskinan, karena itu BP Taskin menekankan pentingnya program pemberdayaan masyarakat. Peran Kopdes/Kel Merah Putih juga sangat penting sebagai wadah pelaksanaan program pemberdayaan tersebut.

Selain itu, akademisi dari IPB diharapkan dapat membantu melakukan pembaruan dan verifikasi data kemiskinan secara akurat.

"Data yang selalu diperbarui harus disampaikan kepada pemerintah desa agar distribusi dana APBN tepat sasaran dan tidak terbuang sia-sia," katanya. ♦





# MENGERIKAN! INDONESIA KEDUA TERBANYAK PENDERITA TBC DI DUNIA

Pemerintah Republik Indonesia begitu intens dalam upaya penanggulangan penyakit Tuberkulosis alias TBC. Karena Indonesia sudah menggeser China dan menduduki urutan kedua terbanyak di dunia penderita TBC-nya. Masalah ini perlu penanganan sangat cepat.

**H**al itu terungkap dari penjelasan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Republik Indonesia, Prof. Dante Saksono Harbuwono pada Dies Natalis Ke-71 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, pekan lalu.

Wamenkes mengungkapkan bahwa Indonesia saat ini menempati posisi kedua di dunia dalam jumlah kasus Tuberkulosis (TBC), setelah India dan melampaui China. Posisi ini sebelumnya ditempati oleh China. Namun mereka berhasil menurunkan angka kasus secara signifikan.

Menghadapi kondisi angka penderita TBC sedemikian tinggi tersebut, Pemerintah RI menggalakkan Strategi Quick Win dengan fokus pada identifikasi dini, peningkatan notifikasi kasus, dan pengo-

batan menyeluruh. Langkah ini ditujukan untuk menekan separuh angka kasus TBC nasional hingga tahun 2030.

"Kita menargetkan penurunan 50% kasus TBC pada 2030. Pemerintah optimis target ini bisa dicapai dengan sinergi berbagai pihak," papar Prof. Dante.

Strategi tersebut diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari institusi akademik seperti FKUI.

Saat mengunjungi Puskesmas Kota Ternate (31/7), Prof. Dante menekankan pentingnya deteksi aktif (*\_active case finding\_*) sebagai langkah preventif dalam pengendalian TBC.

"Dari 49 orang yang dilakukan X Yay, ditemukan 3 kasus TBC. Bayangkan jika tidak terdeteksi—mereka bisa menularkan ke sekelilingnya," ujarnya.

Prof. Dante juga menggarisbawahi pentingnya edukasi dan pencegahan penularan di tingkat keluarga, mengingat banyak anggota keluarga yang tidak menyadari risiko penularan TBC dari satu orang ke yang lain.

"Kita ingin memutus mata rantai penularan di rumah tangga dan lingkungan terdekat," jelasnya.

**GRATIS, PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN HINGGA SEMBUH**

Penanggulangan penyakit Tuberkulosis (TBC) di Indonesia ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Pemerintah. Masyarakat harus berpartisipasi, dengan mau memeriksakan diri dan anggota ke-

uarga yang dicurigai tertular/mengidap TBC. Apalagi semua proses pengobatannya hingga benar-benar sembuh, gratis.

Dikemukakan Mamenkes Prof Dante, lebih mudah lagi bagi masyarakat yang daerahnya menjadi sasaran kegiatan Skrining TBC Gratis. Kegiatan ini merupakan bagian dari program mendukung pelaksanaan Program Quick Win Presiden Prabowo Subianto dalam transformasi layanan kesehatan, serta pengabdian masyarakat FKUI.

Upaya percepatan penanganan TBC akan difokuskan di wilayah endemis, termasuk Maluku Utara. Prof. Dante menegaskan bahwa penguatan deteksi dan pengobatan di daerah seperti Ternate

menjadi prioritas.

"Kita harus mulai sekarang agar target 2030 tercapai, bahkan membebaskan Indonesia dari TBC," tegasnya.

Data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa Kota Ternate menyumbang sekitar 50% notifikasi kasus TBC di Provinsi Maluku Utara, menjadikannya wilayah dengan prioritas tinggi dalam penanganan penyakit menular tersebut.

Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Informasi Publik, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Halo Kemenkes melalui hotline 1500-567, SMS 081281562620, atau email kontak@kemkes.go.id. ♦

**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA** **GERMAS** Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

# MENGENAL FAKTA SEPUTAR TBC

Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit infeksi menular yang disebabkan bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang dapat menyerang berbagai organ, terutama paru-paru

**FAKTA SEPUTAR TBC**

- 1 Salah satu dari **10 PENYEBAB KEMATIAN TERBESAR DI DUNIA**
- 2 Penderita TBC dapat pengobatan selama **6 BULAN**
- 3 **SATU ORANG** terinfeksi TBC setiap detik
- 4 Indonesia **NEGARA KEDUA** PENDERITA TBC terbanyak di dunia
- 5 Kuman TBC dapat bertahan di udara bebas **SELAMA 1-2 JAM**
- 6 Menyerang **SEGALA USIA** (15-50 tahun)
- 7 **MENULAR MELALUI UDARA** saat penderita batuk, bersin, atau berbicara

Sumber : Kemenkes RI | Produksi 04-02-2019

Indonesia baik.id | IndonesiaBaik.id | IndonesiaBaikID | @IndonesiaBaikid

# KETUA DPR RI PUAN MAHARANI SKEPTIS DENGAN LARANGAN ROBLOX

## Bukan Larangan yang Dibutuhkan Indonesia Sekarang

Permainan digital Roblox dilarang oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, karena dinilai telah mendatangkan banyak mudharat bagi para pelajar Indonesia. Namun pelarangan ini tidak langsung mendapatkan dukungan kuat oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani. Kendati tidak juga menolaknya.

**A**lih-alih memberikan dukungan, Ketua DPR RI justru melihat permasalahan yang dihadapi Bangsa Indonesia saat ini justru bukan di permainannya, dalam hal ini Roblox. Ia menekankan bahwa mulai dari anak-anak hingga orangtua dan orang dewasa pada umumnya, harus diberi edukasi, yaitu literasi digital.

Puan Maharani menyatakan bahwa langkah Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti dalam melarang permainan digital seperti Roblox perlu dimaknai sebagai bentuk perlindungan terhadap keamanan psikososial anak di ruang digital. Namun, ia mengingatkan kebijakan pelarangan harus disertai strategi literasi digital yang sistemik dan berkelanjutan.

"Masalahnya bukan hanya pada game tertentu seperti Roblox. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membekali anak-anak dengan kemampuan kritis dan proteksi sejak dini di tengah banjir konten digital," kata Puan dalam keterangan persnya, Kamis, 7

Agustus 2025.

"Sehingga memang diperlukan adanya reformasi literasi digital anak di tengah maraknya konten-konten yang seringkali tak cocok bagi anak-anak tapi bisa diakses dengan mudah oleh mereka," kata cucu Bung Karno ini.

Sebelumnya ramai diberitakan, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut Roblox sebagai aplikasi yang berpotensi berbahaya bagi anak-anak. Sebab game tersebut mengandung konten kekerasan yang dapat berdampak pada perilaku mereka di dunia nyata.

Menteri Abdul Mu'ti berpandangan

Namun Puan menegaskan bahwa pelarangan itu tidak sederhana urusannya. Karena yang dibutuhkan Indonesia adalah pendekatan menyeluruh dalam meningkatkan literasi digital anak-anak.

Puan berpandangan larangan terhadap platform atau game digital tertentu perlu diiringi dengan edukasi yang mencakup tiga elemen kunci yakni anak, orang tua, dan tenaga pendidik.

"Anak-anak harus dipahami, bukan sekadar dicegah. Orang tua dan guru pun perlu dibekali dengan kemampuan membimbing anak menghadapi konten digital, bukan hanya mengawasi," tegas Puan.

Mantan Menko PMK itu pun mendorong agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah segera menjalin kemitraan lintas sektor termasuk dengan Komdigi, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Puan menekankan pentingnya sebuah sistem terpadu untuk memberikan perlindungan bagi anak di ruang digital.

"Saya mendorong agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tidak berjalan sendiri. Harus ada kemitraan lintas sektor termasuk dengan Komdigi, KPAI, dan pelaku industri teknologi untuk merancang Pedoman Nasional Perlindungan



peserta didik usia sekolah belum memiliki kapasitas intelektual yang cukup untuk membedakan antara realitas dan simulasi digital dalam game. Anak-anak cenderung meniru apa yang dilihat di games Roblox.

Untuk itu, Kemendikdasmen melarang anak-anak bermain game Roblox karena terdapat unsur kekerasan. Pihak Istana juga sudah meminta Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan evaluasi.

### EDUKASI 3 ELEMEN KUNCI

Ketua DPR RI Puan Maharani tidak secara tegas menyatakan menyetujui ataupun menolak Larangan Roblox yang diberlakukan Mendikdasmen Abdul Mu'ti.



**Masalahnya bukan hanya pada game tertentu seperti Roblox. Tantangan kita hari ini adalah bagaimana membekali anak-anak dengan kemampuan kritis dan proteksi sejak dini di tengah banjir konten digital.**

Anak di Ruang Digital secara komprehensif dan aplikatif," ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan juga menegaskan komitmen DPR RI untuk mendukung upaya tersebut, baik melalui dukungan legislasi maupun penganggaran agar kebijakan perlindungan anak di dunia digital tidak berhenti pada instruksi sektoral semata.

"Jika ruang digital adalah masa depan anak-anak kita, maka negara tidak boleh absen dari tanggung jawab membentuknya. Bukan hanya melarang, tapi mempersiapkan mereka untuk menjadi pengguna digital yang cerdas, kritis, dan aman," katanya. ♦



# ANGGOTA DPR RI SERUKAN MK BIJAK DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN

## Batalkan Putusan MK tentang Pemisahan Pemilu

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dede Yusuf minta Mahkamah Konstitusi (MK) selalu bijak dalam membuat keputusan. Termasuk saat memutuskan gugatan untuk membatalkan putusan MK tentang pemisahan Pemilu.

Karena putusan MK itu dinilai akan melegalkan perpanjangan masa jabatan Anggota DPRD.

**"K**ita kembalikan lagi kepada kebijaksanaan dari MK sendiri dalam melihat dampak keputusan yang dibuat oleh MK. Karena ini bukan hanya pembuat undang-undang saja, tetapi juga masyarakat. Pasti akan berdampak ke masyarakat. Kita tunggu saja kalau begitu bagaimana sikap MK," ujar Dede kepada media, Selasa (5/8/2025).

Dikemukakan Dede Yusuf, Putusan 135/PUU-XXII/2024 mengenai pemisahan pemilu telah menimbulkan polemik. Terlebih lagi putusan tersebut seakan

melegalisasi perpanjangan masa jabatan DPRD. Sebab itu, ia menilai hal yang wajar setiap warga negara menyampaikan pendapatnya mengenai putusan tersebut.

"Ini menimbulkan polemik karena seolah-olah MK melegalisasi DPRD untuk meneruskan jabatan. Atau harus dibuatkan undang-undang baru terkait dengan DPRD sementara. Dan menurut saya setiap warga negara memiliki hak untuk memberikan pandangan ataupun juga sikap," tambahnya.

Diketahui sejumlah orang menga-

jukan gugatan terhadap putusan MK terkait pemisahan pemilu nasional dengan pemilu tingkat daerah ke MK. Mereka meminta MK membatalkan putusan sendiri.

Dalam gugatan tersebut dikatakan bahwa pemisahan pemilu nasional dan daerah dengan jarak 2 - 2,5 tahun malah memicu perpanjangan masa jabatan pejabat di tingkat daerah hasil pemilihan 2024 menjadi 7 tahun. Hal itu dianggap tidak relevan dengan siklus pemilu 5 tahunan.

"Keputusan MK meski didasarkan

pada interpretasi konstitusi namun dapat dilihat sebagai intervensi yudisial yang membentuk kebijakan elektoral,” tegas Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini.

**MK Sering Melampaui Batas dalam Memutus Suatu Perkara**

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menegaskan tidak ada pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurut Adies, UU MK telah direvisi pada periode DPR sebelumnya. Kala itu, dia mengaku menjadi Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU tersebut.

“Undang-Undang MK tidak ada revisi, Kan itu sudah direvisi periode anggota DPR yang lima tahun lalu,” katanya usai sidang paripurna di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari Parlementaria.

Adies mengatakan RUU MK sudah dibahas anggota DPR pada periode 2019-2024. Politikus Golkar ini mengatakan saat itu dirinya merupakan ketua panitia kerja dan proses pembahasan UU MK saat itu memang tinggal tunggu rapat paripurna tingkat II.

“Tapi sampai saat ini belum ada pembicaraan dari pimpinan, kalau ada kan dia di rapat pimpinan kemudian di badan musyawarah kan, tapi belum ada,” katanya.

Wacana revisi UU MK menggelinding di tengah protes dari sejumlah legislator atas putusan mahkamah soal pemisahan pemilu nasional dan lokal. Salah satunya dari anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin.

“(Apa mungkin akan dihidupkan revisi Undang-Undang MK?) Mungkin saja untuk membahas kewenangan,” kata anggota Komisi II fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini di kompleks Parlemen.

Khozin menilai

Mahkamah Konstitusi kerap melampaui batas dalam memutuskan suatu perkara. Dalam konstitusi, pembentuk undang-undang adalah DPR dan pemerintah. Sedangkan, Mahkamah Konstitusi, kata Khozin, adalah penjaga konstitusi. Dia menilai Mahkamah semestinya tidak masuk terlalu jauh ke ruang legislator. “Kalau MK dinilai punya kewenangan untuk memproduksi suatu undang-undang, ya dilegitimasikan saja sekalian. Kira-kira begitu,” kata Khozin.

Selain Khozin, sejumlah legislator mengkritik putusan MK soal pemisahan pemilu. Anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Gerindra, Supriyanto bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi merusak siklus demokrasi Indonesia. Supriyanto menyoroti implikasi jeda waktu imbas putusan tersebut. Menurut dia, pemilihan anggota DPRD

yang tidak lagi berlangsung setiap lima tahun sekali bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 yang mengatur pemilu lima tahunan untuk memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024 yang dibacakan Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo pada Kamis, 26 Juni 2025, mahkamah memutuskan penyelenggaraan pemilu di tingkat nasional terpisah dengan tingkat daerah. Pemilu nasional mencakup pemilu anggota DPR, DPD, dan presiden dan wakil presiden, sementara pemilu lokal terdiri atas pemilu anggota DPRD provinsi/kabupaten/kota serta pemilihan kepala dan wakil kepala daerah. Adapun perkara 135 ini diajukan

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perlu-dem.

Dengan putusan itu, pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai “Pemilu 5 kotak” tidak lagi berlaku untuk Pemilu 2029. MK memutuskan pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. ♦



## HUKUM MENCUKUR ALIS BAGI WANITA BERSUAMI

Setiap wanita pasti selalu ingin tampil cantik kapanpun dan di manapun mereka berada. Karenanya, banyak wanita yang rela melakukan apa saja, demi bisa membuat dirinya tampil cantik dan menarik. Meski untuk itu, ia harus mengeluarkan biaya dalam jumlah besar.

Dan salah satu bagian dari tubuh wanita yang kerap menjadi perhatian untuk mendapatkan wajah cantik adalah bagian alis. Maka tak heran, jika banyak wanita yang mengubah bentuk alisnya, untuk mempercantik diri, baik dengan mengerik ataupun mencukurnya agar terlihat lebih rapi, menarik dan sempurna.

Dan dalam Islam, hukum mencukur alis bagi Wanita, khususnya yang telah bersuami harus mendapat izin suaminya, adalah diperbolehkan. Hal itu dikarenakan, tidak adanya makna keharaman mengerik alis yaitu adanya unsur penipuan (tadlis) terhadap lelaki yang akan meminangnya, serta sudah semestinya isteri mempercantik diri untuk suaminya.

Dilansir dari NU Online, hukum mengerik alis secara menyeluruh telah diputuskan dalam Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) Se-Jawa Madura XXI di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri pada 02-03 Juni 2010.

Keputusan tersebut menyampaikan adanya khilaf atau perbedaan pendapat di kalangan ulama:

1. Pendapat pertama, menurut mayoritas ulama (jumhurul ulama), wanita yang bersuami diperbolehkan mengerik alisnya apabila ada izin dari suami atau ada tanda-tanda (qarinah) yang menunjukkan izinnya.

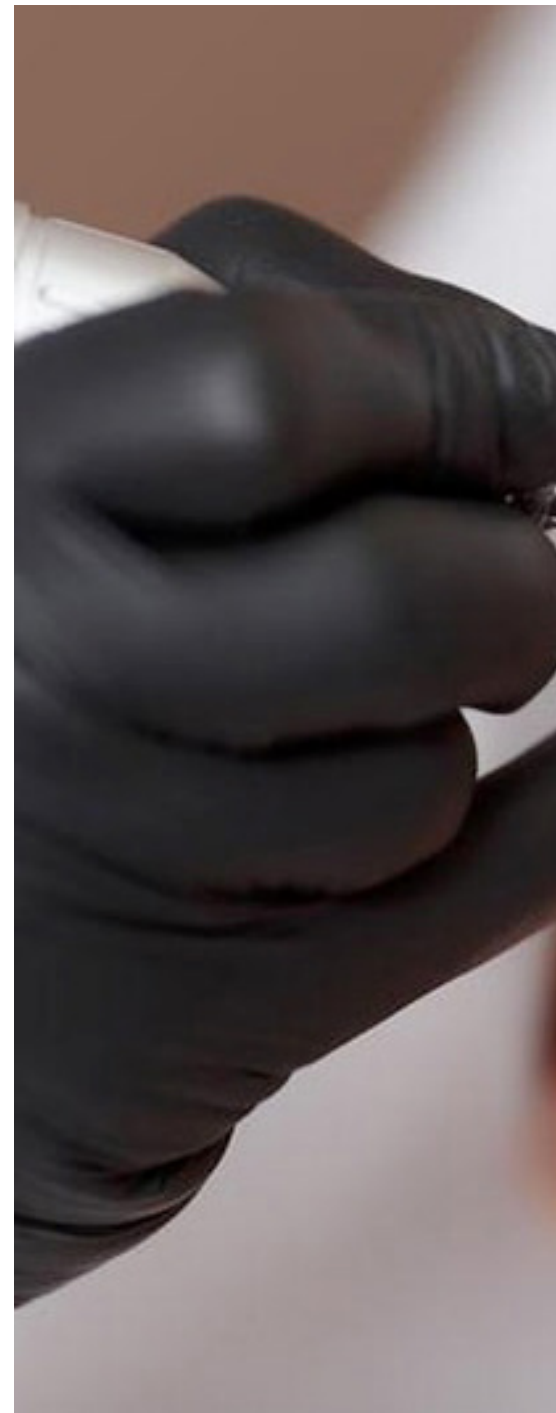
Sedangkan wanita yang tidak bersuami, hukum mengerik alis tidak diperbolehkan. Namun sebagian ulama ada yang membolehkannya apabila diperlukan untuk pengobatan atau alisnya buruk dan menjadi aib baginya.

Akan tetapi dengan syarat tidak ada unsur menipu (tadlis) pada orang lain, semisal saat dilamar ia mengerik alisnya, sehingga tampak lebih cantik dari aslinya.

2. Pendapat kedua, hukum wanita bersuami mengerik alis adalah makruh apabila alisnya panjang. Namun menurut sebagian Ashab Imam Ahmad hukumnya boleh secara mutlak, bahkan Imam Ahmad pernah melakukannya.

Di antara referensi yang digunakan Bahtsul Masail FMPP adalah pendapat dari Al-Khathib As-Syirbini yang menjelaskan, hukum mengerik alis atas izin suami

adalah diperbolehkan. "Tanmish (yang haram) adalah mencabut rambut di wajah dan alis untuk kecantikan, karena tindakan itu merupakan bentuk penipuan. Adapun jika suami atau majikan (budak perempuan dalam konteks zaman per-



budakan) telah memberi izin kepadanya, maka hal itu dibolehkan karena suami mempunyai tujuan agar sang istri berhias untuknya dan ia telah mengizinkannya.”

Referensi berikutnya adalah dari Imam An-Nawawi, yang menghukuminya dengan makruh, tidak sampai haram. An-Nawawi mengutip pendapat ulama Hanabilah yang membolehkannya: “Adapun mengerik atau mencabut alis jika panjang, saya belum melihat pendapat apa pun menurut para Ashab Syafi’i, dan semestinya dimakruhkan, karena itu merupakan bentuk mengubah ciptaan Allah yang tidak ada dalilnya, maka di-

makruhkan. Beberapa sahabat Imam Ahmad menyebutkan bahwa hal itu tidak ada salahnya. Beliau berkata; ‘Imam Ahmad pun melakukannya.’”

Keputusan bahtsul masail FMPP juga mengutip penjelasan Ensiklopedi Fiqih Kuwait sebagai berikut: “Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak boleh bagi perempuan yang belum menikah untuk mengerik alis, dan sebagian dari mereka membolehkan perempuan yang belum menikah untuk mengerik alis, jika diperlukan untuk mengobati atau menghilangkan cacat, dengan syarat tidak ada penipuan kepada orang lain. Adapun

wanita yang sudah menikah, sebagian besar ahli fiqih berpendapat bahwa hukum mengerik alis adalah dibolehkan jika atas izin suami, atau ada tanda-tanda (qarinah) yang mengisyaratkan demikian, karena hal itu termasuk menghias diri, dan itu dianjurkan untuk wanita yang sudah bersuami. Selain itu seorang wanita secara hukum agama diperintah melakukan hal tersebut untuk suaminya.”

Jadi kesimpulannya, berdasarkan Keputusan Bahtsul Masail FMPP XXI, hukum mencukur alis bagi perempuan bersuami, setelah mendapat izin suaminya adalah dibolehkan. Wallahu a’lam. ♦



ILUSTRASI

# BENARKAH SAFAR BULAN SIAL? INI PENJELASAN MENURUT ISLAM

Bulan Safar atau bulan kedua dalam kalender Hijriyah setelah Muharram, sering dianggap sebagai bulan sial. Sebagian masyarakat percaya bahwa bulan Safar merupakan bulan sial. Akibatnya, masyarakat yang percaya, tidak akan melakukan agenda penting, seperti menikah atau hajatan, karena mereka khawatir akan tertimpa musibah atau mengalami peristiwa buruk.

Lantas, benarkah bahwa bulan Safar adalah bulan sial? Dalam Islam, selalu mengajarkan bahwa semua bulan itu istimewa dan diberkati oleh Allah SWT. Jadi, tidak ada satupun bulan yang jelek ataupun membawa sial.

## Arti Bulan Safar

Safar berasal dari kata "safar" yang berasal dari bahasa Arab, yang artinya adalah "kosong" atau "kuning".

Penamaan ini merujuk pada kebiasaan orang-orang Arab pada masa sebelum Islam, yang meninggalkan rumah mereka untuk melakukan perjalanan atau berperang pada bulan Safar ini, sehingga rumah-rumah mereka menjadi kosong.

Dalam konteks Islam, bulan Safar tidak memiliki kedudukan khusus seperti bulan Ramadhan atau Muharram. Terlebih lagi, tidak ada ibadah atau amalan spesifik yang dianjurkan selama bulan Safar ini.

Namun, terdapat beberapa hadits yang menyebutkan keutamaan berpuasa pada hari Kamis terakhir bulan Safar, yang diyakini dapat menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun berikutnya.

## Bulan Safar Bulan Sial Adalah Mitos

Telah dikatakan bahwa Sebagian Masyarakat masih menganggap bahwa bulan Safar Adalah bulan sial. Berkaitan dengan hal tersebut, akhirnya bulan Safar dikaitkan dengan beberapa mitos buruk.

Inilah Beberapa Mitos Buruk yang Dikaitkan dengan Bukan Safar:

1. Pada bulan Safar, segala musibah dan kejadian buruk dipercaya lebih sering terjadi.
2. Allah SWT diyakini menurunkan 12.000 macam bala bencana ke bumi di bulan Safar.
3. Dipercaya bahwa melakukan perjalanan, pernikahan, atau memulai usaha baru selama bulan Safar, akan dapat mendatangkan kesialan atau kerugian.
4. Sebagian orang juga enggan keluar rumah atau melakukan aktivitas penting pada bulan Safar, karena takut tertimpa musibah.
5. Bulan Safar juga dianggap sebagai bulan yang tidak baik untuk melakukan hal-hal besar atau mengambil keputusan penting.
6. Bulan Safar juga dipercaya, akan banyak jin dan makhluk halus lainnya yang lebih

aktif mengganggu manusia.

7. Mimpi buruk atau kejadian aneh yang dialami selama bulan Safar, sering dikaitkan dengan kesialan bulan tersebut.

Pandangan yang mengaitkan bulan Safar dengan kesialan merupakan sisa-sisa



kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam, yang masih dianut oleh sebagian masyarakat hingga kini.

Kepercayaan ini tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat.

Dalam Islam, setiap bulan dalam kalender Hijriah memiliki keistimewaan dan keberkahannya masing-masing. Tidak ada satupun bulan yang dianggap lebih sial atau lebih beruntung daripada bulan lainnya.

Rasulullah SAW pun secara tegas membantah anggapan bahwa bulan safar adalah bulan sial.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi:

“Tidak ada penyakit menular, tidak ada kesialan pada burung hantu, dan tidak ada kesialan pada bulan Safar.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa Islam menolak segala bentuk takhayul dan kepercayaan pada kesialan, termasuk yang berkaitan dengan bulan Safar.

Umat Muslimpun dianjurkan untuk berpegang teguh pada ajaran agama dan menjauhi segala bentuk khurafat. Selain itu, keyakinan pada kesialan bulan Safar dapat menimbulkan dampak negatif pada indi-

berkahan dan ridha Allah SWT.

5. Bulan Safar dapat menjadi momen untuk meningkatkan ketakwaan.

### Amalan Bulan Safar

Dari pada memusingkan mitos tentang bulan Safar adalah bulan sial, lebih baik jika memperbanyak amalan baik di bulan ini. Dengan begitu, maka keselamatan tetap terjaga dan iman akan terus kuat.

Berikut beberapa amalan bulan Safar yang bisa dilakukan:

pkam imbalan.

Sedekah tidak terbatas pada harta benda, tetapi juga dapat berupa senyuman, kata-kata yang baik, atau bantuan tenaga.

Memperbanyak sedekah di bulan Safar dapat mempererat hubungan sosial dan mengubah kepedulian terhadap sesama.

### 3. Perbanyak Shalat Sunnah

Memperbanyak shalat sunnah juga merupakan amalan yang dianjurkan di bulan Safar ini. Shalat sunnah adalah ibadah



vidu dan masyarakat.

### Keutamaan Bulan Safar

Seperti bulan-bulan hijriyah lainnya, bulan Safar juga memiliki keutamaan.

Berikut 5 Keutamaan Bulan Safar:

1. Berpuasa pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Safar (Ayyamul Bidh).
2. Bulan Safar menjadi waktu yang tepat untuk memperbanyak dzikir, sedekah, dan amalan-amalan baik lainnya.
3. Setiap hari dalam bulan Safar adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.
4. Melakukan ibadah dan perbuatan baik selama bulan Safar dapat meraih ke-

### 1. Perbanyak Dzikir

Salah satu amalan yang dianjurkan di bulan Safar ini adalah memperbanyak dzikir. Dzikir merupakan ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan cara mengingat dan menyebut nama-Nya.

Dzikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, baik dengan lisan, hati, maupun perbuatan. Memperbanyak dzikir di bulan Safar dapat membantu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

### 2. Perbanyak Sedekah

Sedekah merupakan perbuatan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan ikhlas, tanpa menghara-

ambahan yang dilakukan di luar shalat wajib lima waktu.

Seperti shalat sunah Dhuha, Tahajud, Rawatib, Witir dan yang lainnya. Menjalankan salat sunnah di bulan Safar dapat meningkatkan kedekatan dengan Allah SWT dan memperkuat keimanan.

### 4. Perbanyak Puasa

Puasa juga merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan, yang kapanpun bisa dilakukan, termasuk di bulan Safar.

Kesimpulannya, dalam Islam tidak ada yang namanya bulan sial. Islam menyebutkan bahwa setiap bulan itu istimewa dan memiliki keutamaan masing-masing. ♦



## Philippe Troussier

# PELATIH SEPAK BOLA TERKENAL DUNIA BERSYAHADAT DI HUT KE-50

Penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu tidak asing dengan nama Phillippe Troussier, pelatih asal Prancis yang sukses membawa Timnas Jepang ke Babak 16 Besar Piala Dunia 2002.

la lahir di Paris, Prancis, 21 Maret 1955 dengan nama Phillippe Bernard Victor Troussier. Pria yang kini berusia 70 tahun itu, pada hari ulang tahun (HUT)-nya yang ke-50 mendapat hidayah. Ia mengucap Dua Kalimat Syahadat di Rabat, Maroko, di mana dirinya pernah menjadi pelatih Timnas Sepak Bola Maroko.

Saat ini berarti, sudah 20 tahun lebih Phillippe Troussier memeluk Agama Islam dan taat mekakukan ibadah. Karena ia tidak mualaf sendirian saat itu, melainkan mengajak istrinya Dominic Matteo. Keduanya lalu mendapat nama baru masing-masing Omar Troussier dan Aminah.

Pada 21 Maret 2005 itu, puluhan surat kabar di Maroko menulis bahwa mantan pelatih tim nasional negara tersebut

Philippe Troussier dan istrinya, Dominic Matteo, resmi memeluk Agama Islam. Kabar itu pun cepat menyebar ke seluruh dunia.

Akan tetapi kabar itu tentu bukan kejutan. Karena memang sejak lama Troussier mempelajari agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu. Salah satu petinggi klub Riyadi Fathi El-Rabat, Mohammed El Homrani, yang juga merupakan teman dekat Troussier, juga senang dengan keputusan Troussier ini.

El Homrani mengatakan Troussier meneleponnya dan berkata, "Saya harus mengucapkan Syahadat dengan istri saya."

Hal ini diperkuat oleh dua saksi yang meminta petunjuk dari pihak agama un-

tuk Troussier dalam mengucapkan dua kalimat syahadat. El Homrani berkomentar bahwa kedua kata tersebut merupakan bentuk yang benar dan syahadat memiliki makna dan tujuan yang sama.

Dengan masuknya Troussier dan istrinya ke Islam, El Homrani merasa bahagia dan kabar tersebut bukanlah suatu kejutan karena El Homrani tahu pasti bahwa selama ini Troussier memiliki kewajiban dan keinginan untuk mempelajari ajaran-ajaran dasar Islam.

"Sayalah yang mengajarnya pengucapan dua kalimat syahadat agar ia hafal di dalam kepalanya saat ia masih belum fasih dalam pengucapannya," kata Homrani.

El Homrani mengatakan bahwa perubahan nama yang menerima panggilan

dari Omar Troussier dan Dominic menjadi Aminah sangat tidak populer di kalangan mualaf. Omar Troussier tinggal di distrik Souissi, sebuah distrik yang dihuni oleh orang-orang kaya di Rabat-Maroko.

The White Support yang merupakan julukan Troussier, merupakan ayah angkat dua yatim piatu berkewarganegaraan Maroko

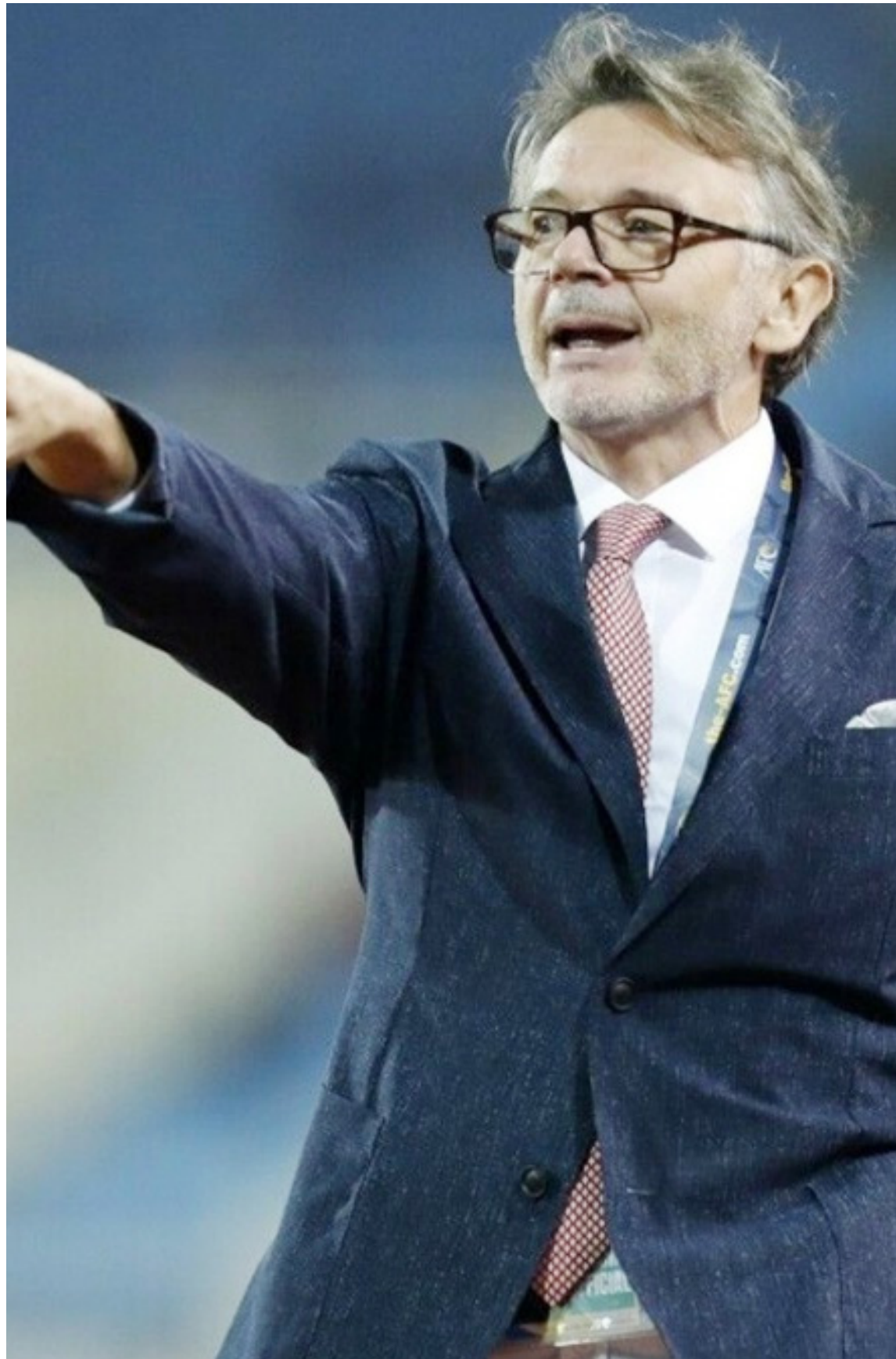
### Timnas Vietnam

Bagi masyarakat Indonesia, Phillipe Troussier sangat akrab karena ia merupakan Pelatih Timnas Sepak Bola Vietnam. Namun mulanya, tidak banyak orang tahu bahwa ia seorang Muslim karena dirinya memang tidak mau bercerita banyak ke media mengenai agama yang dipeluknya. Ya. Omar Troussier dan Aminah menjadikan agama mereka sebagai privasi tidak untuk konsumsi publik.

Troussier membuat dunia terbelalak ketika di Piala Dunia 2002 ia sukses membawa Timnas Jepang masuk Babak 16 Besar. Kejutan Luar Biasa. Tapi sukses itu tidak dicapainya dalam semalam. Persiapan Troussier bersama Jepang sendiri tidak sebentar, ia mempersiapkan tim Samurai Biru sejak 1998 hingga akhirnya mampu membikin sejarah di Piala Dunia 2002.

Setelah meninggalkan jabatannya di Timnas Jepang, Troussier lantas menukangi sejumlah tim mulai dari Qatar, Marseille hingga Maroko pada 2005

Setelah malang melintang di berbagai klub Eropa dan Asia, Troussier sempat dipercaya untuk melatih Timnas Vietnam. Pria yang mengakhiri kariernya sebagai pemain di Stade Reims itu menangani berbagai tim kelompok umur, seperti U-19, U-22, U-23, dan senior. ♦ros



## Tjio Wie Tay, Pendiri Toko Buku Gunung Agung NAMANYA JADI HAJI MASAGUNG SETELAH ALAMI KEGALAUAN

Di berbagai kota besar di Indonesia, orang pasti tahu atau setidaknya pernah dengar nama Toko Buku Mas Agung dan grup usaha Mas Agung lainnya. Sang pendiri adalah Almarhum Tjio Wie Tay yang semoga husnul khatimah wafat pada 1990 dengan nama Haji Masagung.



**S**ukses Haji Masagung ini tidak diperolehnya dalam semalam melainkan melalui perjuangan panjang, di mana akhirnya menjadi salah satu orang terkaya di Indonesia dengan berbagai bidang usahanya. Tapi yang paling melekat di hati masyarakat adalah Toko Buku Gunung Agung.

Lebih dari itu. Sukses Haji Masagung menjadi inspirasi bagi banyak orang sehingga berbagai media sering mempublikasikan profilnya sebagai pengusaha brilian. Tak hanya menjadi tokoh di surat kabar, majalah, dan televisi. Ada pula buku tentang Haji Masagung, di antaranya buku "Apa dan Siapa?" terbitan 2004 serta "Nusa Jawa Silang Budaya" (2009) ditulis oleh Denys Lombard.

Mengutip "Buku Apa dan Siapa?" ternyata Tjio Wie Tay si orang kaya yang juga bernama IKetut Masagung, mengalami gejala batin sangat hebat di era 1960an. Saat berusia 50 tahun, dia mengalami semacam krisis batin. Kehidupan yang super nyaman, banyak duit dan punya kedudukan terhormat, justru membuat Masagung takut.

Ia memutuskan mualaf pada 1967 dan terus mempelajari Agama Islam. Pada 1975 Masagung menunaikan ibadah haji, dan sepulang dari Tanah Suci ia memproklamkan namanya sebagai Haji Masagung. Sejak itu pula dirinya dikenal dengan panggilan Haji Masagung, pengusaha sukses yang senantiasa rendah hati dan bersyukur menjadi Muslim.

Sementara itu, Toko Buku Mas Agung terus menanjak dan mencapai puncak kejayaan. Perusahaan itu menjadi sentra jual beli buku di Indonesia. Lalu, Gunung Agung tidak sebatas menerbitkan dan menjual buku, tetapi juga merambah bisnis ke sektor pariwisata, perhotelan, dan

money changer (penukaran uang). Semua bisnis ini mengantarkan Haji Masagung jadi miliarder, pengusaha yang shalih, dan selalu rendah hati.

Haji Masagung enggan menyebutkan jumlah kekayaannya. Tetapi, jumlah pajak yang harus dibayarnya secara grup mencapai Rp 200 juta. Untuk bea cukai sebesar Rp 2 miliar. Belum termasuk pajak pendapatan dari 2.000 lebih karyawannya.

### Sejak Mualaf hingga Wafat Terus Dakwahkan Islam

Hingga 1967 Ketut Masagung sudah mendapatkan status sebagai pengusaha sukses, kaya raya, keluarga harmonis. Bahagia seharusnya dia! Tapi tidak demikian faktanya. Ketut Masagung yang saat itu masih beragama Hindu (tulis Denys Lombard dalam "Nusa Jawa Silang Budaya"), dengan kondisi demikian, sangat tidak nyaman. Dia takut kejayaan dan kekayaan yang diperoleh malah menjadi senjata makan tuan bagi dirinya.

Intinya dia tak mau semua itu membuatnya terjerumus ke dunia maksiat. Beruntung, di tengah kegelisahan itu dia tanpa sengaja bertemu Ibu Tien Fuad Muntaco. Denys Lombard menyebut Tien Fuad Muntaco sebagai pakar hipnotisme dan telepati. Pertemanan dengan Tien Fuad Muntaco inilah yang akhirnya membawa Ketut Masagung mengucapkan Dua Kalimat Syahadat pada 1967.

Tentang sehalihan sosok Haji Masagung ini, Leo Suryadinata dalam bukunya "Southeast Asian Personalities of Chinese Descent" (2012) menyebut Haji Masagung terus jadi lebih Islami dan menjadi tokoh penyebaran ajaran ke-Islaman.

Tercatat dia mendirikan Yayasan Jalan Terang yang bertujuan membiayai pembangunan masjid, rumah sakit, dan museum Wali Songo. Tak hanya itu, dia juga aktif berperan dalam dakwah masjid di Ibu Kota Jakarta. Dan tak lupa, dia aktif mempromosikan Islam lewat menerbitkan buku-buku Islami.

"Setelah mengalami masa muda yang resah, tindakan Haji Masagung untuk merangkul tradisi Jawa dan kegemarannya pada kebatinan merupakan langkah-langkah maju," puji Denys Lombard kepada Haji Masagung.

Upaya menebar ajaran Agama Islam dan dakwah terus dilakukan oleh Haji



Masagung hingga dia menghembuskan nafas terakhir pada 24 September 1990. Ia wafat dalam damai dan jutaan umat Islam

mendoakan dirinya dapat ampunan atas segala dosanya dan semua amal shalihnya diterima Allah SWT. ♦ros

# Kecerdasan Emosional Paling Menentukan Kesuksesan KETAHUILAN, BEGINI CARA MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSIONAL

Daniel Goleman dalam bukunya “Emotional Intelligence” menekankan pentingnya Kecerdasan Emosional (EQ) dalam semua aspek kehidupan seseorang, termasuk kesuksesan. Karena sukses tidak bisa diraih jika semata-mata mengandalkan Kecerdasan Intelektual (IQ). Jadi jangan heran jika ada orang ber-IQ tinggi kalah sukses dibanding orang yang biasa-biasa saja prestasi akademiknya.

**A**palagi di kantor. Ada orang-orang yang disebut “penjilat” sehingga sukses. Dalam hal seperti ini, kita tidak boleh menghakimi orang sebagai penjilat, karena bisa saja sikapnya itu bentuk EQ yang tinggi. Tapi orang-orang di sekitarnya (yang menuduhnya penjilat) belum memiliki EQ setinggi orang tersebut.

Apakah Kecerdasan Emosional (EQ) itu? EQ adalah kemampuan mengenali dan merasakan emosi diri sendiri dan orang lain. Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, dapat membina hubungan yang baik dengan sesama.

Beda dengan IQ yang dibawa sejak lahir, EQ dapat terus dikembangkan. Jadi kita tidak perlu pasrah apabila merasa EQ kurang. Karena terdapat cara-cara untuk meningkatkan kecerdasan emosional atau EQ, agar sukses di berbagai aspek kehidupan kita.

Memang golden age (umur terefektif) untuk membentuk Kecerdasan Emosional ini 0-5 tahun, yaitu sejak terbentuk janin dalam kandungan hingga si anak berusia 5 tahun. Akan

tetapi, kecerdasan emosional ini dapat terus ditingkatkan di usia berapa saja, asal kita mau. Berikut ini dilansir dari Klikdokter.com, cara-cara meningkatkan kecerdasan emosional.

## CARA MUDAH MENINGKATKAN KECERDASAN EMOSIONAL:

### 1. Bangun Pengendalian Diri

Pengendalian diri yang baik bisa menjadi cara meningkatkan EQ yang baik, untuk memastikan Kamu bertindak dengan tepat dalam setiap situasi.

Saat sedang emosi, Kamu mungkin bisa menangis atau melakukan hal-hal di luar kewajaran. Menyalurkan emosi ke dalam suatu aktivitas yang positif adalah solusi tepat.

Namun, jangan sampai Kamu terlalu menekan emosi saat berusaha untuk mengendalikannya. Bersikaplah wajar terhadap semua emosi yang menghampiri Kamu. Sadari emosi tersebut lalu tarik na-

pas dalam-dalam agar tetap tenang.

### 2. Tumbuhkan Motivasi

Seseorang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tetap akan termotivasi, bahkan saat hal-hal tidak berjalan sesuai dengan keinginan.

Mereka adalah orang-orang yang mampu mengatasi kemunduran dan selalu bersikap tegar dalam menghadapi target yang tidak sesuai tujuan. Sementara orang-orang yang sangat ambisius belum tentu cerdas secara emosional.

### 3. Bersikap Empati

Empati bukan hanya tentang merasakan apa yang orang lain rasakan, tetapi juga tentang memahami sudut pandang, tantangan, dan kekuatan orang lain.

Kamu tidak harus setuju dengan sudut pandang orang lain, namun hal ini akan membantu Kamu untuk memahami mengapa mereka bertindak atau berpikir demikian.

Di samping itu, cara meningkatkan kecerdasan emosional dengan berbincang tentang bagaimana perasaan orang lain mungkin terdengar seperti buang-buang waktu, tapi sebenarnya hal



ini membantu meningkatkan produktivitas.

#### 4. Jangan Bersikap Reaktif

Setiap orang pasti pernah dihadapkan pada situasi yang menyebalkan. Hal ini tentu dengan mudah memengaruhi suasana hati dan merusak hari Kamu. Oleh karena itu, cobalah untuk melatih kecerdasan emosional dengan menenangkan diri saat marah.

Kamu bisa mengambil menarik napas dalam-dalam atau mengambil segelas air untuk membuat pikiran lebih jernih. Ingat, bersikap reaktif tidak akan menyelesaikan masalah, bahkan bisa menyulut masalah-masalah baru.

#### 5. Latih Keterampilan Berkomunikasi

Kemampuan untuk menciptakan obrolan ringan dapat menciptakan hubungan baik dan membangun suasana nyaman dengan orang lain.

Berkomunikasi tidak hanya dilakukan secara verbal melalui ucapan. Kamu juga bisa berkomunikasi dan memahami orang lain dari bahasa tubuh maupun mimik wajah.

Tentunya, cara meningkatkan kecerdasan emosional melalui keterampilan berkomunikasi hanya bisa ditingkatkan melalui praktik langsung.

#### 6. Berpikir Secara Terbuka

Hal ini merupakan cara meningkatkan EQ lainnya. Dengan berpikir terbuka, Kamu mampu menerima kritik dan saran dari orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah cenderung tertutup dengan kritik dan saran dari orang lain.

Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka kerjakan selalu benar. Padahal kritik dan saran bertujuan untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan Kamu.

#### 7. Mengelola Emosi Negatif

Kamu juga dapat melatih kecerdasan emosional dengan mengelola emosi negatif yang tengah dirasakan. Dengan pengelolaan yang baik, diharapkan emosi negatif ini tidak mempengaruhi cara Kamu berpikir serta bertindak.

Cara pertama, dengan tidak serta-merta mengambil kesimpulan buruk dari suatu situasi yang kurang Kamu sukai, melainkan menilai berbagai kemungkinan penyebab dari situasi tersebut.

Misalnya, pasangan yang marah-marah terhadap Kamu tidak tentu disebabkan benci terhadap Kamu, mungkin dia sedang lelah atau memiliki masalah lain sehingga mudah terpicu emosinya.

Langkah kedua, mengurangi ketakutan

akan penolakan dengan merancang opsi atau strategi lainnya. Misalnya, menawarkan beberapa ide untuk proyek mendatang di kantor. Jika salah satu ide Kamu ditolak, ada kemungkinan ide-ide lain diterima.

#### 8. Ekspresikan Emosi kepada Orang-orang Terdekat

Pasti setiap orang memiliki relasi dekat dengan orang lain, entah itu pasangan, anggota keluarga, teman, dsb. Jangan ragu untuk mengekspresikan emosi yang Kamu miliki untuk mereka.

Kamu dapat mengekspresikannya melalui kata-kata (menanyakan kabar,

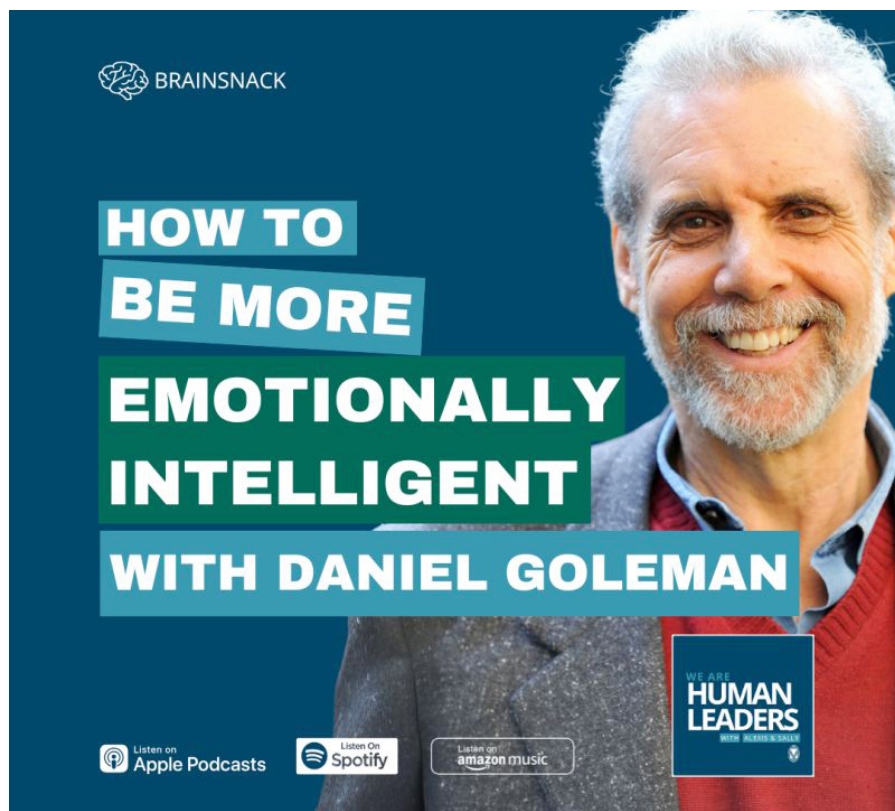
Kamu terus bermain HP saat kita sedang berbicara.

Hal ini lebih jelas untuk lawan bicara Kamu, ketimbang menuduh "Kamu tidak pernah memperhatikanku". Dengan cara ini, Kamu akan lebih berani untuk mengekspresikan emosi.

#### 10. Refleksi Diri

Luangkan waktu untuk refleksi diri. Coba renungkan bagaimana emosi Kamu selama ini memengaruhi keputusan dan perilaku Kamu.

Lalu coba pahami emosi orang lain dengan merenungkan beberapa hal ini:



menyatakan rasa sayang, dsb), bahasa tubuh (tersenyum, kontak mata, memeluk), ataupun perbuatan (memberi hadiah, membantu saat kesusahan, mendengarkan curhat).

#### 9. Berani Mengutarakan Emosi yang Sulit

Beberapa emosi mungkin sulit Kamu ekspresikan, misalnya menolak permintaan tanpa merasa bersalah, tidak setuju dengan pendapat orang, memprioritaskan diri sendiri (bukan egois), dll.

Saat bertikai dengan pasangan, misalnya, sulit bagi Kamu untuk menjelaskan apa yang dirasakan sehingga Kamu mungkin cenderung menuduh dan marah.

Lakukan teknik XYZ, katakan saya merasakan X saat Kamu melakukan Y dalam situasi Z. Misalnya, saya merasa kesal saat

Mengapa ia merasa sedih, marah, atau kecewa? Adakah faktor tak terlihat yang mungkin berkontribusi? Dengan cara ini, Kamu akan lebih mudah memahami peran emosi dalam memengaruhi pikiran serta perilaku orang.

#### 11. Rayakan Pencapaian

Merayakan pencapaian, baik itu milik sendiri maupun orang lain, adalah salah satu cara efektif untuk mengendalikan emosi dan meningkatkan kecerdasan emosional.

Mengasah kecerdasan emosional memang sangat penting. Sebab, kecerdasan emosional yang mumpuni dapat membuat Kamu mampu berkomunikasi secara efektif, berempati dengan orang lain, mengatasi kesulitan, mengendalikan stres, dan meredakan konflik. ♦ros

# SABAR TANPA TEPI, IKHLAS TANPA TAPI; KUNCI HIDUP BAHAGIA

**S**YUKUR adalah pintu masuknya nikmat dan bahagia dalam hidup. Tapi justru syukur itu yang sulit untuk dilakukan. Beruntunglah ada kiat mudah untuk bisa bersyukur, dengan membaca dan mengaplikasikan isi buku karya Deni Sutan Bahtiar berjudul “Sabar Tanpa Tepi, Ikhlas Tanpa Tapi”.

Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulu-muddin menjelaskan bahwa SABAR merupakan salah satu dari “tiga pilar” dalam spiritualitas, bersama dengan SYUKUR dan TAWAKAL. Buku ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat kekinian, di mana Sabar dan Ikhlas merupakan senjata ampuh dalam menghalau segala situasi yang dapat membuat berpaling dari Allah SWT.

SABAR tidak hanya diperlukan dalam menghadapi kesulitan, tetapi juga dalam menjalani berbagai fase kehidupan, termasuk saat mendapatkan kesenangan. Artinya, sabar harus diterapkan dalam setiap situasi.

Sedangkan IKHLAS kunci untuk mencapai kebahagiaan yang sejati. Ikhlas bukan hanya tentang menerima keadaan, tetapi juga tentang memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan tanpa mengharapkan imbalan.

Ini adalah pelajaran berharga yang dapat diterapkan dalam hubungan sosial dan pekerjaan.

Berbagai kisah dalam buku ini sangat inspiratif dan memotivasi untuk senantiasa Sabar dan Ikhlas. Lebih mantap lagi, pembahasan buku ini berbasis pada Al-Qur’an di mana disertakan ayat-ayat yang relevan dan menjelaskan konteks serta maknanya. Ini memberikan pembaca landasan yang kuat untuk memahami pentingnya sabar dan ikhlas dalam pandangan Islam. ♦ros

<b>JUDUL BUKU:</b>
<b>SABAR TANPA TEPI, IKHLAS TANPA TAPI</b>
<b>PENULIS:</b>
<b>DENI SUTAN BAHTIAR</b>
<b>PENERBIT:</b>
<b>ARASKA</b>
<b>TAHUN TERBIT:</b>
<b>JANUARI, 2025</b>
<b>TEBAL:</b>
<b>216 HALAMAN</b>
<b>ISBN:</b>
<b>978-623-6335-69-7</b>





**IKLAN 1 HALAMAN FC  
Rp50.000.000**



**IKLAN BACK COVER FC  
Rp75.000.000**



**IKLAN 1/2 HALAMAN FC  
Rp25.000.000**

# Media yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

# MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC)
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC),
- IKLAN ADVERTORIA L/INFORIAL (FC)
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DILUAR EDISI KHUSUS
- IKLAN COVER 2 (FC)
- IKLAN COVER 3 (FC)
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN

## MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai dengan Topik Bahasan
- Pilihan Halaman Iklan yang mudah disimak Pembaca
- Harga Iklan Bertabur Diskon



**IKLAN CENTER SPREAD FC  
Rp80.000.000**



**CONTACT PERSON: NIKEN**

**021 - 791 96 781  
0896 4369 4121**

**Email: moeslimchoice@gmail.com**



## KISAH 3 SAHABAT NABI SAW YANG DISIKSA DEMI PERTAHANKAN IMAN

Nabi Muhammad SAW dalam kehidupannya dikelilingi oleh banyak sahabat yang setia. Mereka selalu siap mendampingi perjuangan Nabi dalam berdakwah menyebarkan agama Islam. Parasahabat ini, berasal dari bermacam-macam golongan, status sosial, kelas ekonomi, karakter, dan juga latar belakangnya. Namun, satu yang menyatukan mereka yaitu keimanan yang teguh kepada Allah SWT dan Rasul-Nya.

Dalam menyebarkan agama Islam bersama Nabi Muhammad SAW, para sahabat ini, menghadapi berbagai cobaan dan tantangan yang berat, karena penyebaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi dianggap bertentangan dengan tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan yang telah mengakar kuat di masyarakat Arab selama berabad-abad.

Sebagai penguasa Makkah, Kaum Quraisy, merasa terancam oleh ajaran Tauhid yang dibawa Nabi, yang menolak penyembahan berhala-berhala di Ka'bah, sumber ekonomi dan prestise mereka. Para sahabat, terutama dari kalangan lemah seperti budak, orang miskin, dan mereka yang tidak memiliki perlindungan marga yang kuat, selalu menjadi sasaran utama intimidasi dan penyiksaan. Mereka dipaksa untuk meninggalkan Islam dengan melalui berbagai cara, mulai dari ancaman, boikot ekonomi, pengucilan sosial, hingga penyiksaan fisik yang kejam.

Meskipun demikian, semangat dan keteguhan iman para sahabat justru semakin kuat di tengah ujian berat tersebut.

Berikut Tiga (3) Sahabat Nabi Muhammad SAW yang Disiksa Secara Kejam Demi Mempertahan Keimanan, seperti dikutip dari NU Online:

### 1. Bilal bin Rabah

Sahabat Nabi SAW yang pertama kali mengalami penyiksaan secara kejam adalah Bilal bin Rabah. Ia adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, yang menghabiskan hari-harinya bekerja untuk Umayyah bin Khalaf, salah satu pembesar Quraisy.

Ketika Umayyah mengetahui bahwa Bilal telah memeluk Islam, kemarahannya memuncak. Ia pun lalu menyeret Bilal keluar saat matahari sedang terik dan melemparkannya ke hamparan padang pasir yang panas membara.

Tak sampai di situ saja, Umayyah bahkan memerintahkan agar sebuah batu besar diletakkan di atas dada Bilal, seraya berkata dengan congkak.

"Siksa ini akan terus berlangsung sam-

pai kamu mati atau mengingkari Muhammad dan menyembah Latta serta Uzza," kata Umayyah.

Meski disiksa dengan kejam, namun, iman Bilal tak goyah sedikitpun. Dengan penuh keyakinan, ia mengatakan, "Ahad, ahad," yang berarti "Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Esa."

Keteguhan Bilal dalam mempertahankan keimanannya, akhirnya dilihat oleh Abu Bakar As-Shiddiq yang kebetulan lewat. Abu Bakar kemudian membeli Bilal dari Umayyah dan memerdekakannya.

### 2. Abdullah bin Hudzafah

Tak berbeda jauh dengan Bilal, Abdullah bin Hudzafah, yang juga sahabat Nabi SAW juga disiksa karena keimanannya. Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adiy, yang lebih dikenal sebagai Abu Hudza-



fah As-Sahmi. Ia termasuk As-Sabiqunal Awwalun, adalah golongan pertama yang memeluk Islam di Makkah, dan turut berhijrah ke Habasyah serta menjadi delegasi Nabi SAW ke Raja Persia.

Kisahanya berawal saat Khalifah Umar mengirim pasukan ke Roma, dan Abdullah turut serta dalam rombongan tersebut. Sesampainya di Roma, Raja Roma bertanya, "Apakah kelompok ini pengikut Muhammad?" Kemudian Raja Roma menawarkan, "Maukah engkau menjadi Nasrani? Jika ya, aku akan berikan setengah kerajaanku."

"Meski kau berikan seluruh kekayaanmu dan semua kerajaan di tanah Arab, aku tak akan pernah meninggalkan agama Muhammad, bahkan sekadar terlintas di pikiranku," Jawab Abdullah tegas.

Raja Roma pun murka mendengar jawaban itu dan mengancam.

"Jika begitu, aku akan membunuhmu," kata Raja Roma.

Dengan tenang, Abdullah menjawab, "Silakan."

Raja Roma lalu memerintahkan pasukannya untuk menyalib Abdullah dan memanah tubuhnya dari jarak dekat. Dalam kondisi itu, Raja kembali menggoda agar ia meninggalkan Islam, tetapi

Abdullah tetap menolak keras. Kemarahan Raja memuncak, ia menurunkan Abdullah dari salib dan menyiramnya dengan air mendidih.

## 2. Keluarga Yasir

Keluarga Yasir, yang terdiri dari Yasir, istrinya, Sumayyah binti Khiyath, dan anak mereka, Ammar bin Yasir. Keluarga ini disiksa secara kejam oleh Bani Makhzum, salah satu klan penguasa di Makkah, karena mereka menolak meninggalkan Islam. Penyiksaan terjadi di siang hari yang terik. Mereka dijemu di bawah matahari menyengat dan disiksa dengan pasir panas yang membakar kulit.

Kebetulan, saat itu, Nabi Muhammad SAW sedang lewat dan menyaksikan penderitaan mereka. Tak mampu berbuat banyak, beliau hanya bisa berkata, "Bersabarlah wahai keluarga Yasir, sungguh surga telah dijanjikan untuk kalian."

Dalam peristiwa itu, Sumayyah binti Khiyath tak kuat menahan siksaan yang mengerikan. Ia meninggal dunia, tetapi hingga akhir hayatnya, ia tetap teguh pada keimanan dan menolak meninggalkan Islam.

Kisah perjuangan Bilal bin Rabah, Abdullah bin Hudzafah, dan keluarga Yasir, menjadi teladan mulia tentang ketegu-

han iman di tengah cobaan berat. Mereka membuktikan bahwa kebenaran sejati tak bisa dibeli dengan harta duniawi atau dipaksa dengan kekerasan fisik.

Dzikir Bilal, "Ahad, ahad," yang bergema di padang pasir yang membara, penolakan tegas Abdullah terhadap tawaran setengah kerajaan Roma, dan ketabahan keluarga Yasir hingga Sumayyah syahid, menunjukkan bahwa iman yang kokoh mampu mengatasi segala intimidasi dan godaan.

Di era modern, seperti sekarang ini, teladan ini relevan saat umat Islam menghadapi tekanan dan godaan zaman. Di tengah globalisasi yang sarat materialisme dan sekularisme, keteguhan spiritual para sahabat menjadi benteng akidah yang penting.

Solidaritas Abu Bakar dalam memerdekakan Bilal, juga menjadi Pelajaran akan nilai saling tolong-menolong dalam menghadapi ketidakadilan.

Kisah ketiga sahabat ini, mengingatkan kita bahwa Islam adalah agama mulia yang patut diperjuangkan dalam segala kondisi. Keteguhan iman bukan berarti kekakuan dalam bermasyarakat, melainkan keseimbangan antara prinsip, kebijaksanaan, dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. ♦



## MEMOTRET KOPERASI, ANTITESA KAPITALISME MENUJU EKOSISTEM HALAL



oleh M Fuad Nasar

Kawan saya Iwan Mariono, seorang dokter dan penggiat literasi membuat ulasan menarik tentang buku *Koperasi Lawan Tanding Kapitalisme* karya Suroto. “Sebelum membaca jilid ke-6 Karya Lengkap Bung Hatta sangat direkomendasikan untuk baca buku ini, atau sebaliknya yang sudah baca jilid ke-6, maka buku ini menjadi kontekstual untuk melihat pemikiran Hatta yang jauh melampaui zamannya.

Judul bukunya diambil dari pernyataan Bung Hatta: koperasi lawan tanding kapitalisme,” tulis alumnus Sekolah Pemikiran Bung Hatta itu.

Koperasi tetap abadi dalam ingatan bangsa walaupun perannya kadang terabaikan akibat rendahnya literasi koperasi di tengah masyarakat dan pelaku ekonomi. Sistem koperasi mengedepankan sifat utama kekeluargaan dan usaha bersama sehingga seyogianya menjadi pilar ketahanan ekonomi nasional.

Regulasi yang mengatur koperasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Undang-Undang Perkoperasian ini pernah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, namun pasca judicial review, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian tetap menjadi dasar hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sampai dengan dibentuknya undang-undang yang baru.

Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 peran dan fungsi koperasi adalah:

Pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;

Kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

Ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;

Keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pengembangan koperasi tidak dapat dilepaskan dari cita-cita dan perjuangan Bapak Koperasi Indonesia Mohammad Hatta. Pada tahun 1977 dalam Seminar Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang

Dasar 1945 dan Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) tahun 1979, Bung Hatta menegaskan, apabila kita pelajari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 nyatalah bahwa yang diurusnya ialah politik perekonomian Republik Indonesia.

Isinya ialah: (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Sejalan dengan maksud ayat 1 pasal 33 tersebut, menurut Bung Hatta, koperasi adalah bangun organisasi ekonomi yang dituntut oleh Undang-Undang Dasar Negara kita. Bung Hatta secara tegas menyatakan cita-cita koperasi menentang individualisme dan kapitalisme secara fundamental. Oleh karena itulah koperasi harus menjadi dasar perekonomian rakyat dan tulang punggung pembangunan negara yang bersendikan demokrasi ekonomi.

Sejarah mencatat koperasi adalah gagasan revolusioner Bung Hatta dalam bidang ekonomi yang takkan tergantikan. Asas kekeluargaan tercantum dalam Undang-Undang Dasar, namun koperasi sejauh ini belum menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Konsep dan gerakan koperasi yang berasaskan kekeluargaan tidak boleh tenggelam ditelan arus globalisasi dan liberalisasi ekonomi.

Pemerintah melalui kebijakan Presiden Prabowo Subianto akan merevitalisasi koperasi dengan mendirikan Koperasi Desa Merah Putih. Peluncuran Kopdes Merah Putih direncanakan bertepatan dengan perayaan Hari Koperasi bulan Juli 2025. Untuk itu para pemikir dan pejuang koperasi perlu memberi masukan konstruktif agar Koperasi Desa Merah Putih menghasilkan dampak yang mendekatkan bangsa kepada cita-cita luhur koperasi.

Dalam buku *Koperasi Lawan Tand-*

ing Kapitalisme (2023) dijelaskan kenapa koperasi di Indonesia tidak berkembang, sebabnya adalah:

Pertama, paradigma masyarakat, masih banyak masyarakat yang tidak paham dengan koperasi dan arti pentingnya bagi pembangunan yang berdaulat dan mandiri. Koperasi sebagai ilmu pengetahuan dan temuan penting peradaban tidak diajarkan di bangku sekolah.

Prof. Dr. Sri-Edi Swasono dalam kata pengantarnya pada buku Suroto mengatakan mahasiswa-mahasiswa pemula mengawali belajar ilmu ekonomi berhaluan persaingan dan mekanisme pasar, dengan supply dan demand yang bebas naik dan bebas turun, belajar ilmu ekonomi berdasar "kompetitivisme", bukan berdasar "kooperativisme".

Kedua, regulasi dan kebijakan. Koperasi belum memperoleh kesempatan menjadi opsi bagi pengembangan bisnis di sektor layanan publik, seperti badan hukum dalam Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), demikian pula dengan UU Rumah Sakit, UU Penanaman Modal, UU Perbankan serta undang-undang sektoral lainnya. Koperasi idealnya bekerja dalam skala negara.

Amerika Serikat, meski dikenal sebagai negeri kapitalis, namun siapa menyangka penduduknya menjalankan sistem koperasi paling besar yakni 26 persen dari total 300 koperasi besar di seluruh dunia. Sejauh ini dari 300 koperasi terkemuka di dunia menurut data ICA (International Co-operative Alliance), koperasi di Indonesia belum termasuk di dalamnya.

Menurut Suroto, perbedaan mendasar sistem koperasi dan kapitalisme adalah koperasi tidak menempatkan modal sebagai tujuan utama melainkan manusianya (people-based association), sedangkan modal (capital) hanya sebagai alat bantu. Koperasi terbuka bagi siapa pun yang ingin bergabung dan hak suara tiap anggota dijamin dalam setiap pengambilan keputusan.

Koperasi bekerja dalam mekanisme deliberatif untuk mencapai kesejahteraan bersama. Kalau dalam ekonomi kapitalis, modal dan profit adalah unsur utama (capital-based association), tetapi dalam ekonomi koperasi, tujuan utamanya adalah benefit (kebermanfaatan). Dengan sistem koperasi suatu negara akan dapat menjalankan demokrasi di bidang ekonomi dalam praktik nyata.

Segegap insan koperasi dan pemanagku kepentingan perkoperasian perlu merenungkan kembali amanat Bung Hatta bahwa tujuan koperasi ialah mem-

perbaiki nasib orang-orang yang lemah ekonominya melalui mekanisme kerjasama. Menurut Bung Hatta, sandaran koperasi adalah orang, bukan uang.

Pesan Bapak Koperasi sangat tegas dalam buku Bung Hatta Menjawab, Wawancara Drs. Zainul Yasni (1978) bahwa asas kekeluargaan adalah yang membedakan antara koperasi Indonesia dari koperasi Barat yang berorientasi kepada ekonomi semata. Mengutip Bung Hatta, "Siapa yang akan mendirikan badan koperasi harus tahu membedakan mana yang koperasi dan mana yang bukan. Persekutuan yang wujudnya mengejar keuntungan bukanlah koperasi, tetapi



persekutuan sero (Persero) atau persekutuan andil. Koperasi wujudnya usaha bersama."

Dalam buku Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun (1987) yang dihimpun menjadi jilid ke-6 dari Karya Lengkap Bung Hatta, Bapak Koperasi itu menjelaskan sifat-sifat yang diperlukan dalam mengembangkan koperasi, ialah: (a) rasa solidaritas, setia kawan, (b) individualitas, insaf akan harga diri, (c) kemauan dan kepercayaan pada harga diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help, tolong diri sendiri dan auto-aktivitas guna kepentingan bersama, (d) cinta kepada masyarakat yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri, (e) rasa tanggungjawab moral dan sosial. Oleh karena itu Bung Hatta mengatakan modal utama koperasi adalah kepercayaan.

Koperasi adalah sistem yang dinamis dan adaptif terhadap perkembangan zaman dan perubahan lingkungan nasional, regional dan global. Koperasi bukan sekadar nama dan branding, tetapi harus menjadi kenyataan demi terjaminnya kesejahteraan hidup rakyat dan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila. Meminjam ungkapan Bung Hatta, membangun koperasi menghendaki kerja terus-menerus, latihan semangat dan didikan cita-cita. Koperasi tidak akan tumbuh kalau tidak ada cita-cita koperasi.

Dalam konteks penguatan ekosistem halal di negara kita, diperlukan peran multipihak antara pemerintah pusat dan

daerah serta sektor swasta, tidak terkecuali peran koperasi. Koperasi dan industri halal adalah dua komponen yang berakar pada spiritualitas, kesadaran etis dan keadilan universal.

Industri halal mencakup sektor yang memproduksi, mengolah, mendistribusikan dan menyediakan produk halal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perlindungan hak-hak konsumen. Sebagaimana sering disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar, halal bukan hanya label, tapi sebuah life style yang terpatri dalam tiga kata kunci yakni kebaikan, keutuhan dan keadilan.

Seiring dengan itu, ekosistem halal diharapkan semakin berkembang dengan dukungan multipihak, termasuk koperasi. Pemberdayaan koperasi perlu didukung oleh semua pihak karena koperasi yang berdaya akan memperkuat ekosistem halal di negara kita. ♦kemenag.go.id

# APA KABAR EKONOMI SYARIAH

Seperti apa pengembangan ekonomi dan keuangan syariah setelah 80 tahun Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya? Sarasehan ekonomi syariah kerja sama Bank Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia berupaya menjawabnya.

Yang jelas, posisi ekonomi dan keuangan syariah sudah berada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2025-2045. Dinamikanya inklusif, tak terpisahkan, dengan keseluruhan upaya Indonesia menjadi negara maju.

Simak saja apa kata Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Ekonomi Syariah dan Halal, KH Sholahudin Al Aiyub. Menurut dia, pengembangan ekonomi syariah bukan sekadar di rencana jangka menengah dan panjang nasional, melainkan juga menjangkau daerah-daerah di seluruh Indonesia.

riah Nasional 2025 yang berlangsung menjelang peringatan hari ulang tahun ke-80 Proklamasi Republik Indonesia itu berlangsung semarak dan menghadirkan gagasan dari sejumlah figur yang kompeten dan memiliki otoritas mengambil kebijakan. Sarasehan ini dihadiri antara lain oleh mantan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Ketua Umum MUI, Gubernur BI Perry Warjiyo, serta para pemangku kepentingan ekonomi syariah nasional.

Pada konteks ini, Gubernur BI Perry Warjiyo sempat mengulas kilas balik pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Alhasil, unguapn-

Ma'ruf Amin memerintahkan kita, mempunyai visi, mari kita jadikan Indonesia, istilah beliau adalah arus baru. Karena arus ada terus, kalau poros muter-muter. Arus terus menang," kata Perry, dalam Sarasehan Ekonomi Syariah Nasional 2025, di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Perry menekankan filosofi gerakan ekonomi syariah harus terus mengalir dan memberi dampak positif. Adapun sejak visi tersebut dicanangkan, berbagai sektor industri syariah di Indonesia mengalami lompatan signifikan.

Fesyen muslim, keuangan syariah, hingga produk halal semakin diakui dunia dan membuka peluang pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha nasional. "Al-



Lantas, bagaimana dengan MUI? "Nah kita dari unsur masyarakat, mendorong supaya apa yang sudah direncanakan betul-betul bisa tercapai. Sehingga target pemerintah pertumbuhan ekonomi delapan persen pada lima tahun ke depan bisa tercapai," kata Kiai Aiyub, sapaan ringkasnya.

la menambahkan, MUI berupaya mendorong perencanaan itu terlaksana dan mencapai targetnya. "Sekaligus mempunyai andil signifikan dalam pertumbuhan perekonomian nasional," ujarnya.

Dengan latar belakang itu, maka MUI menggandeng Bank Indonesia untuk menghimpun gagasan dan melaborkannya dalam forum sarasehan. Alhamdulillah Sarasehan Ekonomi Sya-

ya, Indonesia saat ini menempati posisi penting dalam peta ekonomi dan keuangan syariah global. Capaian ini, ujanya merupakan buah kerja sama selama satu dekade antara BI, Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan berbagai pihak yang mendorong pertumbuhan industri halal nasional.

Dalam acara Sarasehan, Perry mengisahkan, dahulu BI dan MUI menggelar sarasehan pertama di tempat yang sama, yang menjadi tonggak lahirnya visi besar menjadikan Indonesia sebagai 'arus baru' ekonomi syariah. Perry mengenang pesan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang kala itu mendorong Indonesia menjadi pusat arus ekonomi syariah global.

"Pada 10 tahun lalu, Pak Kiai Haji

hamdulillah, Indonesia adalah the best, the number one dalam modest fashion di global. Kiblat modest fashion dunia adalah dari Indonesia," ujarnya.

Perry mengemukakan, saat ini Indonesia telah menjadi kiblat fesyen muslim dunia. Dalam industri modest fashion global, produk-produk fesyen dari tanah air diakui sebagai yang terbaik dan menjadi tren internasional.

Sementara itu, di sektor keuangan syariah, Indonesia berhasil masuk tiga besar dunia. Kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi tonggak penting, menjadikannya salah satu bank syariah terbesar di kawasan Asia.

"Indonesia nomor tiga, keuangan syariah. Yang kita harus kejar adalah untuk

halal food. Yang kita harus kejar untuk bagaimana tapi tetap one of the five (lima besar)," ujar Perry.

Apa yang dikemukakan Gubernur BI ini memang bukan bualan. Peringkat Indikator Ekonomi Islam Global, The State Global Islamic Economy Indicator (SGIE), menempatkan Indonesia di peringkat ketiga pada periode 2024/2025. Bertahan di posisi yang mulai tercapai pada 2023-2024.

Sejak pertama SGIE meluncur pada 2014/2025, masih berada di peringkat 10-11. Posisi ini bertahan hingga SGIE

Posisi pertama dan kedua pada SGIE Report 2024/2025 juga tetap diduduki oleh Malaysia dan Arab Saudi. Toh Indonesia menunjukkan kinerja yang baik terutama dalam sektor modest fashion yang menempati peringkat pertama. Tidak hanya itu, Indonesia juga menjadi negara tujuan utama investasi halal, dengan mencatatkan 40 transaksi investasi senilai US\$ 1,6 miliar, tertinggi secara global mengungguli Uni Emirat Arab dan Arab Saudi.

Selanjutnya, SGIE 2024/25 juga mencatat bahwa pengeluaran konsumen

BI terus mendorong pesantren menjadi pusat kegiatan ekonomi umat mulai dari bisnis percetakan, pengelolaan air bersih, pertanian hijau, hingga industri roti. "Pondok-pondok pesantren kita sudah menjadi pusat-pusat bisnis ekonomi syariah. Bahkan pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tapi juga pusat ekonomi syariah, bisnis," ujarnya.

Dalam Sarasehan itu, Gubernur BI juga mengungkapkan Bank Indonesia (BI) menyiapkan enam program unggulan sebagai upaya untuk memperkuat ekonomi dan keuangan syariah nasional. Enam program unggulan itu merupakan turunan dari tiga strategi utama yang ditemukan BI dan MUI sejak dimulainya agenda Sarasehan 10 tahun lalu.

"Kami belajar ada tiga strategi utama, yaitu mata rantai ekonomi halal Indonesia, akses keuangan, dan literasi ekonomi dan keuangan syariah," kata Perry. Dari tiga strategi itu, sambungnya, terurai menjadi enam program.

Menurut dia, enam program ini tetap berlandaskan pada tiga strategi utama yang telah dijalankan BI, yakni penguatan mata rantai ekonomi halal (halal value chain), peningkatan akses keuangan syariah, serta literasi dan inklusi keuangan syariah. "Insya Allah kalau disepakati, menjadi tiga rukun untuk memperkuat, meningkatkan mata rantai ekonomi halal di Indonesia," kata Perry.

Tiga program pertama difokuskan pada penguatan mata rantai ekonomi halal pertama, Gerbang Santri atau Gerakan Pengembangan Pesantren dan Rantai Nilai Halal, yakni pemberdayaan pesantren sebagai pusat ekonomi umat melalui peningkatan produktivitas, digitalisasi bisnis, dan tata kelola keuangan yang lebih baik.

Kedua, Jawara Ekspor (Jaringan Wirausahawan Syariah Mendorong Ekspor) yaitu pembentukan jejaring pusat bisnis pesantren sebagai agregator produk halal Indonesia agar dapat menembus pasar global, melalui integrasi sistem informasi ekspor, perluasan akses pasar, kerja sama internasional, dan penguatan produk sesuai permintaan ekspor.

"Hal yang ketiga adalah Gemah Halal. Apa itu Gemah Halal? Gerakan Berjamaah Akselerasi Halal." Perry menuturkan Gemah Halal ini bertujuan memperluas pasar produk halal dengan meningkatkan produksi bahan baku halal, mempercepat sertifikasi halal dari hulu, memperkuat peran halal center di daerah, dan melindungi konsumen.

Program keempat berada di ranah akses keuangan syariah yakni Sapa Sya-



2019/2020. Peringkat SGIE ini mencakup tujuh sektor utama ekonomi dan keuangan syariah global: Mulai dari makanan halal, keuangan syariah, pariwisata ramah muslim, fesyen muslim, kosmetik halal, farmasi, hingga media dan rekreasi.

Nah, mulai SGIE 2019/2020, Indonesia mulai melompat ke posisi kelima. Saat wabah COVID-19 merajalela, posisi Indonesia justru terus merangkak naik lagi ke posisi keempat dalam SGIE 2020/2021 dan 2021/2022. Nah, pada SGIE 2023/2024, Indonesia mencapai posisi ketiga untuk pertama kali. Selanjutnya tetap bertahan di posisi ini pada SGIE 2024/2025.

Muslim dunia mencapai US\$ 2,43 triliun di tahun 2023, dan diproyeksikan tumbuh menjadi US\$ 3,36 triliun pada 2028. Sementara itu, aset keuangan syariah global mencapai US\$ 4,93 triliun, dengan Indonesia terus memperkuat posisinya melalui inovasi teknologi dan kebijakan strategis nasional.

Menurut Perry, kunci kemajuan ekonomi syariah nasional yang utama adalah melakukan kolaborasi lintas sektor dan pemberdayaan komunitas akar rumput, termasuk mengembangkan pondok pesantren.

Untuk soal ini, ujarnya, sejak 2015,

riah. Sapa Syariah adalah Sinergi Perdagangan dan Pembiayaan Syariah, yakni integrasi pembiayaan perbankan dengan perdagangan dan sektor lain, melalui plafon integratif yang menghubungkan pelaku usaha, lembaga keuangan, dan regulator, termasuk optimalisasi pasar uang syariah.

Sementara, dua program terakhir difokuskan pada literasi dan inklusi keuangan syariah "Kanal Jiswa [Kolaborasi Nasional Pengembangan Jalan Infak Sedekah dan Wakaf] ini adalah yang kami usulkan agar menjadi bagaimana kita sinergi antar lembaga, agar betul-betul selain pembiayaan dan komersial dari perbankan keuangan, ada juga pembiayaan sosial dari jalan infak sedekah, wakaf yang kita sudah mulai kembangkan, diinisiasi di situ," ungkapnya.

Terakhir, Lentera Emas (Literasi dan Inklusi Ekonomi Syariah Menuju Indonesia Emas) yang berupaya meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai program edukasi dan festival ekonomi syariah di tiga wilayah besar Indonesia.

Tak lupa Perry memanjatkan doa agar enam program itu berhasil menderaskan arus baru ekonomi syariah. "Semoga silaturahmi Sarasehan Nasional ini memperkuat kita dan juga diberkahi oleh Allah SWT sehingga kita bisa terus meningkatkan, memperkuat Indonesia sebagai arus baru ekonomi keuangan syariah menuju global," ujarnya.

Di acara sarasehan pula, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin mengajak masyarakat membiasakan diri berwakaf uang, karena wakaf tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga membawa maslahat luas bagi perekonomian dan kesejahteraan umat.

"Mari kita mulai kebiasaan baru wakaf uang. Sepuluh ribu rupiah setahun pun tidak masalah, karena wakaf ini bukan sekadar soal nominal, melainkan tentang membangun kebiasaan baik yang manfaatnya berkelanjutan," ujar Kamaruddin.

Menurut dia, wakaf adalah instrumen ekonomi syariah yang sangat potensial. Data menunjukkan aset wakaf yang dikelola Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kemenag meningkat rata-rata 6% setiap tahun. Namun, pemanfaatannya belum maksimal karena masih ada tantangan seperti sertifikasi aset dan regulasi yang belum sepenuhnya responsif terhadap perkembangan zaman.

"Potensi wakaf sangat besar. Karena itu, kami bersama BWI dan pemangku

kepentingan terkait tengah merumuskan pembaruan Undang-Undang Wakaf agar lebih adaptif, modern, dan mendorong inovasi pengelolaan aset," ungkap Pak Sekjen yang juga Ketua BWI.

Wakaf yang selama ini lebih dikenal

Kelebihan wakaf adalah kelonggaran dari ketentuan zakat bagi pemberi maupun penerimanya. Sedangkan wakaf lebih longgar dalam jumlah pemberian dan penyalurannya. Toh ekonomi syariah bukan hanya soal wakaf, melainkan literasi



sebatas pembangunan masjid, sekolah, atau fasilitas ibadah, harus ditransformasi menjadi wakaf produktif yang berdaya guna secara ekonomi. Melalui tata kelola modern, digitalisasi, dan model investasi syariah yang aman, wakaf dapat memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin.

menyeluruh tentang ekosistemnya.

Selain literasi, masih ada lima lagi program yang saling terkait. Tampak jelas ekonomi syariah merupakan mata rantai sektor riil dan finansial serta sisi investasi lanjutan untuk menjaga kesinambungan ekosistemnya. Juga inklusif dengan ekosistem yang berbeda di tingkat nasional maupun global. ♦

# PENANTIAN BADAN EKONOMI SYARIAH

Pembentukan Badan Ekonomi Syariah mengemuka lagi di Sarasehan Ekonomi Syariah Nasional 2025. Masih dalam penantian rupanya.

**D**i Sarasehan Ekonomi Syariah Nasional 2025, figur ekonomi syariah nasional yang juga Wakil Presiden ke-13 RI, KH Ma'ruf Amin, mengemukakan gagasan tentang perlunya percepatan pembentukan Badan Ekonomi Syariah untuk memperkuat arah dan strategi pengembangan industri halal nasional. Harap maklum, gagasan ini tampak tersendat realisasinya karena sudah disiapkan sejak Presiden Jokowi masih menjabat.

Sebenarnya soal badan ini sudah mengemuka pula di acara peluncuran

ganti Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Badan baru ini dirancang lebih inklusif, tidak birokratis, dan langsung berada di bawah Presiden. "Badan yang semula KNEKS itu akan mengalami transformasi menjadi badan. Badan yang akan juga menggerakkan ekonomi Syariah. Ya, badan kira-kira Badan Ekonomi Syariah," kata Wakil Presiden RI 2019-2024 itu.

Kiai Ma'ruf menegaskan bahwa Badan Ekonomi Syariah akan mengemban fungsi penggerak lintas sektor, tidak hanya terbatas pada industri keuangan syariah,



State of the Global Islamic Economy Report 2024/2025 di Jakarta pada awal Juli 2025 di Jakarta yang menempatkan Indonesia di posisi ketiga dalam peringkat ekonomi Islam global seperti tahun sebelumnya. Di acara SGIE Report itu, Kiai Ma'ruf mengungkapkan, pemerintah akan membentuk Badan Ekonomi Syariah.

Menurut dia, badan ini akan meng-

tetapi juga mencakup sektor industri halal, dana sosial umat, dan kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas. "Fokus kita kemarin itu kepada empat: yaitu industri halal, industri keuangan, dana sosial, kemudian juga para usahawan. Ini yang akan kita kembangkan," ujarnya.

Ia menyebutkan bahwa transformasi kelembagaan ini akan mencontoh

pendekatan seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) agar lebih lentur dalam menjangkau masyarakat dan pelaku usaha. "Nanti badan ini seperti BPIP. Jadi nanti unsur masyarakat akan masuk di dalamnya. Sehingga tidak birokratis, tapi lebih fleksibel," jelas Kiai Ma'ruf.

Dengan konsolidasi lintas sektor, kolaborasi pusat dan daerah, serta dukungan masyarakat sipil, Kiai meyakini Indonesia bisa naik peringkat menjadi pemimpin ekonomi syariah dunia dalam waktu dekat. "Kalau lihat trend kemarin dari nomor 10, 8, 5, kemudian menjadi nomor 3. Kalau lihat trend-nya, ya paling tiga tahun itu sudah bisa," ungkapnya.

Sedangkan di Sarasehan Ekonomi Syariah Nasional 2025, Kiai Ma'ruf menegaskan, transformasi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) menjadi badan sudah disepakati. Hanya

tuk mengemban fungsi penggerak lintas sektor yang tidak hanya terbatas pada industri keuangan syariah, tetapi juga mencakup sektor industri halal hingga kewirausahaan berbasis pesantren dan komunitas. "Supaya ada yang menavigasi jalannya semua ini, melalui Badan Ekonomi Syariah itu," ucapnya.

Dengan adanya Badan Ekonomi Syariah, Ma'ruf Amin yakin Indonesia bisa menduduki peringkat pertama sebagai ekonomi syariah terbesar di dunia. Saat ini, Indonesia berada di peringkat ketiga berdasarkan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report 2024/2025.

"Kalau nggak salah dari nomor 15, kemudian nomor 8, kemudian nomor 5, sekarang nomor 3. Jadi kalau kita ke nomor 1, itu dari 3 ke 1 kan dekat. Kalau dari 15 sampai nomor 3 itu kan jauh, itu kita bisa kejar dalam tempo 10 tahun. Ka-

masih tersebar di berbagai UU sektoral seperti perbankan dan asuransi, sehingga perlu disatukan dalam satu payung hukum yang mencakup seluruh aspek.

"Kita harus membuat undang-undang ekonomi syariah yang komprehensif. Jadi tidak terpisah-pisah. Semua diinfiltrasi," ungkapnya.

Tampaknya pembentukan undang-undang ekonomi syariah pun sudah disiapkan sebelumnya, sama halnya seperti Badan Ekonomi Syariah. "Kemarin saya bicara dengan Ketua Komisi XI DPR RI, kata Pak Misbakhun, DPR akan menginisiasi UU ini. Jadi saya kira tinggal... tinggal apa ya? Tinggal tok saja kalau begitu," tandas Kiai Ma'ruf.

Selain soal kelembagaan, Kiai Ma'ruf mengemukakan ekonomi syariah harus menginspirasi lembaga lain yang konvensional, bahkan ke sistem perundan-



kini tinggal menunggu proses finalisasi oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Saya sebenarnya lagi nunggu berita dari Bu Sri (Menteri Keuangan Sri Mulyani) ini tentang badan. Pak Prabowo bilang kepada saya, 'Saya masih punya utang sama Pak Kiai tentang Badan Ekonomi Syariah ini,'" kata Kiai Ma'ruf.

Ia mengemukakan tujuan pembentukan Badan Ekonomi Syariah adalah un-

tau nomor 3 ke 1 itu cuma dua lompatan, saya kira 1-2 tahun harus bisa kita lalui untuk menjadi nomor 1 di dunia," ujar Ma'ruf Amin.

Masih di sarasehan, Kiai Ma'ruf juga meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk merancang undang-undang (UU) ekonomi syariah yang bersifat komprehensif. Ia menyatakan, saat ini regulasi terkait ekonomi syariah

gan-undangan yakni harus ada undang-undang ekonomi syariah komprehensif yang mencakup semua aspek, seperti keuangan dan asuransi yang berlandaskan sistem syariah. Dengan begitu, sistem ekonomi syariah diharapkan akan menjadi salah satu arus ekonomi utama Indonesia, dan juga di dalam sistem kehidupan global hingga menjadi sebuah "way of life". atau gaya hidup.

Ya, misalnya saja soal gaya hidup ekosistem halal. Berkaitan dengan itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiawijono Moegiarso turut berkesempatan memberikan materi pada sesi pertama mengenai Pengembangan Ekosistem Halal Value Chain (HVC).

"Halal value chain sebenarnya satu konsep di mana mengintegrasikan prinsip syariah halal ke dalam seluruh tahapan dari proses supply chain kita. Supply chain itu rantai pasok barang kita mulai dari proses pembuatan, produksi bahan bakunya, sampai ke pengolahan

perkuat posisi ekonomi syariah secara nasional dan global.

Lebih jauh, Master Plan Industri Halal Indonesia Tahun 2023-2029 juga memiliki fokus pada empat pilar utama yaitu peningkatan daya saing, penerapan regulasi, penguatan keuangan dan infrastruktur, serta penguatan merek halal. Program prioritas juga mencakup penguatan pelaku industri halal (UMKM, pesantren, dan startup inovatif), pengembangan SDM unggul dan berdaya saing, peningkatan riset dan inovasi, penguatan halal value chain, serta pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH).

semuanya, dari proses produksi, pengolahan, sampai ke nanti distribusinya. Semuanya menerapkan prinsip-prinsip halal. Dengan jaminan itu, tinggal kita sebar ke market-market, terutama ke negara-negara Islam lainnya," pungkas Sesmenko Susiawijono.

Masih dari jajaran pemerintahan, Deputy Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK Warsito menegaskan bahwa penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah menjadi kunci untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. "Data OJK menunjukkan literasi keuangan



logistik dan distribusi. Jadi hulu ke hilirnya harus menerapkan prinsip-prinsip halal syariah," kata Sesmenko Susiawijono.

Bahasan itu sejalan dengan lima strategi Indonesia untuk meningkatkan peringkat Global Islamic Economy Indicator (SGIE) dari peringkat ke-3 di tahun 2025 menjadi peringkat ke-1 di tahun 2029, dan menaikkan kontribusi PDB syariah dari 49,04 persen pada 2024 ke 56,11 persen pada 2029. Hal tersebut antara lain ditempuh dengan cara memperkuat industri halal (makanan, kosmetik, obat), memberdayakan UMKM halal, ekspor halal, keuangan syariah internasional, dan pengembangan wakaf (ZISWAF). Fokus ini didukung transformasi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru untuk mem-

Hingga saat ini, Pemerintah telah menetapkan empat KIH strategis di Indonesia yakni Modern Halal Valley di Banten, Halal Industrial Park Sidoarjo di Jawa Timur, Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau, dan Jababeka Halal Industrial Cluster di Jawa Barat. Kawasan ini dikembangkan secara bertahap dengan infrastruktur terintegrasi guna mendukung pertumbuhan industri halal nasional.

"Inisiatif ini mencerminkan komitmen Pemerintah dalam mempercepat ekosistem halal yang kompetitif dan berstandar global. Potensinya luar biasa. Yang paling penting, kalau kita bicara halal value chain, itu mulai bahan baku yang datang kita pastikan, sertifikasi, dan kasih label halal di sana. Kita cek dan siapkan

syariah pada tahun 2024 baru mencapai 39,11%, sedangkan inklusinya masih rendah pada 12,88%. Padahal ekonomi syariah sudah menyumbang hingga 48% dari total PDB nasional. Potensi ini sangat besar, tapi perlu didorong dengan literasi yang kuat," ujar Warsito.

Ia menjelaskan, tingkat literasi masyarakat dipengaruhi oleh pendidikan, usia, pendapatan, religiusitas, dan akses informasi. Menurutnya, faktor-faktor tersebut berdampak langsung pada pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam mengakses dan memanfaatkan layanan ekonomi syariah.

"Kemenko PMK mengemban tugas sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian program lintas sektor untuk pen-

guatan budaya literasi nasional, dengan salah satu fokus pada penguatan literasi ekonomi dan keuangan syariah melalui Panca Pusat Pendidikan: keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, tempat ibadah, dan ruang digital,” ungkap Warsito.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum MUI, Buya Anwar Abbas menekankan Majelis Ulama Indonesia berkomitmen mendukung akselerasi ekonomi syariah nasional. “MUI memiliki komitmen yang teguh dalam mendukung pengembangan ekonomi syariah nasional. Dukungan ini tidak hanya sekadar memberikan fatwa, melainkan juga aktif terlibat dalam

menjadi pondasi utama dalam membangun ekonomi syariah yang kuat dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi besar tersebut, Indonesia memerlukan kolaborasi lintas yang melibatkan beberapa pihak. Buya Abbas menegaskan bahwa tidak ada pihak yang mampu berjalan sendiri untuk mewujudkan visi tersebut.

Menurut dia, kolaborasi menjadi kunci utama untuk dapat mewujudkan visi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Buya Abbas menyebut MUI sebagai organisasi ulama memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai keislaman universal tersebut do

catat lonjakan signifikan dalam ekosistem wisata halal mereka. GMTI 2025 menyebut Malaysia sebagai negara dengan peringkat teratas, diikuti oleh Turki di posisi kedua, Arab Saudi di peringkat ketiga, dan Uni Emirat Arab di posisi keempat.

Indonesia berada di posisi kelima. Sementara itu, negara-negara Timur Tengah lainnya seperti Qatar, Oman, Kuwait, Yordania, dan Iran melingkapi posisi 10 besar negara OKI (Organisasi Kerja Sama Islam). Tren yang mempengaruhi penilaian dalam indeks ini mencakup peningkatan penggunaan aplikasi perjalanan halal, peran penting wisatawan muslimah,



berbagai program strategis,” kata Anwar Abbas dalam sambutannya di acara sarasehan.

Menurut Buya Abbas, sebagai negara dengan mayoritas penduduk yang memeluk agama Islam, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk menjadi kiblat bagi ekonomi syariah dunia. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan membentuk pondasi ekonomi syariah yang baik dan memperhatikan nilai-nilai keislaman universal di dalamnya.

“Ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi alternatif, melainkan sebuah manifestasi dari nilai-nilai keislaman universal, yakni keadilan, kemaslahatan dan keberkahan,” kata Buya Abbas.

Nilai-nilai inilah, sambungnya, yang

tengah masyarakat, sementara pemerintah, Bank Indonesia, dan institusi lain memiliki peran dalam merumuskan kebijakan. “Oleh sebab itu, kita perlu terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dan multipihak, termasuk kementerian, lembaga, akademisi, hingga komunitas,” tandasnya

Nah, salah satu sektor yang memerlukan perhatian dan peningkatan kolaborasi adalah industri wisata halal. Alasannya, posisi Indonesia tengah merosot menurut daftar destinasi wisata ramah Muslim dunia versi Global Muslim Travel Index (GMTI) 2025.

Setelah dua tahun berturut-turut menduduki posisi puncak, tahun ini Indonesia disalip oleh sejumlah negara yang men-

ketersediaan fasilitas publik yang ramah Muslim, pertumbuhan tren solo traveling, serta liburan bertema digital detox atau liburan tanpa keterikatan pada dunia digital.

Sedangkan untuk kategori negara yang bukan anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Singapura menempati posisi pertama sebagai destinasi wisata Muslim terfavorit. Posisi berikutnya adalah Inggris, Hong Kong, Taiwan, dan Thailand.

Alhasil, melihat kompleksitas persaingan di tingkat global, boleh jadi wisata halal nasional tampak tertinggal. Boleh jadi juga jika Badan Ekonomi Syariah sudah terbentuk, wisata halal dapat dinavigasi lebih baik. ♦



## URUSAN FISKAL: YA ALOKASI ANGGARAN

Di Sarasehan Ekonomi Syariah Nasional 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berbicara soal fiskal (anggaran). Pasti terkait urusan alokasinya juga.

**D**isrupsi teknologi informasi dan komunikasi khususnya media sosial memang mudah terjadi. Termasuk pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Sarasehan Ekonomi Syariah Nasional 2025: Seolah-olah Bu Menkeu menyebutkan zakat sama dengan pajak.

Konteks sebenarnya adalah pandangan Menkeu Sri Mulyani bahwa APBN, zakat, wakaf, dan pajak memiliki satu tujuan yang sama. Ya itu, alokasinya: mengembalikan hak orang lain melalui mekanisme formal negara dan agama. Dalam hal ini Bu Menkeu mengemukakan negara tidak hanya sekadar alat teknis, tetapi juga instrumen moral yang sejalan dengan prinsip ekonomi syariah.

“Di dalam setiap rezeki dan harta yang kamu dapatkan, ada hak orang lain. Bukan ustazah ya dalam hal ini. Tapi ini karena Menteri Keuangan juga sangat dalam setiap rezeki ada, ada hak orang lain. Caranya hak orang lain itu diberikan ada yang melalui zakat, ada yang melalui wakaf, ada yang melalui pajak. Dan pajak

itu kembali kepada yang membutuhkan,” kata Sri Mulyani di acara Sarasehan Nasional Ekonomi Syariah, Rabu, 13 Agustus 2025.

Menurut dia, prinsip tersebut menjadi landasan kebijakan fiskal yang berpihak pada kelompok rentan. Setiap rupiah yang dipungut negara dari pajak harus dikembalikan ke rakyat dalam bentuk layanan publik, bantuan sosial, atau program pembangunan yang merata.

Ia menegaskan bahwa APBN adalah wujud konkret dari filosofi tersebut. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan Rp1.333 triliun anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati masyarakat, terutama dari golongan berpenghasilan rendah. “Anggaran pemerintah pusat yang langsung dinikmati oleh masyarakat, terutama kelompok bawah, mencapai Rp1.333 triliun untuk tahun ini,” ujarnya.

Bu Menkeu menjelaskan, alokasi anggaran Rp 1.333 triliun mengalir ke berbagai program perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, serta



## DUKUNGAN FISKAL UNTUK EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

tambahan bantuan pangan untuk 18 juta keluarga. Pemerintah juga memberi dukungan modal bagi pelaku UMKM yang belum memiliki akses ke pembiayaan formal, dengan skema yang bisa disesuaikan secara syariah.

Di sektor kesehatan, dana APBN digunakan untuk membangun dan meningkatkan fasilitas layanan, mulai dari puskesmas hingga rumah sakit di daerah terpencil. "Tapi ikhtiar untuk kita memperbaiki masyarakat, untuk mendapatkan hak kesehatan, itu adalah ikhtiar kita," ungkapnya.

Bidang pendidikan pun mendapat perhatian besar, salah satunya lewat program sekolah rakyat yang memberikan asrama dan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin. Anak-anak ini tidak hanya memperoleh pendidikan umum, tetapi juga bimbingan keagamaan serta dukungan nutrisi harian.

"Bapak Presiden juga sudah mulai membuka Sekolah Rakyat, dari ada orang tuanya pemulung pekerja harian, yang kemudian mendapatkan sekolah di asrama dan gratis dengan kualitas yang pendidikan yang baik," imbuhnya menegaskan.

Tak kalah penting, sektor pertanian dan pangan mendapatkan subsidi pupuk, bibit, dan alat pertanian modern (alsintan), serta dukungan distribusi hasil pertanian. Hal ini memastikan petani kecil dapat meningkatkan produktivitas tanpa

terbebani biaya tinggi.

"Dari mulai memberikan subsidi pupuk kepada petani yang paling membutuhkan, alsintan, bibit, hingga perluasan. Itu yang kami sampaikan sebagai instrumen APBN untuk mewujudkan keadilan," tandasnya.

Jadi, kata Bu Menkeu, instrumen APBN berupaya mewujudkan keadilan. "Secara substansi itu juga adalah ekonomi syariah," kata dia.

Toh Bu Menkeu optimistis Indonesia bisa menjadi role model atau panutan negara muslim dunia jika mampu membangun struktur ekonomi berbasis syariah secara tepat tanpa menciptakan inefisiensi dan moral hazard. "Kalau kita bisa membangun struktur ekonomi syariah yang benar, saya yakin kita akan melejit nomor satu di dunia," ujar Sri Mulyani.

Ia menegaskan, APBN diarahkan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah dengan meneladani karakter dari Rasulullah, yaitu perlunya integritas (shidiq dan amanah), transparansi (tabligh), dan kecerdasan adaptif (fathonah) dalam mengelola keuangan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. "Keuangan negara sebagai instrumen yang ingin mengantarkan, melajukan, dan membuka jalan bagi banyak keinginan untuk menciptakan ekonomi syariah terbesar di dunia," ungkapnya.

Sebagai contoh, inovasi Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai instrumen pembiayaan dengan prinsip syariah yang dapat menjadi solusi untuk masalah kekinian. Inovasi tersebut telah meraih penghargaan dari Islamic Development Bank sebagai pembiayaan sosial berbasis wakaf yang inovatif. "Sudah ada rumah sakit mata yang dibangun. Segera bisa menyusul proyek-proyek yang terus kita akan tingkatkan," jelas Menkeu.

Bu Menkeu menegaskan pula nilai-nilai keislaman dan Indonesia bisa dijalankan untuk menciptakan ekonomi besar dan kemaslahatan bagi umat. Untuk mencapai cita-cita tersebut, Presiden Prabowo Subianto melalui Asta Cita mulai membangun ekonomi mulai dari level akar rumput, yakni Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pemeriksaan kesehatan gratis, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, ketahanan pangan dengan memperkuat petani, nelayan, dan lainnya.

"APBN adalah instrumen bagi kita semuanya dan kita akan terus menggunakan instrumen itu untuk bisa menjawab dan mencapai tujuan-tujuan ideal yang ingin kita capai," tandas Sri Mulyani.

Toh soal alokasi APBN yang ikut menjadi bagian dinamikanya. Dalam konteks ini, kembali lagi, disrupsi teknologi informasi dan komunikasi perlu pula dicermati. ♦

## GUGAT CERAI DI KALANGAN CPNS DAN PPPK DALAM SOROTAN SOSIAL

**V**iral dalam pemberitaan banyak gugatan cerai yang dilakukan ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang baru diangkat di beberapa daerah, seperti Kabupaten Blitar (Jawa Timur) dan Kabupaten Pandeglang (Banten).

Kabar ini sontak menjadi sorotan masyarakat dan mereka menyayangkan kenapa hal itu terjadi. Karena setelah bertahun-tahun berjuang menembus ketatnya seleksi CPNS/PPPK, kabar pengangkatan tentu menjadi momen yang membahagiakan. Status baru membawa harapan: gaji tetap, jaminan masa depan, dan pengakuan sosial.

Namun, di balik stabilitas yang tampak itu, justru muncul ironi yang tak sedikit dialami oleh mereka yang baru menapaki tangga kemapanan: rumah tangga retak, gugatan cerai meningkat.

Fenomena meningkatnya angka perceraian pasca pengangkatan CPNS/PPPK mencuat di berbagai daerah. Banyak pasangan yang bertahan dalam keterbatasan, justru berpisah setelah mencapai kehidupan yang dianggap mapan. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang tidak bisa



**OLEH M. ISHOM EL-SAHA  
(GURU BESAR UIN BANTEN)**

Dalam banyak kasus, pengangkatan sebagai CPNS/PPPK membawa perubahan identitas yang cukup drastis: dari “yang berjuang” menjadi “yang berhasil”, dari “yang menggantungkan” menjadi “yang merasa mandiri”.

Perubahan ini tidak selalu disadari. Namun dalam relasi, ia hadir dalam bentuk ketimpangan baru. Pasangan yang dulu berjalan beriringan, kini merasa berada di jalur yang berbeda. Waktu, perhatian, dan energi yang dulu diprioritaskan untuk keluarga, mulai terbagi ke dalam urusan dinas, pelatihan, pergaulan baru, dan tuntutan

Inilah yang kerap menjadi penyebab “perceraian senyap”, tanpa konflik besar, tapi dilandasi rasa keterasingan yang makin membesar.

Ketimpangan ritme hidup juga ikut memperlebar jarak. Salah satu pasangan mulai hidup dalam dunia yang lebih sistematis—penuh aturan dan target. Sementara yang lain masih berada dalam dunia hidup yang lama. Perbedaan ini menciptakan semacam “dunia dalam dunia” yang tak mudah dijumpai jika tidak ada komunikasi yang reflektif.

Selain itu, masyarakat kita masih menempatkan CPNS/PPPK sebagai simbol keberhasilan. Ini sering kali membentuk ego baru dalam diri seseorang. Mereka merasa lebih dihargai, lebih mampu, bahkan kadang merasa tak lagi membutuhkan pasangan secara emosional maupun finansial. Dalam kondisi ini, relasi mudah tergelincir menjadi relasi kuasa, bukan lagi relasi kesetaraan.

Gugatan cerai yang muncul tidak melulu karena pertengkaran. Justru banyak yang muncul karena rasa sepi yang lama dipendam. Bahasa cinta berubah menjadi bahasa administratif. Kehangatan yang dulu mengikat, kini digantikan oleh rutinitas dan peran sosial yang kaku. Hubungan kehilangan napasnya.

Kemapanan, pada akhirnya, bukan jaminan bagi keharmonisan. Ia justru menuntut kedewasaan baru, baik secara pribadi maupun sebagai pasangan. Tanpa pembaruan makna dan komunikasi, kemapanan bisa menjadi ruang hampa yang membunuh keintiman. Rumah tangga yang dulu tumbuh dari perjuangan bersama, bisa runtuh karena kehilangan arah di tengah pencapaian.

Dalam konteks ini, negara dan lembaga kepegawaian tidak bisa hanya mempersiapkan pegawai dari sisi teknis dan administratif. Pendidikan karakter dan penguatan relasi juga menjadi penting. Karena relasi yang sehat adalah fondasi dari integritas seorang CPNS/PPPK.

Bagi pasangan yang sedang atau baru saja meraih kemapanan status sosial, penting untuk memahami bahwa perubahan status sosial perlu diimbangi dengan kematangan emosional. Tujuan hidup bersama perlu diperbarui, bukan dibiarkan usang. Jika tidak, kemapanan bisa menjadi awal dari keterasingan—dan keterasingan yang dibiarkan, bisa berubah menjadi perpisahan. Wallahu a'lam. ♦kemenag.go.id



dijawab secara sederhana: mengapa stabilitas ekonomi tidak sejalan dengan stabilitas emosional dan relasi?

Dalam logika umum, kemapanan seharusnya memperkuat rumah tangga. Namun, kehidupan manusia tidak berjalan linier. Saat status sosial berubah, cara pandang seseorang terhadap dirinya dan pasangannya pun ikut berubah.

profesionalisme.

Fenomena ini juga berkaitan erat dengan dinamika makna dalam hidup. Setelah kebutuhan ekonomi terpenuhi, manusia kerap mencari makna yang lebih dalam. Namun, jika makna itu tidak ditemukan dalam relasi, maka pasangan bisa merasa kosong, tidak nyambung, bahkan tak lagi tahu untuk apa mereka tetap bersama.



**IKLAN 1 HALAMAN FC  
Rp50.000.000**



**IKLAN BACK COVER FC  
Rp75.000.000**



**IKLAN 1/2 HALAMAN FC  
Rp25.000.000**

# Media yang Tepat Untuk Promosi Usaha Anda

# MOESLIM CHOICE

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC)
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC),
- IKLAN ADVERTORIA L/INFORIAL (FC)
- IKLAN CENTERSPREAD (FC), DILUAR EDISI KHUSUS
- IKLAN COVER 2 (FC)
- IKLAN COVER 3 (FC)
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN

## MANFAAT PLUS BERIKLAN DI MAJALAH MOESLIM CHOICE

- Lebih Akurat dengan Target Pesan Iklan Sesuai dengan Topik Bahasan
- Pilihan Halaman Iklan yang mudah disimak Pembaca
- Harga Iklan Bertabur Diskon



**IKLAN CENTER SPREAD FC  
Rp80.000.000**



**CONTACT PERSON: NIKEN**

**021 - 791 96 781  
0896 4369 4121**

**Email: moeslimchoice@gmail.com**



# MOESLIM CHOICE

HARGA RP. 125.000,-

MENGGALANG  
WAKAF  
PENDIDIKAN

KISAH  
HIJRAH  
CELINE  
EVANGELISTA

SELVI GIBRAN  
KAGUM  
SONGKET  
PALEMBANG

VERIFIKASI  
USIA  
DI RANAH  
DIGITAL

LARANGAN  
ROBLOX  
DI MATA  
PUAN



## EKONOMI SYARIAH DI PENTAS GLOBAL